

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PROGRAM SISTEM LAYANAN DAN
RUJUKAN TERPADU (SLRT) PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN**

SIAK SRI INDRAPURA

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Penyusunan Skripsi
pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau*

Dina Margareta Putri

NPM : 157110087

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

PEKANBARU

2019

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Segala Puji dan Syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala kasih dan karunia-Nya sehingga penulis dapat merampungkan penyelesaian penulisan skripsi ini, dengan judul “Efektifitas Pelaksanaan Program Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) di Kabupaten Siak Sri Indrapura”.

Skripsi ini adalah salah satu syarat yang harus penulis tempuh dalam meraih gelar kesarjanaan pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau. Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak yang turut serta di dalamnya. Maka dengan itu penulis mengucapkan terima kasih dan rasa cinta kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.CL yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam mendapatkan ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah menjadi motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan studi.
3. Bapak Hendry Andry, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik dan Ibu Nurmasari, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

4. Bapak Hendry Andry, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan waktu dan pengetahuan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Dia Meirina Suri, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan waktu dan pengetahuan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini, mudah-mudahan ilmu yang bapak dan ibu berikan bermanfaat bagi semua orang termasuk diri penulis.
7. Kepala Tata Usaha dan Pegawai Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu dalam proses administrasi selama perkuliahan ini.
8. Pegawai Kantor Dinas Sosial Kabupaten Siak yang telah membantu dalam kesuksesan penelitian ini, termasuk dalam pemberian data dan juga dukungan lainnya.
9. Ayahanda dan Ibunda terkasih yang selama ini telah memberikan dukungan dalam perkuliahan baik secara materil, doa, dan motivasi.
10. Rekan-rekan Administrasi Publik angkatan 2015 yang telah menjadi teman seperjuangan dan banyak membantu serta memberikan motivasi kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.
11. Khususnya kepada Abang Fikky dan Kakak Elfin yang memberi arahan penulis dalam membuat naskah Skripsi ini dan sahabat yang tersayang Kiki Oktavianti Dewi, Muhammad Khatib Fikri yang selalu ada untuk

menemani penulis dalam melakukan penelitian dan melaksanakan proses bimbingan.

Dalam penyusunan naskah skripsi ini, banyak hambatan dan tantangan yang penulis temui. Oleh karena itu, apabila pembaca menemukan kesalahan dan kekurangan, maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat positif dari semua pihak yang telah membaca skripsi ini guna koreksi dan penyempurnaan skripsi ini kedepannya.

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih, semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan dari pihak yang membantu kelancaran penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita bersama.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pekanbaru, 12 Desember 2019

Penulis

Dina Margareta Putri

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	32
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	33
1. Tujuan Penelitian.....	33
2. Kegunaan Penelitian.....	33
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	34
A. Studi Kepustakaan	34
1. Konsep Administrasi.....	34
2. Konsep Administrasi Publik	40
3. Konsep Organisasi	42
4. Konsep Manajemen	44
5. Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia.....	46
6. Konsep Efektifitas.....	49
7. Konsep Pelaksanaan/Implementasi.....	51
8. Konsep Koordinasi	53
9. Konsep Kemiskinan.....	58
B. Kerangka Pikir.....	62
C. Konsep Operasional.....	63

D. Operasional Variabel	66
E. Teknik Pengukuran.....	67
BAB III : METODE PENELITIAN.....	70
A. Tipe Penelitian.....	70
B. Lokasi Penelitian	70
C. Populasi dan Sampel.....	71
D. Teknik Penarikan Sampel.....	72
E. Jenis dan Sumber Data	72
F. Teknik Pengumpulan Data	73
G. Teknik Analisis Data	75
H. Jadwal Kegiatan Penelitian.....	75
BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN.....	76
A. Sejarah Perkembangan Kabupaten Siak Sri Indrapura.....	76
B. Letak Geografis dan Demografi Kabupaten Siak Sri Indrapura.....	78
C. Visi dan Misi Kabupaten Siak Sri Indrapura.....	82
D. Gambaran Umum Dinas Sosial Kabupaten Siak Sri Indrapura.....	83
E. Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Siak Sri Indrapura.....	84
F. Sarana dan Prasarana Dinas Sosial Kabupaten Siak Sri Indrapura	85
G. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Siak Sri Indrapura	86
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	88
A. Identitas Responden.....	88
1. Tingkat Umur.....	89
2. Tingkat Pendidikan	91
3. Jenis Kelamin.....	92
4. Masa Kerja.....	94
B. Hasil Penelitian Efektifitas Pelaksanaan Program Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) di Kabupaten Siak Sri Indrapura	95
1. Pemahaman Program	95
2. Tepat Sasaran.....	102
3. Tepat Waktu.....	108
4. Tercapainya Tujuan	113

5. Perubahan Nyata	119
C. Faktor Penghambat Efektifitas Pelaksanaan Program Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) di Kabupaten Siak Sri Indrapura.....	130
BAB VI : PENUTUP.....	132
A. Kesimpulan.....	132
B. Saran	135
DAFTAR PUSTAKA.....	137
LAMPIRAN.....	140



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 : Masyarakat Kurang Mampu Kabupaten Siak Tahun 2018	23
I.2 : Masyarakat Pengurus SKTM Kabupaten Siak Tahun 2018	25
II.1 : Operasionalisasi Variabel Penelitian tentang Efektifitas Pelaksanaan Program Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) di Kabupaten Siak Sri Indrapura	66
III.1 : Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian tentang Efektifitas Pelaksanaan Program Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) di Kabupaten Siak Sri Indrapura	71
III.2 : Jadwal Kegiatan Penelitian	75
IV.1 : Wilayah Administrasi dan Luas Kabupaten Siak Tahun 2017	81
IV.2 : Jumlah Penduduk Kabupaten Siak Sri Indrapura Tahun 2017	82
IV.3 : Sarana dan Prasarana di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Siak Sri Indrapura	86
V.1 : Distribusi Identitas Responden Tim Pelaksana berdasarkan Tingkat Umur	89
V.2 : Distribusi Identitas Responden Masyarakat berdasarkan Tingkat Umur	90
V.3 : Distribusi Identitas Responden Tim Pelaksana berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	91
V.4 : Distribusi Identitas Responden Masyarakat berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	92
V.5 : Distribusi Identitas Responden Tim Pelaksana berdasarkan Jenis Kelamin.....	93
V.6 : Distribusi Identitas Responden Masyarakat berdasarkan Jenis Kelamin.....	93
V.7 : Distribusi Identitas Responden Penelitian Efektifitas Pelaksanaan Program Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) di Kabupaten Siak Sri Indrapura berdasarkan Masa Kerja.	94

V.8 : Distribusi Tanggapan Responden Tim Pelaksana Mengenai Indikator Pemahaman Program terhadap Efektifitas Pelaksanaan Program Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) Pada Dinas Sosial Kabupaten Siak Sri Indrapura	96
V.9 : Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Mengenai Indikator Pemahaman Program terhadap Efektifitas Pelaksanaan Program Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) Pada Dinas Sosial Kabupaten Siak Sri Indrapura	99
V.10 : Distribusi Tanggapan Responden Tim Pelaksana Mengenai Indikator Tepat Sasaran terhadap Efektifitas Pelaksanaan Program Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) Pada Dinas Sosial Kabupaten Siak Sri Indrapura	103
V.11 : Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Mengenai Indikator Tepat Sasaran terhadap Efektifitas Pelaksanaan Program Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) pada Dinas Sosial Kabupaten Siak Sri Indrapura	105
V.12 : Distribusi Tanggapan Responden Tim Pelaksana Mengenai Indikator Tepat Waktu terhadap Efektifitas Pelaksanaan Program Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) pada Dinas Sosial Kabupaten Siak Sri Indrapura	108
V.13 : Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Mengenai Indikator Tepat Waktu terhadap Efektifitas Pelaksanaan Program Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) pada Dinas Sosial Kabupaten Siak Sri Indrapura	110
V.14 : Distribusi Tanggapan Responden Tim Pelaksana Mengenai Indikator Tercapainya Tujuan terhadap Efektifitas Pelaksanaan Program Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) pada Dinas Sosial Kabupaten Siak Sri Indrapura	114
V.15 : Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Mengenai Indikator Tercapainya Tujuan terhadap Efektifitas Pelaksanaan Program Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) pada Dinas Sosial Kabupaten Siak Sri Indrapura	116
V.16 : Distribusi Tanggapan Responden Tim Pelaksana Mengenai Indikator Perubahan Nyata terhadap Efektifitas Pelaksanaan Program Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) pada Dinas Sosial Kabupaten Siak Sri Indrapura	120

V.17 : Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Mengenai Indikator Perubahan Nyata terhadap Efektifitas Pelaksanaan Program Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) pada Dinas Sosial Kabupaten Siak Sri Indrapura	122
V.18 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Tim Pelaksana Terhadap Efektifitas Pelaksanaan Program Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) pada Dinas Sosial Kabupaten Siak Sri Indrapura.....	125
V.19 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Efektifitas Pelaksanaan Program Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) pada Dinas Sosial Kabupaten Siak Sri Indrapura.....	128



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
I.1 : Tata Laksana Program SLRT.....	28
II.1 : Kerangka Pikir Penelitian tentang Efektifitas Pelaksanaan Program Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) di Kabupaten Siak Sri Indrapura.....	62
IV.1 : Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Siak Sri Indrapura.....	87

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Daftar Kuisisioner untuk Responden Tim Pelaksana tentang Efektifitas Pelaksanaan Program Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) di Kabupaten Siak Sri Indrapura.....	140
2. Daftar Kuisisioner untuk Responden Masyarakat tentang Efektifitas Pelaksanaan Program Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) di Kabupaten Siak Sri Indrapura.....	151
3. Daftar Pertanyaan Wawancara untuk Kepala Bidang SLRT tentang Efektifitas Pelaksanaan Program Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) di Kabupaten Siak Sri Indrapura.....	161
4. Daftar Data Telly Penelitian tentang Efektifitas Pelaksanaan Program Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) di Kabupaten Siak Sri Indrapura (Tim Pelaksana)	166
5. Daftar Data Telly Penelitian tentang Efektifitas Pelaksanaan Program Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) di Kabupaten Siak Sri Indrapura (Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat).....	167
6. Foto Dokumentasi Penelitian tentang Efektifitas Pelaksanaan Program Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) di Kabupaten Siak Sri Indrapura.....	169

PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dina Margareta Putri
NPM : 157110087
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Efektifitas Pelaksanaan Program Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) di Kabupaten Siak Sri Indrapura

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan butir 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 04 November 2019
Pelaku Pernyataan,

Dina Margareta Putri

**EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PROGRAM
SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU (SLRT)
PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN SIAK SRI INDRAPURA**

ABSTRAK

**Oleh
Dina Margareta Putri**

Kata Kunci : Efektifitas, Pelaksanaan, Program, Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu;

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Efektifitas Pelaksanaan Program Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) di Kabupaten Siak Sri Indrapura. Indikator penilaian yang dipergunakan meliputi pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya program, dan perubahan nyata. Tipe penelitian ini adalah survey diskriptif kuantitatif, yaitu memprioritaskan daftar kuisisioner sebagai alat pengumpulan data dan data yang terkumpul dengan alat ini kemudian dijadikan bahan baku utama untuk menganalisis kondisi empiris dan obyektifitas keberadaan tujuan pada lokasi penelitian. Adapun populasi dan sampel pada penelitian ini yaitu berjumlah 70 orang. Jenis dan teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari, data primer dikumpulkan dengan menggunakan teknik daftar kuisisioner dan wawancara serta data sekunder yang dikumpulkan menggunakan teknik observasi. Sementara teknik analisa data yang dipergunakan adalah dengan alat bantu tabel frekuensi. Berdasarkan teknik analisis ini peneliti menilai dan menyimpulkan bahwa Efektifitas Pelaksanaan Program Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) di Kabupaten Siak Sri Indrapura dikategorikan cukup terlaksana. Adapun faktor penghambatnya adalah masih banyak masyarakat menengah kebawah yang tidak mendapatkan program SLRT, tapi justru malah masyarakat yang tergolong mampu seperti yang berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) juga ikut mendapatkan program SLRT. Ini berarti program SLRT kurang tepat sasaran. Kemudian Masyarakat yang berobat menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) kurang dilayani di rumah sakit, masyarakat seakan dipersulit dalam berobat dan proses penanganannya juga sangat lambat. Ini berarti program SLRT tidak berjalan efektif bagi masyarakat yang tidak mampu.

**EFFECTIVENESS OF THE IMPLEMENTATION OF INTEGRATED
SERVICE AND SERVICE SYSTEM PROGRAMS IN THE SOCIAL
DEPARTMENT OF SIAK SRI INDRAPURA DISTRICT**

ABSTRACT

By
Dina Margareta Putri

Keywords: Effectiveness, Implementation, Programs, Service Systems and Integrated Referrals;

This study aims to determine and analyze the Effectiveness of the Implementation of the Integrated Service and Referral System (SLRT) Program Policy in Siak Sri Indrapura Regency. The assessment indicators used include understanding the program, right on target, on time, achievement of the program, and real change. This type of research is a quantitative descriptive survey, which prioritizes the questionnaire list as a data collection tool and the data collected with this tool is then used as the main raw material for analyzing the empirical conditions and objectivity of the existence of objectives at the research location. The population and sample in this study were 70 people. Types and data collection techniques used consist of, primary data collected using questionnaire and interview lists and secondary data collected using observation techniques. While the data analysis technique used is the frequency table tool. Based on this analysis technique the researcher assessed and concluded that the Effectiveness of the Implementation of the Integrated Service and Referral System (SLRT) Program Policy in Siak Sri Indrapura Regency was considered quite implemented. The inhibiting factor is that there are still many middle class people who do not get the SLRT program, but instead those who are classified as capable as those who work as State Civil Apparatus (ASN) also get the SLRT program. This means that the SLRT program is not well targeted. Then the people who seek treatment using the Disability Certificate (SKTM) are under-served in the hospital, the community seems to be complicated in treatment and the treatment process is also very slow. This means that the SLRT program is not effective for the poor.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Administrasi, Organisasi, dan Manajemen dalam suatu pemerintahan sangat memiliki peran yang penting. Dalam suatu organisasi pasti terdapat administrasi dan manajemen. Pada saat kegiatan administrasi telah maju, maka pelaksanaan administrasi telah dilaksanakan oleh orang yang bekerja sama dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan bersama, dan untuk itulah diperlukan organisasi dan manajemen. Menurut SP. Siagian (dalam Syafri, 2012;9) Administrasi didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Negara Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang dijalankan oleh Pemerintah Negara Indonesia guna mencapai tujuan Negara Indonesia yang tercantum sesuai dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, pada alenia ke-4 (Empat), yang berbunyi “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan

Indonesia dan Kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Sejak kemerdekaan, Bangsa Indonesia telah mempunyai perhatian besar terhadap terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Terutama dalam bidang peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial. Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan menjadi salah satu agenda utama Pemerintah dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Hal ini telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Untuk menjalankan agenda tersebut, memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan yang terdiri dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dunia usaha (sektor swasta), dan masyarakat.

Sebagai upaya mewujudkan Nawa Cita Presiden-Wakil Presiden Jokowi yaitu membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa Dalam Kerangka Negara Kesatuan (Nawa Cita 3), dan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pelatihan (Nawa Cita 5), Pemerintah Pusat dan Daerah perlu lebih mengenali dan memahami permasalahan sosial di masyarakat, sekaligus mampu memberikan solusi layanan yang dibutuhkan secara cepat, tepat, efektif dan efisien serta terintegrasi.

Dalam penanggulangan kemiskinan, pemerintah saat ini telah menyelenggarakan berbagai program untuk memenuhi kebutuhan dasar

masyarakat. Upaya ini dilakukan melalui perbaikan serangkaian program perlindungan sosial skala nasional yang mencakup 40% masyarakat berpendapatan terendah, diantaranya Program Beras Bersubsidi bagi Penduduk Berpenghasilan Rendah (Raskin), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP) yang disalurkan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Program Indonesia Sehat (PIS) yang disalurkan melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS). Pemerintah juga menyelenggarakan program-program pemberdayaan masyarakat serta penyediaan akses terhadap kredit mikro, inklusi keuangan dan penciptaan lapangan kerja baru. Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota juga telah berpartisipasi aktif dalam melaksanakan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Tujuan dari diselenggarakannya program tersebut dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat miskin, penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat serta melaksanakan percepatan pembangunan daerah tertinggal dalam upaya mencapai masyarakat Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan.

Meskipun berbagai upaya pemerintah pusat dan daerah untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan kerentanan telah dilakukan, jumlah penduduk miskin dan rentan miskin masih tetap tinggi. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin pada Maret 2016 adalah 28,01 juta orang (10,86%). Selain itu, orang yang berada di atas garis kemiskinan rentan jatuh miskin jika menghadapi goncangan atau krisis ekonomi. Selanjutnya, banyak kasus keluarga miskin dan rentan miskin tidak menerima layanan perlindungan sosial secara komprehensif

walaupun layak menjadi penerima bantuan. Pelayanan dan penanganan masalah sosial yang kurang optimal bersumber dari cara pemahaman dalam mengatasi masalah sosial yang mengabaikan keterpaduan dalam proses penanganannya. Penanganan masalah sosial yang dilakukan berdasarkan paradigma pelayanan sektoral saat ini kurang terarah kepada sasaran pelayanan dan tidak dilaksanakan secara berkelanjutan. Masih banyak program pelayanan sektoral yang masih berjalan sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas pokok dan fungsi masing-masing lembaga/institusi.

Sejak era otonomi daerah, pemerintah Kabupaten/Kota kurang menjadikan penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai program dan kegiatan prioritas secara kelembagaan. Faktor yang menyebabkan kondisi tersebut meliputi pembinaan/fasilitasi oleh Pemerintah Pusat kurang terlaksana secara komprehensif. Akibatnya, partisipasi Pemerintah Daerah dalam perencanaan, penganggaran dan pelayanan yang berpihak kepada bagi penyandang masalah sosial masih rendah.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, mengembangkan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) untuk selanjutnya disebut dengan SLRT saja, untuk Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, guna mendukung peningkatan kualitas layanan perlindungan sosial yang komprehensif dan terintegratif. SLRT memiliki empat fungsi utama yaitu: integrasi layanan dan informasi, identifikasi keluhan, rujukan dan penanganan keluhan, pencatatan kepesertaan dan kebutuhan program, dan pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat

secara dinamis dan berkala di daerah. Segala Ketentuan yang berlaku dalam pengurusan Program SLRT ini berpedoman kepada Peraturan Direktur Jenderal Republik Indonesia Pemberdayaan Sosial Nomor 577/DYS.3/KPTS/10/2016 yaitu tentang pedoman umum pelaksanaan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.

SLRT adalah sistem layanan yang membantu untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan berdasarkan profil dalam daftar penerima manfaat dan menghubungkan mereka dengan program-program perlindungan sosial, dan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah (pusat, provinsi, dan kabupaten/kota) sesuai dengan kebutuhan mereka. SLRT juga membantu mengidentifikasi keluhan masyarakat miskin dan rentan, melakukan rujukan, dan memantau penanganan keluhan untuk memastikan bahwa keluhan-keluhan tersebut di tangani dengan baik (dalam buku Pedoman Umum Pelaksanaan SLRT, 2016 : 4)

Tujuan SLRT adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem perlindungan sosial untuk mengurangi kemiskinan, kerentangan dan kesenjangan. Secara khusus tujuan yang akan dicapai antaranya :

1. Meningkatkan akses rumah tangga/keluarga miskin dan rentan terhadap multi-program/layanan.
2. Meningkatkan akses rumah tangga/keluarga paling miskin dan paling rentan maupun penyandang masalah sosial lainnya terhadap program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.

3. Meningkatkan integrasi berbagai layanan sosial di daerah sehingga fungsi layanan tersebut menjadi lebih responsive.
4. Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam “pemutakhiran” Daftar Penerima Manfaat secara dinamis dan berkala serta pemanfaatannya untuk program-program perlindungan sosial di daerah.
5. Memberdayakan masyarakat untuk lebih memahami hak-haknya terkait layanan dan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
6. Meningkatkan kapasitas Pemerintah di semua tingkatan dalam mengkoordinasikan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
7. Memberikan masukan untuk proses perencanaan dan penganggaran perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan agar lebih memihak kepada masyarakat miskin dan rentan.

Penyelenggara SLRT diharapkan mampu memperkuat hubungan jejaring kerja antara pusat dan daerah melalui Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) atau unit-unit pelayanan sosial yang ada sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah. Program SLRT ini memiliki fungsi yaitu :

1. Integrasi Layanan dan Informasi

SLRT membantu mengintegrasikan berbagai layanan sosial yang dilakukan pemerintah pusat maupun daerah sehingga fungsi layanan tersebut menjadi lebih komprehensif, responsif, dan berkesinambungan.

2. Identifikasi Keluhan, Rujukan dan Penanganan Keluhan

SLRT mencatat keluhan masyarakat, baik keluhan yang bersifat kepesertaan dan keluhan lainnya, terkait program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan keluhan tersebut, SLRT merujuk rumah tangga/keluarga miskin dan rentan ke program-program yang sesuai dengan kebutuhan mereka. SLRT juga membantu pengelola program di pusat, daerah dan desa untuk menelaah, merespon dan menindaklanjuti keluhan-keluhan tersebut.

3. Pencatatan Kepesertaan dan Kebutuhan Program

SLRT menginventarisir program-program perlindungan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah dan mencatat kepesertaan rumah tangga/keluarga miskin dan rentan dalam program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang ada. SLRT juga mencatat kebutuhan program dari rumah tangga/keluarga miskin yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka.

4. Pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat secara dinamis

SLRT membantu melakukan pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat secara dinamis dan berkelanjutan di daerah. SLRT juga dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk mengakses program layanan sosial secara mandiri yang difasilitasi oleh fasilitator di tingkat masyarakat.

Di Indonesia, terdapat 20 kabupaten yang mendapatkan penerimaan program SLRT dari Kementerian Sosial RI. Sebanyak 20 Kabupaten tersebut, di Provinsi Riau terdapat 2 Kabupaten yang mendapatkan Program SLRT yaitu Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak Sri Indrapura. Penulis memilih Kabupaten Siak

Sri Indrapura sebagai lokasi penelitian yaitu dikarenakan Kabupaten Siak Sri Indrapura melakukan pelayanan kepada masyarakat dengan sangat baik dan mendapatkan penghargaan sebagai kabupaten yang melayani masyarakat terbaik se-Provinsi Riau, dan Kabupaten Siak Sri Indrapura sudah menjalankan Program SLRT ini cukup efektif dan dengan adanya penerimaan Bantuan Program SLRT ini pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab menyediakan kontribusi natura dan anggaran untuk sarana dan prasarana, termasuk penyiapan sekretariat dan tim teknis SLRT. Secara khusus ada tiga fungsi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan SLRT :

A. Koordinasi

Fungsi koordinasi di tingkat kabupaten/kota yang dilaksanakan melalui TKPK Kabupaten/Kota memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menyebarkan SLRT di tingkat kabupaten/kota hingga desa/kelurahan.
2. Berkoordinasi dengan SKPD Teknis Kabupaten/Kota guna menindaklanjuti rujukan dari Sekretariat Teknis SLRT Kabupaten/Kota terkait program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial dibawah kewenangan SKPD Teknis Kabupaten/Kota.
3. Berkoordinasi dengan Bappeda dan SKPD Teknis Kabupaten/Kota dalam pemanfaatan data dan informasi dari Sekretariat Teknis SLRT Kabupaten/Kota untuk perencanaan dan penganggaran program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan kabupaten/kota.
4. Membantu Sekretariat Teknis SLRT Kabupaten/Kota dalam menggalang kemitraan dengan Lembaga NonPemerintah termasuk pihak swasta

Corporate Social Responsibility (CSR) dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial serta terwujudnya SLRT yang efisien dan efektif.

5. Berpartisipasi dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan layanan SLRT termasuk melalui Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di tingkat desa/kelurahan dan setingkatnya.
6. Mendukung proses pembelajaran antar kecamatan dan desa/kelurahan dalam kabupaten/kota tersebut.

B. Sekretariat Teknis SLRT

Sekretariat Teknis SLRT di tingkat kabupaten/kota bertanggung jawab atas pelaksanaan SLRT di daerah dengan tugas-tugas sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran untuk kegiatan SLRT Kabupaten/Kota dan kecamatan.
2. Melakukan pengumpulan dan review data.
3. Merekrut dan mengelola fasilitator dan supervisor.
4. Merekrut dan melatih tim survei sesuai kebutuhan, bekerjasama dengan lembaga terkait, seperti Badan Pusat Statistik (BPS), di tingkat pusat maupun daerah.
5. Melakukan entry data di tingkat daerah, berdasarkan data yang dikumpulkan oleh fasilitator setelah ditelaah oleh supervisor.
6. Melakukan pemeringkatan calon penerima manfaat untuk kebutuhan program daerah.

7. Melakukan rujukan keluhan yang bersifat kepesertaan dan program kepada pengelola program terkait, baik Pusat maupun Daerah.
8. Mengecek dan menindaklanjuti keluhan penduduk miskin dan rentan yang disampaikan kepada pengelola program terkait.
9. Melakukan analisis hasil pengumpulan data oleh fasilitator dalam bentuk dashboard. Yang berisi: ringkasan usulan pemutakhiran dan penambahan data penerima manfaat, akses program pusat dan daerah, komplementaritas dan irisan program, dan “kesenjangan” pelayanan di Kabupaten/Kota. *Dashboard* tersebut berguna untuk perencanaan dan penganggaran perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan di daerah.
10. Membangun dan menindaklanjuti kemitraan dengan Lembaga Non-Pemerintah termasuk Pihak Swasta (CSR) dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial serta terwujudnya SLRT yang efisien dan efektif.
11. Melakukan monitoring terhadap Puskesmas di tingkat desa/kelurahan dengan melibatkan kecamatan.
12. Menyusun laporan kegiatan SLRT kabupaten/kota untuk disampaikan kepada Sekretariat Nasional dan pihak terkait lainnya di daerah.

C. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait

SKPD di tingkat kabupaten/kota memiliki tanggungjawab untuk melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dan Sekretariat Teknis SLRT Kabupaten/Kota serta merespon dan menindaklanjuti

usulan dan keluhan program perlindungan sosial di bawah kewenangan pemerintah daerah yang dikelola oleh SKPD terkait.

Selain fungsi dari Pemerintah Daerah dalam menjalankan ketentuan program SLRT ini, maka bupati siak mengeluarkan keputusan dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk menyelenggarakan program SLRT di Kabupaten Siak Sri Indrapura yaitu : Keputusan Bupati Siak Nomor 7/HK/KPTS/2017 tentang Unsur Penyelenggaraan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu “Peduli Sesamo”. Yang berisikan susunan dan uraian tugas sebagai berikut :

A. Tim Koordinasi

Tim Koordinasi terdiri dari:

1. Pembina

Pembina adalah Bupati Siak, mempunyai tugas melindungi dan memberikan pembinaan kepada semua anggota penyelenggara SLRT agar pelaksanaan SLRT secara keseluruhan dapat terlaksana dengan baik dan dapat dipertanggung jawabkan.

2. Pengarah

Pengarah adalah Wakil Bupati selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Siak, bertugas memberikan arahan strategis kepada Penyelenggara SLRT agar penyelenggaraan SLRT terkoordinasi dan terselenggara dengan baik.

3. Penanggung jawab

Penanggung jawab adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Siak, bertugas menjamin kualitas keberhasilan penyelenggaraan SLRT.

4. Ketua

Ketua adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Siak, bertugas memimpin pelaksanaan SLRT berdasarkan arahan strategis, merumuskan kebijakan operasional penyelenggaraan SLRT secara keseluruhan dan melaksanakan pengendalian SLRT, serta melaporkan penyelenggaraan SLRT ke Pembina melalui Penanggungjawab dan diketahui oleh Pengarah.

5. Wakil Ketua

Wakil Ketua adalah Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Siak, bertugas membantu tugas Ketua dalam penyelenggaraan SLRT.

6. Anggota.

Anggota Tim Koordinasi berjumlah 3 (tiga) orang, terdiri dari:

- a. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Siak. Bertugas merumuskan kebijakan operasional, melakukan perencanaan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan SLRT di bidang kesehatan.
- b. Kepala Bidang Pembinaan SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak. Bertugas merumuskan kebijakan operasional, melakukan perencanaan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan SLRT di bidang pendidikan.
- c. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Bertugas merumuskan kebijakan

operasional, melakukan perencanaan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan SLRT di bidang kependudukan.

B. Tim Pelaksana

Tim Pelaksana adalah pelaksana teknis SLRT dalam bentuk Kelembagaan Sekretariat SLRT Kabupaten Siak yang berkedudukan di Dinas Sosial Kabupaten Siak, dengan susunan kepengurusan terdiri dari Manager, Asisten Manager, Kepala Seksi Data dan Pelaporan, Kepala Seksi Pelayanan Sosial dan Rujukan, Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan, Kepala Seksi Pendidikan, Kepala Seksi Pelayanan Administrasi Kependudukan, dengan rincian tugas sebagai berikut:

1. Manajer

Manajer adalah Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Siak dan berkedudukan di Sekretariat SLRT Kabupaten Siak. Manajer merupakan Kepala Sekretariat SLRT Kabupaten yang mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan proses perencanaan dan sosialisasi SLRT di daerah.
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas sekretariat teknis daerah, termasuk :
 - Pengelolaan supervisor dan fasilitator.
 - Rujukan keluhan kepada pengelola program terkait, pusat maupun daerah.
 - Analisis hasil pengumpulan data SLRT.
- c. Melakukan koordinasi dengan Sekretariat Nasional.
- d. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait termasuk Pemerintah Provinsi.
- e. Menelaah dan merekomendasi.

- Pembaharuan data penerima manfaat.
 - Survey penambahan data penduduk.
 - Penambahan data kebutuhan program.
 - Pengelola katalog program dan kriteria penerima manfaat.
- f. Melakukan rujukan keluhan yang bersifat kepersetaan dan program kepada pengelola program terkait, baik pusat maupun daerah dalam kapasitasnya sebagai manajer sekretariat teknis daerah.

2. Asisten Manajer.

Asisten Manajer adalah Kepala Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas Dinas Sosial Kabupaten Siak, mempunyai tugas membantu tugas-tugas manajer atas arahan manajer, baik secara teknis maupun administrasi.

3. Kepala Seksi Pelayanan Sosial dan Rujukan.

Kepala Seksi Pelayanan Sosial dan Rujukan adalah Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia Dinas Sosial Kabupaten Siak, memiliki tugas dan bertanggungjawab terhadap penanganan keluhan dan rujukan yang dilakukan oleh Petugas *Back Office* terkait dengan pelayanan dan rehabilitasi sosial.

4. Kepala Seksi Data dan Pelaporan.

Kepala Seksi Data dan Pelaporan adalah Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga Dinas Sosial Kabupaten Siak, mempunyai tugas dan bertanggungjawab mengumpulkan dan mengolah data yang terhimpun dari Petugas *Front Office*.

5. Kepala Seksi Pendidikan.

Kepala Seksi Pendidikan adalah Kepala Seksi Pesdik dan Pembinaan Karakter Peserta Didik SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak, memiliki tugas dan bertanggungjawab menerima rujukan dari Petugas *Back Office* atas persetujuan manajer terkait dengan pelayanan pendidikan.

6. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan.

Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan adalah Anggota/Staf Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan Dinas Kesehatan Kabupaten Siak, memiliki tugas dan bertanggungjawab menerima rujukan pelayanan kesehatan dari Petugas *Back Office* atas persetujuan manajer.

7. Kepala Seksi Pelayanan Administrasi Kependudukan.

Kepala Seksi Pelayanan Administrasi Kependudukan adalah administrator *database* yang memiliki tugas dan bertanggungjawab menerima rujukan dari Petugas *Back Office* atas persetujuan manajer terkait dengan pelayanan administrasi kependudukan.

8. Petugas *Front Office*.

Petugas *Front Office* berjumlah 2 (dua) orang dan berkedudukan di Sekretariat SLRT Kabupaten, dengan tugas utama *Front Office* adalah:

- a. Menerima keluhan warga terkait layanan sosial di daerah dan melakukan registrasi terkait laporan yang diterima.
- b. Memberikan informasi terkait layanan yang tersedia di SLRT serta menyampaikan mekanisme penanganan keluhan.
- c. Memberikan informasi tentang program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan baik yang berasal dari Pusat (Program

Nasional), Provinsi dan Kabupaten/Kota serta layanan dan program yang di kelola oleh pihak non pemerintah.

d. Memeriksa apakah warga yang melapor ada atau tidak dalam daftar penerima manfaat SLRT.

9. Petugas *Back Office*.

Petugas *Back Office* berjumlah 3 (tiga) orang dan berkedudukan di Sekretariat SLRT Kabupaten, yang terdiri dari Petugas *Back Office* Pelayanan Sosial, Pelayanan Kesehatan dan Rujukan, Petugas *Back Office* Pelayanan Pendidikan dan Petugas *Back Office* Pelayanan Administrasi Kependudukan, dengan tugas utama adalah sebagai berikut:

- a. Menerima keluhan warga yang telah diperiksa oleh bagian Front Office.
- b. Memberikan jawaban/kepastian atas aduan yang diterima
- c. Melakukan penanganan keluhan warga yang dapat di tangani di Sekretariat SLRT.
- d. Atas persetujuan manajer, melakukan rujukan keluhan warga yang tidak dapat ditangani di Sekretariat SLRT kepada pengelola program penanggulangan kemiskinan dan program terkait lainnya baik program-program Pemerintah Kabupaten Siak, Pemerintah Provinsi Riau, maupun melalui Kementrian/Lembaga, serta program yang dikelola oleh pihak non pemerintah.

10. Petugas Administrasi Sekretariat SLRT.

Petugas Administrasi Sekretariat SLRT berjumlah 2 (dua) orang dan berkedudukan di Sekretariat SLRT Kabupaten yang bertugas mengendalikan

username dan password aplikasi SLRT tiap-tiap Kecamatan dan Kampung/Kelurahan, serta melaksanakan penataan pengadministrasian dan pengarsipan pelaksanaan SLRT.

11. Supervisor.

Supervisor adalah pelaksana SLRT di Tingkat Kecamatan yang berkedudukan di tiap-tiap Kecamatan dengan peran dan tugas mengawasi dan membantu fasilitator di tingkat masyarakat dalam lingkup Kecamatan. Secara khusus, supervisor bertanggungjawab untuk:

- a. Menelaah/Review pembaharuan data penerima manfaat program penanggulangan kemiskinan dan PMKS lainnya.
- b. Review penambahan data penerima manfaat program penanggulangan kemiskinan dan PMKS lainnya.
- c. Review pendataan keluhan dan kebutuhan program.
- d. Memfasilitasi pelaksanaan musyawarah kampung/kelurahan di dalam kecamatan.

12. Fasilitator.

Fasilitator SLRT adalah pelaksana SLRT di tingkat kampung atau kelurahan yang berkedudukan di tiap-tiap kampung atau kelurahan dengan peran dan tugas melakukan penjangkauan dan pendampingan terhadap masyarakat dalam lingkup kampung atau kelurahan. Secara khusus fasilitator bertanggung jawab untuk melakukan :

- a. Pencarian data penduduk.
- b. Verifikasi dan pencatatan perubahan data penduduk.

- c. Pendataan data partisipasi program penanggulangan kemiskinan dan PMKS lainnya.
- d. Pendataan keluhan dan kebutuhan program penanggulangan kemiskinan dan PMKS lainnya.
- e. Verifikasi kebutuhan program penanggulangan kemiskinan melalui Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
- f. Memfasilitasi pelaksanaan musyawarah kampung/kelurahan di wilayah kerja masing-masing.

Berpedoman kepada Peraturan Bupati Siak Nomor 92 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Siak, Pelaksanaan Program SLRT ini di kelola oleh Dinas Sosial Kabupaten Siak Sri Indrapura.

Sesuai dengan visi dan misi, tugas pokok dan fungsi dari Dinas Sosial Kabupaten siak Sri Indrapura, maka dapat terpilih sebagai Kabupaten yang menerima Program Bantuan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu. Berikut penjelasan dari visi dan misi, tugas pokok dan Fungsi Dinas Sosial :

Visi Dinas Sosial : Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat dan Tenaga Kerja yang Terampil dan Profesional Menuju Masyarakat Siak yang Sejahtera.

Misi Dinas Sosial :

1. Meningkatkan aksesibilitas pelayanan sosial, mencegah dan menangani masalah sosial, meningkatkan kualitas pelayanan sosial serta memfasilitasi pembentukan sumber daya tenaga kesejahteraan sosial.

2. Meningkatkan kualitas tenaga kerja dan menciptakan lapangan kerja baru bagi pencari kerja/penganggur serta menjembatani pencari kerja dengan pihak perusahaan dalam pemagangan dan penempatan tenaga kerja yang diprioritaskan kepada tenaga kerja tempatan/lokal.
3. Meningkatkan kesejahteraan pekerja yang meliputi pengupahan, keselamatan dan kesehatan kerja, kebebasan berserikat, pemantapan hubungan industrial, perlindungan terhadap pekerja dan jamsostek.
4. Meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan diperusahaan.
5. Pengembangan wilayah transmigrasi lokal.

Tugas Pokok Dinas Sosial : Melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang social, tenaga kerja dan transmigrasi.

Fungsi Dinas Sosial:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pembantuan di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.
2. Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.
3. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.
4. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas.
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pada Dinas Sosial, Program SLRT ini digunakan sebagai pengeluaran surat rekomendasi yang dipergunakan untuk memastikan bahwa warga atau masyarakat tersebut benar-benar termasuk di dalam kriteria kelompok sasaran, termasuk dalam kategori tidak mampu. Surat rekomendasi ini adalah SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu), untuk selanjutnya disebut SKTM saja. SKTM ini merupakan hal utama dalam proses pengurusan KIS (Kartu Indonesia Sehat). Kartu Indonesia Sehat ini berguna untuk proses pengobatan di Rumah Sakit Umum Daerah tiap Kabupaten. Dengan adanya Program Kartu Indonesia Sehat, dapat mengurangi beban masyarakat yang memiliki kesulitan ekonomi dalam mendapatkan Layanan Kesehatan.

Menurut Meter dan Van Horn (dalam Leo Agustino 2006;139) Implementasi didefinisikan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan kepada terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Di Kabupaten Siak, pada tiap kecamatannya terdapat masyarakat yang memiliki ekonomi menengah kebawah, yang berhak menerima Program SLRT ini jika telah memenuhi Kriteria yang telah ditetapkan. Peran Dinas Sosial sangat berpengaruh dalam menerima dan mengolah data masyarakat yang berhak menerima bantuan dari Program SLRT ini. Berikut ini tabel jumlah masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Siak Sri Indrapura pada tahun 2018.

Tabel I.1 : Data Masyarakat Kurang Mampu Kabupaten Siak Sri Indrapura Tahun 2018

No	KECAMATAN	RTM	KK	JIWA
1	BUNGA RAYA	1.806	1.904	6.563
2	DAYUN	1.318	1.364	5.116
3	KANDIS	3.233	3.278	13.133
4	KERINCI KANAN	1.420	1.459	5.436
5	KOTO GASIB	1.726	1.792	6.622
6	LUBUK DALAM	1.291	1.330	4.938
7	MEMPURA	1.006	1.037	3.617
8	MINAS	2.064	2.101	8.310
9	PUSAKO	664	723	2.724
10	SABAK BUIH	993	1.060	3.983
11	SIAK	1.327	1.396	5.071
12	SUNGAI APIT	3.868	4.209	15.358
13	SUNGAI MANDAU	535	543	1.802
14	TUALANG	4.416	4.570	19.595
	JIWA	25.667	26.766	102.268

Sumber Data : Dinas Sosial Kabupaten Siak Sri Indrapura, 2018.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat 25.667 jiwa masyarakat yang dikategorikan miskin di Kabupaten Siak Sri Indrapura, masih banyak yang harus mendapatkan layanan kesejahteraan sosial seperti bantuan pada bidang pendidikan, bidang layanan kesehatan, bantuan raskin, masyarakat miskin membutuhkan perhatian pemerintah untuk dapat melanjutkan kehidupannya yang layak. Kemudian dibawah ini data jumlah masyarakat miskin yang sudah melakukan pengurusan SKTM di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Siak Sri Indrapura pada tahun 2018 :

Tabel I.2 : Jumlah masyarakat pengurus SKTM Kabupaten Siak Sri Indrapura tahun 2018

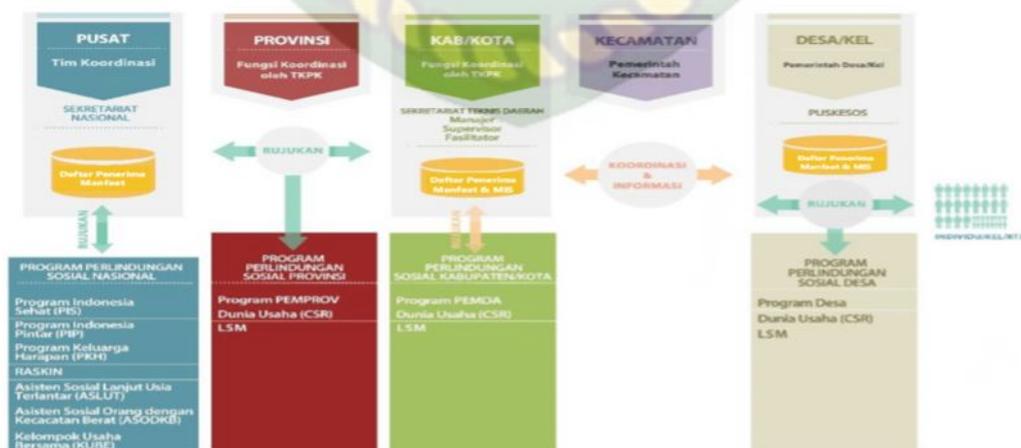
NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH PENERIMA
1.	Minas	85 Orang
2.	Koto Gasib	64 Orang
3.	Bunga Raya	198 Orang
4.	Siak	310 Orang
5.	Sabak Auh	37 Orang
6.	Sungai Mandau	70 Orang

7.	Pusako	41 Orang
8.	Tualang	375 Orang
9.	Kandis	147 Orang
10.	Mempura	157 Orang
11.	Sungai Apit	236 Orang
12.	Dayun	58 Orang
13.	Lubuk Dalam	55 Orang
14.	Kerinci Kanan	24 Orang
TOTAL		1.857 Orang

Sumber Data : Kantor Dinas Sosial Kabupaten Siak Sri Indrapura, 2018.

Menurut hasil survey penulis, bagian Front Office Dinas Sosial Kabupaten Siak Sri Indrapura mengatakan bahwa Kabupaten Siak Sri Indrapura sendiri mendapatkan kuota pengurusan SKTM yang bertujuan untuk mendapat layanan kesehatan sebanyak 3000 tiap tahunnya. Namun pada tahun 2018, pengurusan SKTM untuk Mendapat Layanan Kesehatan hanya terdaftar sebanyak 1.857 orang. Jika dilakukan sosialisasi secara efektif oleh tim pelaksana SLRT seharusnya kuota pada tiap tahunnya dapat terpenuhi.

Mekanisme Tata Laksana dari proses Program SLRT dapat dilihat pada gambar I.1 berikut ini :



Gambar I.1 : Tata Laksana Program SLRT

Sumber Data : Pedoman Umum Pelaksanaan SLRT 2016

Dalam pedoman Umum Pelaksanaan SLRT 2016 dijelaskan mekanisme tata laksana Program SLRT ini bahwa masyarakat yang bersangkutan harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan kemudian mengurus surat tersebut ke RT yang kemudian mengeluarkan surat rekomendasi kepada Desa ataupun kelurahan, kemudian di setujui oleh fasilitator yang bertugas pada tiap kecamatan dan ditujukan kepada Dinas Sosial apakah surat rekomendasi tersebut layak atau tidak untuk menerima SKTM, jika sudah di verifikasi oleh Dinas Sosial maka SKTM layak untuk diterbitkan. Kemudian pegawai Dinas Sosial memverifikasi data tersebut secara online kepada Kementerian Sosial sehingga benar-benar terdaftar sebagai warga atau masyarakat yang layak mendapatkan SKTM karena telah memenuhi seluruh kriteria yang ditetapkan.

Berikut ini adalah kriteria penerima dari SKTM pada program SLRT yang telah ditetapkan sesuai dengan pedoman umum pelaksanaan SLRT tahun 2016 :

1. Warga miskin dan rentan miskin yang terdapat atau tidak terdapat dalam Basis Data Terpadu yang dihasilkan melalui PBDT 2015 atau yang ada dalam basis data Siskadasatu, termasuk masyarakat penyandang disabilitas, perempuan atau anak terlantar, lanjut usia, masyarakat adat terpencil, dll.
2. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
3. Warga lainnya yang memerlukan pelayanan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.

Sementara itu, yang dimaksudkan kategori miskin menurut Badan Pusat Statistik terdapat 14 kategori, yaitu :

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m² per orang.
2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan.
3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/ rumbia/ kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga lain.
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
6. Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindung/ sungai/ air hujan.
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak tanah.
8. Hanya mengonsumsi daging/ susu/ ayam dalam satu kali seminggu.
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/ dua kali dalam sehari.
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/ poliklinik.
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan.
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/ tidak tamat SD/ tamat SD.
14. Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit/ non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Kemudian Dinas Sosial berperan dalam proses verifikasi data yang telah di ajukan masyarakat, hal ini bertujuan untuk mengelompokkan data yang berhak menerima program SLRT, sehingga tidak terjadinya kesalahan penerima bantuan. Seperti yang sudah dijelaskan pada kriteria penerima SKTM bahwa yang berhak menerima bantuan adalah masyarakat ekonomi menengah kebawah dan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Dalam proses pelaksanaan penerbitan SKTM pada Dinas Sosial ini diberikan waktu minimal 1 X 24 Jam dan maksimal 3 X 24 Jam. Jika belum mendapat pemberitahuan dari Dinas dalam kurun waktu 3 X 24 jam maka masyarakat dapat mencari tahu informasi mengapa SKTM belum dapat terbit, apakah terdapat kesalahan pada saat pengurusan, terdapat kesalahan identitas masyarakat atau masyarakat tersebut sebelumnya sudah pernah terdaftar namun mengulang untuk proses pembuatan baru.

Untuk mengurangi terjadinya kesalahan dalam penerima bantuan sosial, Dinas Sosial Kabupaten Siak Sri Indrapura menerapkan saat pengambilan penerbitan SKTM, masyarakat harus mengisi buku tamu dan melampirkan kembali keterangan kegunaan maksud dan tujuan melakukan pengurusan SKTM, dan dengan ketentuan jika pengambilan penerbitan SKTM dapat diwakilkan apabila pengurus terkena penyakit berbahaya dan harus segera ditangani, akan melahirkan, dan pengurusan untuk proses operasi, jika Pengurusan SKTM untuk layanan kesehatan biasa (berobat jalan) dan layanan pendidikan harus diambil oleh yang berkepentingan tersebut.

Dengan diadakannya Program SLRT ini, Pemerintah Kabupaten Siak bermaksud untuk mengurangi angka kemiskinan, juga untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Sehingga masyarakat dapat hidup sehat tanpa harus mengeluarkan biaya dikarenakan rendahnya ekonomi masyarakat .

Adapun Fenomena yang ditemukan saat pelaksanaan Program Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) ini antara lain :

1. Kurang maksimalnya peranan fasilitator terhadap penerapan program SLRT di kampung atau kelurahan, sehingga masih banyak masyarakat tidak mengetahui kegunaan SLRT dan tidak mendaftarkan dirinya padahal masyarakat tersebut termasuk ke dalam kriteria layak dan berhak mendapatkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Dinas Sosial.
2. Program sistem layanan dan rujukan terpadu (SLRT) ini dinilai kurang tepat sasaran terhadap penerima bantuannya, penerima yang memiliki ekonomi menengah ke atas yang mendapatkan program SLRT (pengurusan SKTM), padahal Program SLRT ini ditujukan untuk masyarakat ekonomi menengah kebawah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah dikemukakan diatas, maka penulis tertarik membuat judul penelitian dengan judul: **Efektifitas Pelaksanaan Program Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu (SLRT) di Kabupaten Siak Sri Indrapura.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Efektifitas Pelaksanaan Program Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu (SLRT) di Kabupaten Siak Sri Indrapura?
2. Apa saja faktor penghambat dalam Efektifitas Pelaksanaan Program Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu (SLRT) di Kabupaten Siak Sri Indrapura?

Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan kepada pelaksanaan pengurusan penerbitan SKTM pada Dinas Sosial Kabupaten Siak Sri Indrapura.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Efektifitas Pelaksanaan Program Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu (SLRT) di Kabupaten Siak Sri Indrapura.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat Efektifitas Pelaksanaan Program Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu (SLRT) di Kabupaten Siak Sri Indrapura.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini merupakan suatu bahan pengembangan khasanah ilmu pengetahuan di bidang ilmu Administrasi Negara, khususnya tentang Efektifitas Pelaksanaan Program Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) di Kabupaten Siak Sri Indrapura.
- b. Secara Praktis, penelitian ini dapat memberikan informasi tentang Efektifitas Pelaksanaan Program Bantuan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) di Kabupaten Siak Sri Indrapura.

- c. Secara akademis, penelitian ini sebagai referensi bagi pihak lain yang ingin melakukan penelitian dengan permasalahan yang sama.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

Untuk memperjelas konsep pada penelitian ini, maka penulis mengutip beberapa pendapat para ahli dan teori yang sesuai dengan tujuan penelitian ini. Hal ini dimaksud untuk memudahkan penelitian untuk memecahkan permasalahan dan akan menjadi landasan dalam penelitian. Teori-teori yang digunakan merupakan rangkaian yang akan dihubungkan pada permasalahan.

1. Konsep Administrasi

Istilah administrasi berhubungan erat dengan kegiatan kerjasama yang dilakukan manusia atau sekelompok orang dalam menjalankan kegiatan dan rutinitas kehidupan sehari-hari. Kegiatan administrasi yang teratur dan sistematis akan melahirkan keadaan organisasi yang sehat dan dinamis.

Secara etimologis, sebagaimana yang dikemukakan oleh Syafri (2012:3) bahwa administrasi berasal dari bahasa latin *ad* dan *ministrare*, yang berarti “membantu, melayani, atau memenuhi”, serta *administration* yang berarti “pemberian bantuan, pemeliharaan, pelaksanaan, pimpinan dan pemerintahan, pengelolaan”.

Administrasi menurut adams (dalam syafri,2012;8) adalah kemampuan mengkoordinasikan berbagai kekuatan sosial yang sering kali bertentangan satu dengan yang lain didalam suatu organisme sedemikian padunya sehingga kekuatan-kekuatan tersebut dapat bergerak sebagai satu kesatuan.

Dari batasan diatas diketemukan ide pokok sebagai berikut :

- 1) Administrasi adalah kemampuan untuk memadukan kekuatan-kekuatan sosial didalam satu organisasi.
- 2) Kekuatan itu di padukan dengan maksud agar setiap kekuatan yang ada bergerak sebagai satu kesatuan/keseluruhan organisme.

Adapun menurut Siagian Administrasi didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atau rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah di tentukan sebelumnya (dalam Syafri, 2012;9)

Pfiffner dan Robert V. Presthure (dalam Syafri, 2012;7) memulai dengan menyatakan bahwa administrasi adalah suatu proses umum yang menandai (merupakan karakteristik) semua usaha bersama.

Administrasi berdasarkan definisi ahli diatas dapat diartikan sebagai proses atau rangkaian usaha yang dilakukan bersama dan saling berkaitan antara satu dan yang lain yang penyelenggaraannya membutuhkan wadah agar dapat mencapai tujuan yaitu organisasi. Penulis mengartikan administrasi sebagai suatu konsep yang belum terealisasi dan akan terwujud dengan menggunakan organisasi, pernyataan tersebut juga didukung oleh beberapa pendapat berikut.

Syafri (2012;11) batasan Administrasi ialah rangkaian kegiatan (proses) usaha kerja sama sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien. Karena kerjasama tersebut harus ada wadahnya, yaitu organisasi, batasan lengkap tentang administrasi adalah rangkaian kegiatan (proses) usaha kerja sama sekelompok orang dalam wadah organisasi untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien.

White (dalam Syafri, 2012;9) menjelaskan administrasi ialah proses yang selalu terdapat pada setiap usaha pada setiap kelompok, publik atau privat, sipil atau militer, skala besar atau skala kecil.

Pendapat ini juga menunjuk dua hal, yakni sebagai berikut :

- 1) Administrasi adalah proses (rangkaian kegiatan)
- 2) Proses itu terdapat pada setiap usaha kelompok.

Menurut Atmosudirdjo (dalam Zulkifli 2009;9) administrasi sebagai fungsi atau kegiatan (activity) adalah seperangkat kegiatan-kegiatan yang tertentu dan terarah yang berlangsung untuk memimpin serta mengendalikan suatu organisasi modern yang menjadi wahana suatu urusan atau usaha dan sekaligus apa yang berlangsung didalamnya.

Administrasi adalah serangkaian kegiatan ketatausahaan atau kesekretariatan berupa surat-menyurat dan pengelolaan data atau keterangan tertulis lainnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang didasarkan oleh rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (zulkifli, 2005;16)

Menurut Waldo (dalam Syafri, 2012;10) Administrasi sebagai menyebut "*coorporative rational action*" (usaha kerjasama yang rasional). *Rational action* adalah "*action correctly calculated to realize given desired goals with minimum loss the realition of other desired goal*" tindakan yang diperhitungkan dengan kerugian/pengorbanan yang minimal untuk mewujudkan tujuan lain yang dikehendaki.

Begitu sempitnya penafsiran tentang administrasi pada zaman dahulu. Namun seiring berjalannya waktu, ilmu ini terus berkembang dan memiliki banyak penafsiran dikalangan para ahli. Sebagaimana dikemukakan oleh Siagian (dalam syafri 2012:9), Administrasi didefinisikan sebagai kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Dalam arti sempit, administrasi dapat dicermati dari definisi berikut: Administrasi adalah rangkaian pekerjaan ketatausahaan atau kesekretariatan yang terkait dengan surat-menyurat (koresponden) dan pengelolaan keterangan tertulis lainnya.

Menurut Dimock & Dimock (dalam Pasolong, 2017:3) Administrasi merupakan suatu ilmu yang mempelajari apa yang dikehendaki rakyat melalui

pemerintah, dan cara mereka memperolehnya. Administrasi juga mementingkan aspek-aspek konkrit dari metode-metode dan prosedur-prosedur manajemen.

Oleh karena administrasi merupakan kegiatan yang mutlak ada dalam setiap organisasi, maka dalam pencapaian tujuannya haruslah terdapat unsur-unsur yang mengiringi. Setiap unsur tersebut membentuk suatu persatuan yang disebut dengan sistem.

Adapun dimensi unsur-unsur administrasi menurut Pasolong (2017:5) ada tiga yaitu:

1. Adanya tujuan atau sasaran yang ditentukan sebelum melaksanakan suatu pekerjaan
2. Adanya kerjasama baik sekelompok orang atau lembaga pemerintah maupun swasta
3. Adanya sarana yang digunakan oleh sekelompok atau lembaga dalam melaksanakan tujuan yang hendak dicapai.

Sementara itu, menurut The liang gie (dalam Zulkifli, 2009:16) Administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bekerja sama mencapai tujuan tertentu.

Atmosudirjo (dalam Zulkifli, 2009:11) juga menjelaskan bahwa kerjasama manusia dalam mencapai tujuan, sebagai objek studi ilmu administrasi terdapat sepuluh dimensi penting yang perlu dipahami dalam konsep administrasi yaitu:

- a. Administrasi merupakan suatu fenomena sosial, suatu perwujudan tertentu dalam masyarakat modren. Eksistensi dari pada administrasi berkaitan dengan organisasi, artinya administrasi terdapat didalam organisasi.
- b. Administrasi merupakan suatu hayat atau kekuatan yang memberikan hidup atau gerak kepada suatu organisasi. Tanpa administrasi yang sehat maka organisasi tidak akan sehat pula. Pembangkit administrasi sebagai suatu kekuatan atau energi atau hayat adalah 'administrator' yang harus pandai mengerakkan seluruh sistemnya yang terdiri atas manajer, staffer, dan personilnya.

- c. Administrasi merupakan suatu fungsi yang tertentu untuk mengendalikan, menggerakkan, mengembangkan, dan mengarahkan suatu organisasi yang dijalankan oleh administrator dibantu oleh bawahannya, terutama para manajer dan staffer.
- d. Administrasi merupakan suatu kelompok orang-orang yang secara bersama-sama merupakan 'badan pimpinan' dari pada suatu organisasi.
- e. Adminitrasi merupakan suatu seni (*art*) yang merupakan bakat, ilmu pengetahuan dan pengalaman.
- f. Adminitrasi merupakan suatu proses penyelenggaraan bersama atau proses kerjasama antara sekelompok orang-orang tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah ditentukan dan direncanakan sebelumnya. Kerjasama orang-orang tersebut berlangsung secara dan melalui organisasi.
- g. Adminitrasi merupakan suatu jenis tingkah laku atau sikap kelakuan sosial yang tertentu (*administrative behaviour or administration as special type of social behaviour*) yang memerlukan sikap dan mental tertentu serta merupakan suatu type tingkah laku manusia tertentu (*special type of behaviour*).
- h. Administrasi merupakan suatuteknik atau praktek yang tertentu, suatu tatacara yang merupakan kemampuan atau mengerjakan sesuatu yang memerlukan kemampuan atau mengerjakan kemampuan, kemahiran, keterampilan, yang hanya diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan.
- i. Adminitrasi merupakan suatu sistem yang tertentu, yang merupakan input, transpormasi, pengelolaan dan output tertentu.
- j. Administrasi merupakan suatu menejemen tertentu yang merupakan 'overall management' dari suatu organisasi. Pada hakekatnya manajemen merupakan pengendalian dari sumberdaya-sumberdaya menuju tercapainya suatu prapta (*objective*) tertentu. Sumberdaya-sumberdaya (*resources*) dimaksud meliputi : orang-orang (*man*), uang (*money*), mesin-mesin (*machines*), bahan atau peralatan (*material*), tenaga atau energi (*energy*), dan waktu (*time*). Dalam istilah administrasi tecangkup adanya pesan, tugas dan tanggung jawab, dan kepercayaan yang diberikan oleh para pemilik organisasi.

Alternatif prinsip-prinsip umum administrasi yang dijumpai dalam referensi ilmu administrasi, Fayol (dalam Zulkifli, 2005:71) mengemukakan terdapat 14 prinsip umum administrasi yaitu:

- a. Pembagian kerja
- b. Pendelegasian dan wewenang
- c. Disiplin
- d. Kesatuan perintah
- e. Kesatuan arah dan tujuan

- f. Mendahulukan atau mengutamakan atau menempatkan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi
- g. Pengupahan atau penggajian
- h. Sentralisasi
- i. Skala hierarki
- j. Tata tertib
- k. Keadilan
- l. Stabilitas jabatan
- m. Prakarsa atau inisiatif
- n. Solidaritas sekelompok kerja

Selain dari prinsip-prinsip umum administrasi perlu kita pahami bahwasanya terdapat unsur-unsur adminisrasi. Menurut Syafri (2012:12) unsur-unsur administrasi itu memiliki 8 bagian yaitu:

- a. Organisasi
- b. Manajemen
- c. Komunikasi
- d. Kepegawaian
- e. Keuangan
- f. Perbekalan
- g. Tata usaha
- h. Hubungan masyarakat

Dari uraian mengenai administrasi diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan administrasi merupakan kegiatan/proses yang sistematis dimana kegiatan tersebut melibatkan beberapa unsur penting guna mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Administrasi menentukan kemana arah dan tujuan organisasi. Administrasi sangat penting didalam menentukan dan mengatur kegiatan organisasi. Kegiatan organisasi yang baik dan terstruktur akan mewujudkan organisasi yang sehat dan dinamis. Begitu juga dengan Negara sebagai organisasi publik yang begitu besar.

Pelaksanaan administrasi yang baik akan menentukan keberhasilan suatu Negara. untuk menjalankan dan menentukan kualitas administrasi yang dijalankan

oleh negara tergantung kepada sumber daya manusia yang dimilikinya. Kumpulan sumber daya tersebut membentuk suatu kesatuan yang dinamakan sebagai organisasi.

2. Konsep Administrasi Publik

Sebagaimana dikemukakan Siagian (2008;2) administrasi didefinisikan sebagai kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Sedangkan administrasi publik menurut Chandler dan Plano (dalam Keban, 2014 ; 3) adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplentasikan, dan mengelola (*Manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik.

Kemudian menurut McCurdy (dalam Keban, 2014 ; 3) bahwa administrasi publik dapat dilihat sebagai suatu proses politik, yaitu sebagai salah satu metode memerintah suatu negara dan dapat juga dianggap sebagai cara yang prinsipil untuk melakukan berbagai fungsi negara, dengan kata lain administrasi publik bukan hanya sekedar persoalan manajerial tetapi juga persoalan politik.

Kedua pengarang tersebut telah menjelaskan bahwa administrasi publik merupakan seni dan ilmu (*Art and Science*) yang ditujukan untuk mengatur *Public Affairs* dan melaksanakan berbagai tugas yang telah ditetapkan. Dan sebagai suatu disiplin ilmu, administrasi publik bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah publik melalui perbaikan atau penyempurnaan terutama di bidang organisasi, sumber daya manusia dan keuangan.

Alternatif pendekatan yang harus diimplementasikan oleh seorang administrator untuk mencapai tujuan tersebut, salah satunya pendekatan yang ditawarkan dalam konteks ini adalah dengan berpegangan pada prinsip yang diyakini benar manakala dijadikan pegangan dan acuan sangat mendukung terhadap upaya pencapaian suatu hasil yang diharapkan.

Harus diakui bahwa ruang lingkup atau cakupan administrasi publik sangat kompleks tergantung dari perkembangan kebutuhan atau dinamika masalah yang dihadapi masyarakat, menurut Nicholas Henry (dalam Keban, 2014 ; 8) memberikan beberapa ruang lingkup yang dapat dilihat dari unsur-unsur (selain perkembangan ilmu administrasi publik itu sendiri) berikut :

1. Organisasi publik, yang ada pada prinsipnya berkenaan dengan model-model organisasi, dan perilaku birokrasi.
2. Manajemen publik yaitu berkenaan dengan system ilmu manajemen, evaluasi program dan produktivitas, anggaran publik, dan manajemen sumber daya manusia.
3. Implementasi yaitu menyangkut pendekatan terhadap kebijakan publik dan implementasinya, privatisasi, administrasi antar pemerintahan dan etika birokrasi.

Menurut James L. Perry (dalam Keban, 2014 : 9) menguraikan unsur-unsur pokok sebagai berikut :

1. Tantangan-tantangan administrasi publik dan bagaimana administrasi publik seharusnya menyesuaikan diri.
2. System administrasi dan organisasi yang efektif.
3. Usaha memperkuat hubungan dengan badan legislative, badan-badan yang diangkat atau dipilih dan dengan masyarakat.
4. Bagaimana menyusun kebijakan dan program-program secara sukses.
5. Administrasi perpajakan dan anggaran yang efektif.
6. Bagaimana memperbaiki operasi dan pelayanan publik, dan
7. Bagaimana praktek administrasi publik yang profesional dan etis.

Dengan memperhatikan begitu banyak unsur yang dipandang penting dalam literature maka administrasi publik harus dilihat setidaknya-tidaknya dari enam dimensi strategis (Keban, 2014 : 10-11)

1. Dimensi Kebijakan
2. Dimensi Struktur Organisasi
3. Dimensi Manajemen
4. Dimensi Etika
5. Dimensi Lingkungan
6. Dimensi Akuntabilitas

3. Konsep Organisasi

Organisasi merupakan alat untuk merealisasikan konsep yang telah difikirkan pada proses administrasi. Organisasi merupakan hal penting karena pada organisasi orang bisa bekerja sama yang dapat dijadikan alat mengumpulkan orang-orang dengan tujuan yang sama. Peneliti mengibaratkan Administrasi tanpa organisasi bagai air tanpa wadah tidak akan sampai kepada yang membutuhkan. Kegiatan administrasi mengarahkan pencapaian tujuan organisasi yang efektif dan efisien, dan organisasi merupakan sarana untuk mencapai tujuan.

Siagian (dalam Zulkifli 2009:71) mendefinisikan organisasi sebagai setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama dan secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan mana terdapat seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seorang/sekelompok orang yang disebut bawahan.

Sebagai suatu proses, organisasi berarti serangkaian aktivitas kolektif sekelompok orang yang diawali dengan penentuan tujuan, pembagian kerja dengan perincian tugas tertentu, pendelegasian wewenang, pengawasan dan diakhiri dengan pengevaluasian pelaksana tugas (Zulkifli 2009:71)

Menurut E. Wight Bakke (dalam Kusdi, 2009:5) Organisasi adalah suatu sistem berkelanjutan dari aktivitas-aktivitas manusia yang terdiversifikasi dan terkoordinasi, yang mempergunakan, mentransformasi, dan menyatupadukan seperangkat khusus manusia, material, modal, gagasan, dan sumberdaya alam menjadi satu kesatuan pemecahan masalah yang unik dalam rangka memuaskan kebutuhan-kebutuhan manusia dalam interaksinya dengan sistem-sistem lainnya dari aktivitas manusia dan sumberdaya dalam lingkungannya.

Jadi, organisasi merupakan persekutuan 2 orang atau lebih yang terikat dalam rangka mencapai tujuan bersama menjalankan serangkaian aktivitas dimana dalam mencapai tujuan tersebut terdapat pembagian kerja dan sumber daya organisasi. Organisasi sebagai wadah dan rangkaian hierarki tentunya harus memiliki prinsip-prinsip yang mampu mewujudkan tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Menurut Hasibuan (2014;120) organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur, dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerjasama dalam mencapai tujuan tertentu. Organisasi hanya merupakan alat dan wadah saja.

Menurut Mooney (dalam Hasibuan, 2014;120) organisasi adalah setiap bentuk perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama.

Menurut Barnard (dalam Hasibuan, 2014;120) Organisasi adalah suatu sistem kerja sama yang terkoordinasi secara sadar dan dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Menurut Siagian (2008:97), terdapat dua belas prinsip organisasi yang dapat dijadikan pedoman sehingga organisasi menjadi tumbuh dan berkembang.

Adapun prinsip-prinsip itu ialah:

- a. Terdapat tujuan yang jelas
- b. Tujuan organisasi harus dipahami oleh setiap orang didalam organisasi
- c. Tujuan organisasi harus diterima oleh setiap orang dalam organisasi
- d. Adanya kesatuan arah (*unity of direction*)
- e. Adanya kesatuan perintah (*unity of command*)
- f. Adanya keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab seseorang)
- g. Adanya pembagian tugas
- h. Struktur organisasi harus disusun sesederhana mungkin
- i. Pola dasar organisasi harus relatif
- j. Adanya jaminan jabatan
- k. Imbalan yang diberikan pada setiap orang harus setimpal dengan jasa yang diberikan.

Selain prinsip organisasi juga memiliki beberapa bentuk, dikarenakan organisasi adalah sesuatu yang dinamis, yang menyesuaikan kedinamisannya dengan kedinamisan masyarakat dan lingkungan disekitarnya. Adapun bentuk organisasi menurut Siagian (2008;100) yaitu :

- a. Organisasi Lini
- b. Organisasi Lini dan Staf
- c. Organisasi Fungsional
- d. Organisasi Type Panitia
- e. Organisasi Matriks.

Dari beberapa definisi dan penjelasan yang telah disampaikan oleh beberapa ahli tersebut, maka hal itu dapat membuktikan bahwa dewasa ini masyarakat dimanapun berada tidak lepas dari praktik-praktik organisasi dalam kehidupannya. Dilingkungan masyarakat, baik itu organisasi formal maupun informal selalau ada seseorang yang dianggap lebih dari yang lain yang merupakan bentuk organisasi secara hierarki. Organisasi yang baik adalah organisasi yang secara bersama-sama mampu mewujudkan tujuan bersama dan menerapkan prinsip dasar secara seimbang dalam kehidupannya.

4. Konsep Manajemen

Dalam suatu organisasi diperlukan manajemen untuk mengatur proses penyelenggaraan organisasi hingga tercapainya tujuan dari organisasi tersebut. Pada instansi pemerintah khususnya menyangkut soal pelayanan publik, diperlukan manajemen yang efektif dan efisien dalam proses penyelenggaraan pelayanan agar tercapainya tujuan dari pelayanan itu sendiri yakni kepuasan masyarakat.

Istilah manajemen (*management*) telah diartikan oleh berbagai pihak dengan prespektif yang berbeda. Manajemen pada hakekatnya berfungsi untuk melakukan semua kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dalam batas-batas kebijaksanaan umum yang telah ditentukan pada tingkat administrasi.

Pada penelitian ini, peneliti mengutip definisi manajemen menurut beberapa ahli. Donovan dan Jackson (dalam Pasolong,2017:95), mendefinisikan manajemen sebagai proses yang dilaksanakan pada tingkat organisasi tertentu, sebagai rangkaian keterampilan (*Skills*), dan sebagai serangkaian tugas. Dengan menggunakan pendapat Boyatiz dalam Keban. Ketiga pengarang ini mengemukakan empat klaster kompetensi yang ada didalam manajemen yaitu:

1. Klaster manajemen tujuan dan aksi yang terdiri atas orientasi efisiensi, tindakan proaktif, kepedulian terhadap dampak, dan penggunaan diagnostik terhadap konsep-konsep
2. Klaster pengarahan terhadap bawahan yaitu penggunaan kekuasaan unilateral, pengembangan yang lain dan spontanitas
3. Klaster manajemen sumber daya manusia yaitu penggunaan dalam melakukan sosialisasi, mengelola kelompok, persepsi positif, subjektifitas persepsi, penilaian diri yang akurat, pengendalian diri, stamina dan kemampuan menyesuaikan diri
4. Klaster kepemimpinan yaitu mengembangkan percaya diri, konseptualisasi, pemikiran yang logis, dan penggunaan presentasi lisan.

Fungsi-fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang selalu ada dan melekat didalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Namun terdapat perbedaan pandangan mengenai fungsi-fungsi manajemen oleh beberapa ahli.

Menurut George R. Terry (dalam Zulkifli, 2015;5) manajemen merupakan cara pencapaian tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu dengan melalui kegiatan orang lain, kemudian fungsi-fungsi manajemen meliputi

perencanaan (*Planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*), dan pengendalian (*controlling*).

Dari perbandingan beberapa fungsi-fungsi manajemen di atas, dapat dipahami bahwa semua manajemen diawali dengan perencanaan (*Planning*) karena perencanaan yang akan menentukan tindakan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Setelah perencanaan adalah pengorganisasian (*organizing*). Hampir semua ahli menempatkan pengorganisasian diposisi kedua setelah perencanaan. Pengorganisasian merupakan pembagian kerja dan sangat berkaitan erat dengan fungsi perencanaan karena pengorganisasian pun harus direncanakan.

Selanjutnya setelah menerapkan fungsi perencanaan dan pengorganisasian adalah menerapkan fungsi pengarahan yang diartikan dalam kata yang berbeda-beda seperti *actuating*, *leading*, dan *commanding*, tetapi mempunyai tujuan yang sama yaitu mengarahkan semua karyawan agar mau bekerjasama dan bekerja efektif untuk mencapai tujuan organisasi.

Adanya penambahan fungsi pengkoordinasian (*coordinating*) setelah fungsi pengarahan. Fungsi pengkoordinasian untuk mengatur karyawan agar dapat saling bekerjasama sehingga terhindar dari kekacauan, percekcoakan dan kekosongan pekerjaan. Selanjutnya fungsi terakhir dalam proses manajemen adalah pengendalian (*controlling*).

5. Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen Sumber Daya Manusia yang dijelaskan oleh Simamora (dalam Sutrisno, 2014:5) ialah pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa, dan pengelolaan individu anggota organisasi atau kelompok pekerja.

Menurut Dessler (dalam Sutrisno, 2017:5) Manajemen Sumber Daya Manusia dapat didefinisikan sebagai suatu kebijakan dan praktik yang dibutuhkan seseorang yang menjalankan aspek “orang” atau sumber daya manusia dari posisi seorang manajemen, meliputi perekrutan, penyaringan, pelatihan, pengimbalan, dan penilaian.

Sedangkan Umar (dalam Sutrisno, 2017:7), menjelaskan manajemen Sumber Daya Manusia menurut tugasnya dapat dikelompokkan atas tiga fungsi yaitu:

- a. Fungsi Manajerial : Perencanaan, Pengorganisasian, Pengarahan, dan Pengendalian
- b. Fungsi Operasional : Pengadaan, Pengembangan, Kompensasi, Pengintegrasian, Pemeliharaan, dan Pemutusan hubungan kerja
- c. Fungsi ketiga ialah kedudukan manajemen sumber daya manusia dalam mencapai tujuan organisasi perusahaan secara terpadu

Sementara menurut Schuler *et al.* (dalam Sutrisno, 2017:8), setidaknya MSDM memiliki tiga fungsi utama yaitu:

- a. Memperbaiki tingkat produktifitas
- b. Memperbaiki kualitas kehidupan kerja
- c. Meyakinkan organisasi telah memenuhi aspek-aspek legal

Menurut Hasibuan (2017:10) Manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat.

Fungsi manajemen sumber daya manusia yang dikemukakan oleh Hasibuan (2017:21-23) antara lain sebagai berikut :

1. Perencanaan
Perencanaan (*Human Resources planning*) adalah merencanakan tenaga kerja secara efektif serta efisien agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam membantu terwujudnya tujuan
2. Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengorganisasi semua karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, integrasi, dan koordinasi dalam bagian organisasi (*organization chart*)

3. Pengarahan

Pengarahan (*Directing*) adalah kegiatan mengarahkan semua karyawan, agar mau bekerja sama dan bekerja efektif serta efisien dalam membantu tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat.

4. Pengendalian

Pengendalian (*controlling*) adalah kegiatan mengendalikan semua karyawan agar menaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai dengan rencana.

5. Pengadaan

Pengadaan (*procurement*) adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

6. Pengembangan

Pengembangan (*development*) adalah proses peningkatan keterampilan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan.

7. Kompensasi

Kompensasi (*compensation*) adalah pemberian balas jasa langsung (*direct*) dan tidak langsung (*indirect*), uang atau barang kepada karyawan sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada perusahaan.

8. Pengintegrasian

Pengintegrasian (*integration*) adalah kegiatan untuk mempersatukan kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan, agar tercipta kerja sama yang serasi dan saling menguntungkan.

9. Pemeliharaan

Pemeliharaan (*maintenance*) adalah kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan, agar mereka tetap mau bekerja sama sampai pension.

10. Kedisiplinan

Kedisiplinan merupakan fungsi MSDM yang terpenting dan kunci terwujudnya tujuan karena tanpa disiplin yang baik sulit terwujud tujuan yang maksimal.

11. Pemberhentian

Pemberhentian (*separation*) adalah putusnya hubungan kerja seseorang dari perusahaan.

Dalam menjalankan fungsi manajemen, seorang manajer dituntut harus mampu mengarahkan, menempatkan, dan mendayagunakan para bawahan atau anggota dalam organisasi agar kinerja dapat terarah dan sistematis. Sehingga,

setiap kebijakan yang dirumuskan dalam upaya mencapai tujuan bersama dapat terlaksana secara efektif dan efisien.

6. Konsep Efektifitas

Bila dicermati dari sejumlah definisi Administrasi yang telah diuraikan bahwa prioritas utama Administrasi yaitu terciptanya tingkat efektif dan efisien yang optimal, baik dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas utama dan penunjang maupun dalam upaya pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Agris dan Siliss (dalam Tangkilisan, 2015;139) mengatakan bahwa Efektifitas adalah keseimbangan atau pendekatan secara optimal pada pencapaian tujuan, kemampuan dan pemanfaatan tenaga kerja.

Selanjutnya Westa (1997;71) mengatakan Efektifitas perusahaan pengendalian agar pekerjaan yang terkendali pelaksanaannya sesuai dengan yang direncanakan untuk mencegah kemungkinan adanya penyimpangan yang terjadi.

Disimpulkan bahwa Konsep Efektifitas merupakan bentuk membandingkan pekerjaan yang sudah dirumuskan atau di pola dengan hasil yang sudah dicapai. Apakah hasil capaian dalam bekerja di dalam organisasi mampu mendekati atau menyeimbangi rumusan pekerjaan yang sudah di sepakati bersama. Membandingkan ini akan bermanfaat kepada meminimalisir kesalahan atau penyimpangan kerja yang dilakukan oleh sumber daya manusia yang berkerja.

Sharma (dalam Tangkilisan, 2005;140) memberikan kriteria atau ukuran Efektifitas organisasi yang menyangkut factor internal dan external, diantaranya :

- a. Produktifitas Organisasi atau Output.
- b. Efektifitas Organisasi dalam bentuk keberhasilannya menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan di dalam dan diluar organisasi.
- c. Tidak adanya ketegangan di dalam organisasi atau hambatan-hambatan konflik di antara bagian organisasi.

Menurut H. Emersen (dalam Soewarno Handyaningrat, 2001;16) menjelaskan pengertian efektifitas (*Effectiveness*) yaitu “*Effectiveness is a measuring In term of attaning prescribed goal or objectives*” yang berarti bahwa efektifitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran dan tujuan yang telah di tentukan sebelumnya.

Selanjutnya Efektifitas juga dapat melihat ukuran keberhasilan pelaksana kegiatan dalam rangka pencapaian yang telah di tetapkan. Efektifitas pelaksanaan program Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu dalam hal ini merupakan kemampuan kerja tim koordinasi Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu. Kecamatan beserta pihak terkait dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang ingin di capai.

Menurut Drucker efektifitas adalah melaksanakan yang benar (*doing the right*), merupakan pencapain sasaran, sedangkan efisiensi adalah melakukan pekerjaan dengan benar (*doing things right*), sebagai konsep Input – Output, yakni meminimum kan penggunaan sumber daya dalam mencapai tujuan organisasi (dalam nawawi, 2003;39)

Uraian singkat tersebut menunjukkan bahwa efektif berbeda dengan efisien, sesuatu yang di lakukan secara efisien belum tentu efektif, sebaliknya sesuatu

yang di lakukan efektif belum tentu efisien. Untuk lebih sederhana lagi efektif adalah pencapaian suatu hasil kerja yang mendekati dengan tujuan dan sasaran. Sedangkan efisien adalah pekerjaan yang tepat tetapi dengan meminimumkan atau mengecilkan penggunaan sumber daya dalam pencapaian sasaran organisasi.

Selanjutnya Richard N. Streers (dalam sutrisno, 2007;125) menyatakan bahwa efektifitas dinilai dari seberapa jauh organisasi berhasil mencapai tujuan seharusnya yang ingin di capai.

Sedangkan menurut Soedjadi mengatakan bahwa efektifitas merupakan kegiatan yang telah di laksanakan secara tepat dalam arti target tercapai sesuai dengan waktu yang telah di ditetapkan (dalam nawawi, 2003;40). Efektifitas ini mampu menjadikan suatu kegiatan menjadi tepat waktu dan dapat pula di jadikan pembanding hasil nyata di bagi dengan hasil yang di harapkan.

7. Konsep Pelaksanaan / Implementasi

Implementasi yang merupakan terjemahan dari kata "*implementation*", berasal dari kata kerja "*To Implement*". Menurut *Webster Dictionary* (dalam Tachjan 2006:23) kata to implement berasal dari bahasa latin "*implementum*" dari asal kata "*impere*" dan "*plere*". Kata "*implere*" dimaksudkan "*to fill up*," "*to fill in*", yang artinya mengisi penuh; melengkapi, sedangkan "*plere*" maksudnya "*to fill*", yaitu mengisi.

Jadi secara etimologis, implementasi itu dapat dimaksudkan sebagai suatu aktifitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil.

Apabila pengertian implementasi diatas dirangkaikan dengan kebijakan publik, maka kata implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktifitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan/ditetujui dengan penggunaan sarana (alat) untk mencapai tujuan kebijakan. Dengan demikian, dalam proses kebijakan publik, implementasi kebijakan merupakan tahapan yang bersifat praktis dan dibedakan dari formulasi kebijakan yang dapat dipandang sebagai tahapan yang bersifat teoritis (dalam tachjan 2006;24)

Implementasi kebijakan itu sendiri Menurut Meter dan Van Horn (dalam Leo Agustino, 2006:139) Implementasi didefinisikan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan kepada terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu adanya tujuan atau sasaran kebijakan, adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan, dan adanya hasil kegiatan.

Menurut Meter dan Van Horn (dalam Leo Agustino, 2006:139) ada beberapa hal yang mengakibatkan suatu implementasi/pelaksanaan kebijakan dikatakan efektif atau tidak, yaitu:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan
2. Sumberdaya
3. Karakteristik Agen Pelaksana
4. Sikap/Kecendrungan (Disposition) para pelaksana
5. Komunikasi Antarorganisasi an aktivitas pelaksana
6. Lingkungan Ekonomi, sosial, dan politik

8. Konsep Koordinasi

Menurut Husaini Usman (2013;488) Koordinasi ialah proses mengintegrasikan (memadukan), menyinkronisasikan dan menyederhanakan pelaksanaan tugas yang terpisah-pisah secara terus menerus untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Menurut Moejikat (dalam Zulkifli 2009;94) Mengkonsepsikan Koordinasi sebagai sinkronisasi (penyelarasan) dari pada kegiatan-kegiatan secara teratur guna memberikan jumlah, waktu, dan pengaruh pelaksanaan yang tepat mengakibatkan adanya kegiatan-kegiatan yang selaras (harmonis) dan disatukan untuk suatu tujuan tertentu.

Batasan tersebut mengisyaratkan bahwa koordinasi juga menjadi tugas pokok pimpinan. Ini berarti setiap pimpinan harus berkemampuan untuk menggerakkan serta mengkoordinir orang-orang, alat-alat, bahan-bahan, uang, metoda, mesin, dan lainnya untuk mencapai tujuan yang dikehendaki dan pemimpin berusaha mencegah terjadinya kekacauan dan kekosongan pekerjaan.

Menurut Leonard D. White (dalam Syafiie 2006;85) Koordinasi adalah penyesuaian diri dari masing-masing bagian, dan usaha menggerakkan serta mengoperasikan bagian-bagian pada waktu yang cocok, sehingga dengan demikian masing-masing bagian dapat memberikan sumbangan terbanyak pada keseluruhan hasil.

Sedangkan menurut Henry Fayol (dalam Syafiie 2006;85) Koordinasi berarti mengikat bersama, menyatukan dan menyelaraskan semua kegiatan dan usaha.

Dari pengertian-pengertian koordinasi diatas, Syafiie (2006;86) menyimpulkan bahwa unsur-unsur koordinasi meliputi :

- a. Pengaturan.
- b. Sinkronisasi.
- c. Kepentingan bersama.
- d. Tujuan bersama.

Menurut Siregar dan TMA Ari Samadhi (dalam Zulkifli 2009;101-102) menguraikan, apabila dalam organisasi dilakukan koordinasi maka ada beberapa manfaat yang dapat diambil dari padanya, diantaranya yaitu :

- a. Dapat menghindari pertentangan satu sama lain antara satuan-satuan organisasi dan antar pejabat yang ada dalam organisasi.
- b. Dapat menghindarkan perasaan atau suatu pendapat bahwa satuan organisasinya atau jabatannya merupakan yang paling penting.
- c. Dapat dihindarkan terjadinya penyelesaian persoalan yang berlarut-larut karena ketidakjelasan orang yang bertanggung jawab.
- d. Dapat dihindarkan kemungkinan terjadinya pekerjaan rangkap terhadap sesuatu dari satuan organisasi atau pekerjaan rangkap terhadap tugas dari para pejabat.
- e. Dapat ditumbuhkan kesadaran diantara para pejabat agar saling bantu membantu satu sama lain terutama diantara pejabat yang ada dalam satuan organisasi yang sama.

- f. Dapat dihindarkan kemungkinan terjadinya kekosongan pekerjaan pada suatu aktifitas dari suatu organisasi atau kekosongan pekerjaan pada tugas dari pejabat.
- g. Saat ditimbulkan kesadaran diantara para pejabat agar saling memberi tahu masalah yang dihadapi bersama sehingga dapat menghindari kemungkinan-kemungkinan terjadinya kesalahan yang merugikan.
- h. Dapat dijamin adanya kesatuan langkah antar para pejabat.
- i. Dapat dijamin adanya kesatuan tindakan antar para pejabat.
- j. Dapat dijamin adanya kesatuan sikap antar para pejabat.
- k. Dapat dijamin adanya kesatuan kebijaksanaan antar para pejabat.

Sedangkan menurut Usman (2013;487) tujuan dan manfaat koordinasi sebagai berikut :

- a. Untuk mewujudkan KISS (Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Simplifikasi) agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien.
- b. Untuk memecahkan konflik kepentingan berbagai pihak yang terkait.
- c. Agar mampu mengintegrasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan tugas-tugasnya dengan stakeholders pendidikan yang saling bergantung, semakin besar ketergantungan dari unit-unit, semakin besar pula kebutuhan akan pengoordinasian.
- d. Agar mampu mengintegrasikan kegiatan fungsional dinas dan tujuan dari unit organisasi yang terpisah-pisah untuk mencapai tujuan bersama dengan sumber daya yang terbatas secara efektif dan efisien.

- e. Adanya pembagian kerja dimana semakin besar pembagian kerja, semakin diperlukan pengoordinasian atau penyerasian sehingga tidak terjadi duplikasi atau tumpang tindih pekerjaan yang menyebabkan pemborosan.
- f. Untuk mengembangkan dan memelihara hubungan yang baik dan harmonis diantara kegiatan-kegiatan baik fisik maupun non-fisik dengan stakeholders.
- g. Untuk memperlancar pelaksanaan tugas dalam rangka mencapai tujuan pendidikan dengan sumber daya pendidikan yang terbatas.
- h. Mencegah terjadinya kekosongan ruang dan waktu.
- i. Mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat.

Menurut Hasibuan (2007;87) sifat-sifat koordinasi adalah sebagai berikut :

- a. Koordinasi adalah dinamis bukan statis.
- b. Koordinasi menekankan pandangan menyeluruh oleh seorang coordinator (manajer) dalam rangka pencapaian sasaran.
- c. Koordinasi hanya meninjau suatu pekerjaan secara keseluruhan.

Menurut Husaini Usman (2013;495) jenis koordinasi dapat dibagi atas tiga jenis, yaitu :

- a. Koordinasi vertical, ialah koordinasi yang dilakukan oleh kepala dinas kepada atasannya atau bawahan.
- b. Koordinasi Fungsional, ialah koordinasi yang dilakukan oleh kepala dinas dengan kepala dinas yang lainnya yang tugasnya saling berkaitan berdasarkan asas fungsionalisasi.

- c. Koordinasi Institusional, ialah koordinasi yang dilakukan kepala dinas dengan beberapa instansi yang menangani suatu urusan tertentu yang bersangkutan.

Sedangkan menurut Husaini Usman (2013;496) prinsip-prinsip koordinasi disingkat dengan **KOORDINASI**, yaitu :

- a. **Kesamaan** : sama dalam visi, misi dan langkah-langkah untuk mencapai tujuan bersama.
- b. **Orientasikan** : titik pusatnya pada dinas (sebagai koordinator) yang simpul-simpulnya Stakeholder dinas.
- c. **Organisasikan** : atur orang-orang yang berkoordinasi untuk membina sekolah, yaitu harus berada dalam satu payung (terorganisasi) sehingga sikap egosektoral dapat dihindari.
- d. **Rumuskan** : nyatakan secara jelas wewenang, tanggung jawab dan tugas masing-masing agar tidak tumpang tindih.
- e. **Diskusikan** : cari cara yang efektif, efisien dan komunikatif dalam berkoordinasi.
- f. **Informasikan** : semua hasil diskusi dan keputusan mengalir cepat kesemua pihak yang ada dalam system jaringan koordinasi.
- g. **Negosiasikan** : dalam perundingan mencari kesepakatan harus saling menghormati dan usahakan menang-menang.
- h. **Atur jadwal** : rencana koordinasi harus dipatuhi dengan sebaik-baiknya oleh semua pihak.

- i. **Solusikan** : satu masalah dalam simpul jaringan harus dirasakan dan dipecahkan semua stakeholders dengan sebaik-baiknya.
- j. **Insafkan** : setiap stakeholders harus memiliki laporan tertulis yang lengkap dan siap menginformasikannya sesuai kebutuhan koordinasi.

Koordinator harus dilakukan oleh setiap manajer dalam perusahaan artinya harus dilakukan oleh setiap orang yang mempunyai bawahan. Koordinasi tidak dapat diperintahkan, dipaksakan, tetapi akan lebih baik dengan cara persuasive kepada bawahan. Karena dengan cara persuasive akan lebih dihayati, ditaati oleh bawahan, sebab mereka merasa dihargai dan dihormati.

9. Konsep Kemiskinan

Definisi tentang Kemiskinan telah mengalami perluasan, seiring dengan semakin kompleksnya faktor penyebab, indikator maupun permasalahan lain yang melingkupinya. Kemiskinan tidak lagi hanya dianggap sebagai dimensi ekonomi melainkan telah meluas hingga ke dimensi sosial, kesehatan, pendidikan dan politik.

Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan adalah ketidakmampuan memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makan maupun non makan.

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang bersifat global. Artinya, kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi dan menjadi perhatian banyak orang didunia ini. Meskipun dalam tingkatan yang berbeda, tidak ada satupun negara di jagat raya ini yang “kebal dari kemiskinan”. Kemiskinan bukan hanya dijumpai di Indonesia, India, Sri Lanka, dan Argentina, melainkan pula ditemukan

di Amerika Serikat, Jerman, Inggris, Australia, maupun Hongaria. Semua negara di dunia ini sepakat bahwa kemiskinan merupakan problema kemanusiaan yang menghambat kesejahteraan dan peradaban. Semua umat manusia di planet ini setuju bahwa kemiskinan harus dan bisa di tanggulangi.

Piven dan Cloward (dalam Suharto 2013;15) menunjukkan bahwa kemiskinan berhubungan dengan kekurangan materi, rendahnya penghasilan, dan adanya kebutuhan sosial. Diantaranya yaitu :

1. Kekurangan Materi.
2. Kekurangan Penghasilan dan Kekayaan yang memadai.
3. Kesulitan memenuhi kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosia (Social exclusion), ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat.

Dengan demikian, kemiskinan pada hakikatnya menunjuk pada situasi kesengsaraan dan ketidakberdayaan yang dialami seseorang, baik akibat ketidakmampuannya memenuhi kebutuhan hidup, maupun akibat ketidakmampuan negara atau masyarakat memberikan perlindungan sosial kepada warganya.

Berdasarkan studi SMERU, Suharto (2006;132) menunjukkan 9 kriteria yang menandai kemiskinan :

1. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang dan papan).
2. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental.

3. Ketidakmampuan dan ketidak beruntungan sosial (anak telantar, wanita korban tindak kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marginal dan terpencil).
4. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (buta huruf, rendahnya pendidikan, dan keterampilan, sakit-sakitan) dan keterbatasan sumber alam (tanah tidak subur, lokasi terpencil, ketiadaan infrastruktur jalan, listrik, air).
5. Kerentanan terhadap guncangan yang bersifat individual (rendahnya pendapatan dan aset), maupun massal (rendahnya modal sosial, ketiadaan fasilitas umum).
6. Ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang memadai dan berkesinambungan.
7. Ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi).
8. Ketiadaan jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga atau tidak adanya perlindungan sosial dari negara dan masyarakat).
9. Tidak terlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat.

Dalam Suharto (2005:17) menjelaskan bahwa tipologi kemiskinan dapat dikategorikan pada empat kategori, yakni Kemiskinan Absolut, Kemiskinan Relatif, Kemiskinan Kultural, dan Kemiskinan Struktural.

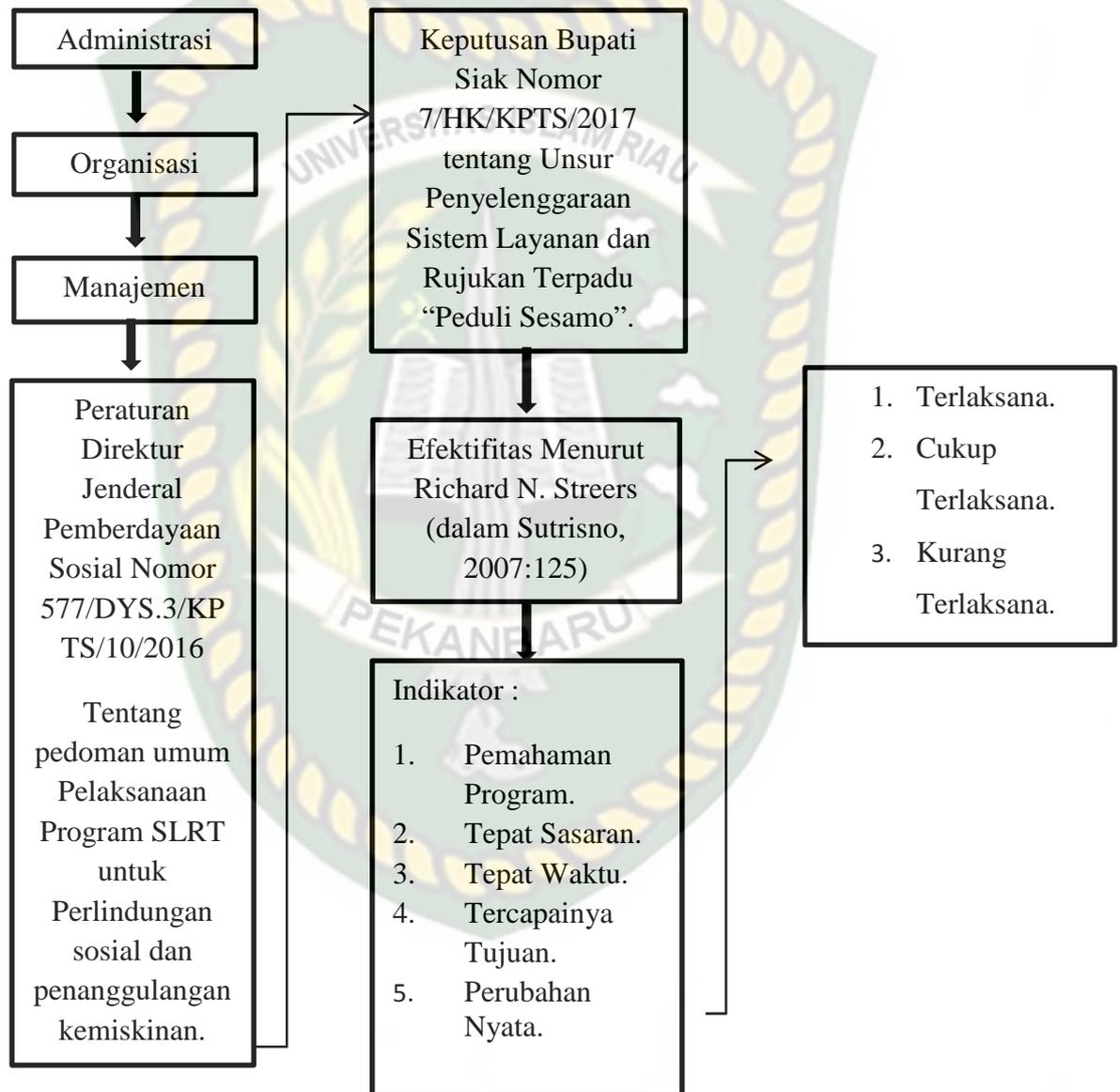
1. Kemiskinan Absolut adalah keadaan miskin yang diakibatkan oleh ketidakmampuan seseorang atau sekelompok orang dalam memenuhi

kebutuhan pokoknya, seperti makanan, pakaian, pendidikan, kesehatan, transportasi, dll.

2. Kemiskinan Relatif adalah keadaan miskin yang dialami individu atau kelompok dibandingkan dengan kondisi umum suatu masyarakat.
3. Kemiskinan Kultural adalah mengacu pada sikap, gaya hidup dan nilai orientasi sosial budaya masyarakat yang tidak sejalan dengan etos kemajuan (masyarakat modern).
4. Kemiskinan Struktural adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh ketidakberesan atau ketidakadilan struktur, baik struktur politik, sosial, maupun ekonomi yang tidak memungkinkan seseorang atau sekelompok bagi orang menjangkau sumber-sumber penghidupan yang sebenarnya tersedia bagi mereka.

B. Kerangka Pikir

Gambar II.1: Kerangka Pikir Penelitian Tentang Efektifitas Pelaksanaan Program Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) di Kabupaten Siak Sri Indrapura



Sumber : Modifikasi penulis, 2019

C. Konsep Operasional

Dengan konsep ini penulis akan memberikan penafsiran yang mengaitkan pemikiran dalam analisa. Penulis melaksanakan beberapa konsep yang berhubungan dengan penelitian ini, sesuai dengan kerangka teoritis yang telah dikemukakan sebelumnya oleh penulis, Adapun konsep operasional tersebut antara lain :

1. Administrasi adalah sekumpulan dua orang atau lebih yang bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan, secara efektif dan efisien.
2. Organisasi adalah sebagai tempat atau wadah dimana sekelompok orang berkumpul untuk melaksanakan suatu kegiatan dan tujuan
3. Manajemen adalah ilmu dan seni dalam mengatur proses pemanfaatan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
4. Efektifitas merupakan bentuk membandingkan pekerjaan yang sudah dirumuskan atau dipola dengan hasil yang telah dicapai. Apakah hasil capaian dalam kerja di dalam organisasi mampu mendekati atau menyeimbangi rumusan pekerjaan yang sudah disepakati bersama.
5. SLRT adalah sistem layanan yang membantu untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan berdasarkan profil dalam Daftar Penerima Manfaat dan menghubungkan mereka dengan program-program perlindungan sosial dan p enanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah (pusat, provinsi, dan Kabupaten/Kota).

6. Program Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu adalah suatu proses penerbitan Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar dari pihak penyalur yaitu Kementerian Sosial Republik Indonesia menuju pihak penerima yaitu masyarakat miskin dan masyarakat rentan miskin sebagai titik perhentian terakhir.
7. Mekanisme pelaksanaan Program Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu adalah proses pengurusan dan penerbitan Kartu Indonesia Sehat yang dilakukan oleh unit-unit atau struktur-struktur yang terlibat melalui prosedur/mechanisme yang telah ditetapkan. Adapun mekanisme pelaksanaan program Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk pengurusan dan penerbitan Kartu Indonesia Sehat, yaitu:
 - a. Masyarakat yang melakukan pengurusan terlebih dahulu harus melengkapi syarat utama yaitu Kartu Keluarga (Asli dan Fotocopy), Kartu Tanda Penduduk (Asli dan Fotocopy), Akte Kelahiran (Asli dan Fotocopy) bagi pengurus yang berusia dibawah 17 tahun.
 - b. Setelah syarat utama lengkap, pengurus menemui Ketua RT/RW untuk meminta surat keterangan sebagai warga yang berdomisili pada kecamatan tersebut, dan meminta surat pengantar pengurusan SKTM.
 - c. Serahkan syarat yang sudah diurus dengan RT/RW kepada Fasilitator Kecamatan atau Desa, kemudian fasilitator akan memverifikasi data pada BDT. Jika sudah terverifikasi, fasilitator akan memberikan surat keterangan telah terdaftar di BDT dan menandatangani surat tersebut.

- d. Setelah semua surat keterangan dan syarat terpenuhi, maka serahkan semua persyaratan tersebut kepada bagian Front Office di Kantor Dinas Sosial, jelaskan maksud, tujuan dan keluhan pengurusan SKTM (hal ini dilakukan agar tidak terjadi penyalahgunaan penerbitan SKTM).
 - e. Penerbitan SKTM berlangsung kurang lebih 1-2 hari kerja, dan untuk penerbitan Kartu Indonesia Sehat masyarakat harus menunggu kurang lebih 1minggu dengan catatan jika pengurusan SKTM untuk penyakit yang darurat maka saat penyerahan persyaratan bagian Front Office akan melampirkan keterangan agar bisa digunakan untuk mendapatkan layanan kesehatan gratis sesegera mungkin tanpa menunggu Kartu Indonesia Sehat diterbitkan.
8. Tim Koordinasi Program Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu kecamatan adalah Fasilitator yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Camat.
 9. Tim Koordinasi Program Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Kabupaten adalah Dinas Sosial yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan, dan bertanggung jawab kepada Bupati.
 10. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan.

11. Kemiskinan adalah masalah dalam pembangunan yang ditandai dengan pengangguran dan keterbelakangan, yang kemudian meningkat menjadi ketimpangan.

D. Operasional Variabel

Tabel II.1 : Operasionalisasi Variabel Penelitian Tentang Efektifitas Pelaksanaan Program Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) di Kabupaten Siak Sri Indrapura

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian	Skala Pengukuran
1	2	3	4	5
Efektifitas dinilai dari seberapa jauh sebuah organisasi berhasil mencapai tujuan yang seharusnya dicapai. Richard N. Streers (dalam Sutrisno, 2007;125	Efektifitas Pelaksanaan Program Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu	1. Pemahaman Program	1. Pelatihan kepada Tim Penyelenggara Program SLRT di Kabupaten/ Kota dari Kementerian Sosial. 2. Proses Pelaksanaan Program SLRT sesuai dengan Tata Laksana yang terdapat dalam Buku Pedoman Umum SLRT. 3. Proses Sosialisasi dalam pengenalan program SLRT kepada Masyarakat.	Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana
		2. Tepat Sasaran	1. Terlaksananya proses pendataan sesuai dengan Kriteria Penerima Manfaat. 2. Proses pendataan oleh Fasilitator sesuai dengan kriteria yang terdapat di dalam buku Pedoman Umum SLRT. 3. Penerima Program sesuai dengan kuota pengurusan SKTM pada tiap tahunnya.	Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana
		3. Tepat Waktu	1. Pelaksanaan Penerbitan SKTM pada Program SLRT sesuai dengan Standar Waktu.	Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana

		4. Tercapainya Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Program SLRT dapat membantu mengurangi beban masyarakat yang memiliki ekonomi menengah kebawah. 2. Kesesuaian terhadap Prosedur Pengambilan Penerbitan SKTM. 3. Terdapat Koordinasi antara Fasilitator dan Perangkat Desa dalam Pengurusan SKTM. 	<p>Terlaksana</p> <p>Cukup Terlaksana</p> <p>Kurang Terlaksana</p>
		5. Perubahan Nyata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat dapat memperoleh Layanan Kesehatan dan Mengurangi angka kemiskinan di masyarakat. 	<p>Terlaksana</p> <p>Cukup Terlaksana</p> <p>Kurang Terlaksana</p>

Sumber : Hasil Modifikasi Penulis, 2019.

E. Teknik Pengukuran

Teknik Pengukuran terhadap pelaksanaan variabel dan indikator dalam penelitian ini diklasifikasikan dalam 3 (tiga kategori) yaitu : Terlaksana, Cukup Terlaksana, dan Kurang Terlaksana. Untuk lebih jelasnya tentang kategori ukuran tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

- **Ukuran Variabel**

Terlaksana : Apabila penilaian terhadap efektifitas pelaksanaan program SLRT berada pada skala 67-100%

Cukup Terlaksana : Apabila penilaian terhadap efektifitas pelaksanaan program SLRT berada pada skala 34-66%

Kurang Terlaksana : Apabila penilaian terhadap efektifitas pelaksanaan program SLRT berada pada skala 0-33%

- **Indikator Ukuran Variabel**

Adapun ukuran Indikator Variabel adalah sebagai berikut :

1. Pemahaman Program.

Terlaksana : Apabila penilaian terhadap indikator Pemahaman Program berada pada skala 67-100%

Cukup Terlaksana : Apabila penilaian terhadap indikator Pemahaman Program berada pada skala 34-66%

Kurang Terlaksana : Apabila penilaian terhadap indikator Pemahaman Program berada pada skala 0-33%

2. Tepat Sasaran.

Terlaksana : Apabila penilaian terhadap indikator Tepat Sasaran berada pada skala 67-100%

Cukup Terlaksana : Apabila penilaian terhadap indikator Tepat Sasaran berada pada skala 34-66%

Kurang Terlaksana : Apabila penilaian terhadap indikator Tepat Sasaran berada pada skala 0-33%

3. Tepat Waktu.

Terlaksana : Apabila penilaian terhadap indikator Tepat Waktu berada pada skala 67-100%

Cukup Terlaksana : Apabila penilaian terhadap indikator Tepat Waktu berada pada skala 34-66%

Kurang Terlaksana : Apabila penilaian terhadap indikator Tepat Waktu berada pada skala 0-33%

4. Tercapainya Tujuan.

Terlaksana : Apabila penilaian terhadap indikator Tercapainya Tujuan berada pada skala 67-100%

Cukup Terlaksana : Apabila penilaian terhadap indikator Tercapainya Tujuan berada pada skala 34-66%

Kurang Terlaksana : Apabila penilaian terhadap indikator Tercapainya Tujuan berada pada skala 0-33%

5. Perubahan Nyata.

Terlaksana : Apabila penilaian terhadap indikator Perubahan Nyata berada pada skala 67-100%

Cukup Terlaksana : Apabila penilaian terhadap indikator Perubahan Nyata berada pada skala 34-66%

Kurang Terlaksana : Apabila penilaian terhadap indikator Perubahan Nyata berada pada skala 0-33%

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian Kuantitatif. Penelitian Kuantitatif adalah data yang dibuat berdasarkan data tabel dengan mengumpulkan data populasi, kemudian dijelaskan secara analisis deskriptif yaitu dengan menggambarkan keadaan yang terjadi sehingga akan diperoleh gambaran yang jelas terhadap objek penelitian dari hasil analisa.

Metode kuantitatif digunakan dalam meneliti status kelompok manusia, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, atau kilas peristiwa pada waktu tertentu. Melalui metode ini akan diperoleh data dan informasi tentang gambaran suatu fenomena, fakta, sifat, serta hubungan fenomena tertentu secara komprehensif dan integral (dalam Sugiyono 2018;30) .

Sedangkan penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara cermat karakteristik dari suatu gejala atau masalah yang diteliti, dengan berusaha mendekati dan menyampaikan fakta-fakta yang jelas, teliti dan lengkap tanpa banyak yang detail yang tidak penting.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial Kabupaten Siak Sri Indrapura, di jalan Komplek Perkantoran Sei. Betung. Dimana melihat keadaan Efektifitas Pelaksanaan Program Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) berdasarkan fenomena yang ada, dan adapun pertimbangan menetapkan lokasi penelitian yaitu karena pada Kabupaten Siak Sri Indrapura selalu mendapatkan

penghargaan dalam melakukan service pelayanan kepada masyarakat yaitu penghargaan pelayanan terbaik kepada masyarakat se-Riau.

C. Populasi dan Sampel

Populasi menurut Sugiyono (2018;80) adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : objek / subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 70 Orang yaitu Tim Pelaksana Program SLRT (14 Orang Fasilitator yang terdapat pada tiap kecamatan di Kabupaten Siak Sri Indrapura, 3 Orang Staff Front Office, 3 Orang Staff Back Office, dan 50 Masyarakat Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat yang melakukan pengurusan Program SLRT di Kabupaten Siak Sri Indrapura). Kemudian, untuk mengkroscek data hasil dari kuisisioner sebagai hasil wawancara adalah Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.

Sampel menurut Sugiyono (2018;81) adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang diambil dari populasi juga harus representative (mewakili).

Tabel III.1 : Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian Tentang Efektifitas Pelaksanaan Program Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu di Kabupaten Siak Sri Indrapura

NO	SUB POPULASI	POPULASI	SAMPEL	PERSENTASE
1	Tim Pelaksana Program SLRT	20	20	100%
2	Masyarakat Rumah Tangga Sasaran	25.667	50	0,19%

JUMLAH	25.687	70	100%
---------------	---------------	-----------	-------------

Sumber : Modifikasi Penulis, 2019

D. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk Tim Pelaksana Program SLRT Kabupaten Siak Sri Indrapura, dilakukan teknik sampling jenuh (sensus) Karena jumlah populasi relative kecil, maka semua anggota populasi dijadikan sampel (sugiyono, 2018:85)
2. Untuk pihak Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat Program SLRT, digunakan teknik penarikan sampel secara Sampling Insidental yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2018:85).

E. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Yaitu data-data yang di peroleh dari para responden melalui penelitian lapangan tentang Efektifitas Pelaksanaan Program Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu yaitu data yang diperoleh dari narasumber seperti Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin sebagai Key Informan, Tim Pelaksana Program SLRT (3 Orang Pegawai Front Office, 3 Orang Pegawai Back Office, dan 14 Orang Fasilitator), serta masyarakat Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Program

SLRT yang melakukan pengurusan SKTM pada Dinas Sosial Kabupaten Siak Sri Indrapura.

2. Data Sekunder

Sumber data dan informasi keterangan dari organisasi yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu kantor Dinas Sosial Kabupaten Siak Sri Indrapura. Data pelengkap yang diperoleh secara tidak langsung dari berbagai sumber yang bersedia di lokasi penelitian dan sudah dipublikasikan. Data ini berupa Arsip, Literatur yang berhubungan langsung dengan penelitian ini sebagai struktur organisasi, data keanggotaan, dan masyarakat.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini maka penulis menggunakan teknik yaitu :

1. Observasi

Menurut Sutrisno Hadi (dalam Sugiyono 2018;145) Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Teknik ini digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.

2. Wawancara

Teknik wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab oleh peneliti kepada responden. Teknik ini dilakukan agar informasi yang didapatkan oleh peneliti lebih jelas dan akurat serta mendalam. Teknik

wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh (Sugiyono 2018;137). Teknik wawancara ini ditujukan kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin sebagai Key Informan, dan Responden Tim Pelaksana Program SLRT dan Masyarakat Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Program SLRT Kabupaten Siak Sri Indrapura.

3. Angket / Kuesioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tau dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. Selain itu, kuesioner juga cocok digunakan bila jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas (dalam Sugiyono 2018;142). Dalam penelitian ini, kuisioner diberikan dan diisi oleh seluruh responden. Artinya, Teknik kuisioner ini ditujukan kepada 70 orang responden.

4. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan fasilitas untuk mengabadikan sebuah momen. Baik foto, rekaman, dan lain-lain. Dokumentasi digunakan untuk mengabadikan peristiwa proses pengurusan Surat Keterangan Tidak Mampu pada Program SLRT di Kabupaten Siak Sri Indrapura.

G. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data yang digunakan oleh peneliti adalah metode statistik deskriptif. Menurut Sugiyono (2018;147) statistik deskriptif adalah statistik yang

digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud mengambil kesimpulan untuk umum atau general.

H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel III.2 : Perincian Jadwal Kegiatan Penelitian Efektifitas Pelaksanaan Program Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) di Kabupaten Siak Sri Indrapura

No	Kegiatan	Bulan dan Minggu Ke																				
		Mar/Apr				Mei/Jun				Jul/Agst				Sept/Okt				Nov/Des				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Penyusunan UP	X	X	X	X	X	X	X	X													
2	Seminar UP									X												
3	Revisi UP									X												
4	Revisi Kuisisioner										X	X										
5	Rekomendasi Survey											X	X									
6	Survey Lapangan													X	X	X						
7	Analisis Data														X	X						
8	Laporan Hasil Penelitian																X	X				
9	Konsultasi Revisi Skripsi																	X				
10	Ujian Skripsi																		X			
11	Revisi Skripsi																	X	X			
12	Penggandaan Skripsi																	X	X			

Sumber : Modifikasi Penulis, 2019.

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Perkembangan Kabupaten Siak Sri Indrapura

Kerajaan Siak Sri Indrapura didirikan pada tahun 1723 M oleh Raja Kecil yang bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah putera Raja Johor (Sultan Mahmud Syah) dengan istrinya Encik Pong, dengan pusat kerajaan berada di Buntan. Konon nama Siak berasal dari nama sejenis tumbuh-tumbuhan yaitu siak-siak yang banyak terdapat di situ. Sebelum kerajaan Siak berdiri, daerah Siak berada dibawah kekuasaan Johor. Yang memerintah dan mengawasi daerah ini adalah raja yang ditunjuk dan diangkat oleh Sultan Johor. Namun hampir 100 tahun daerah ini tidak ada yang memerintah. Daerah ini diawasi oleh Syahbandar yang ditunjuk untuk memungut cukai hasil hutan dan hasil laut.

Pada awal tahun 1699 Sultan Kerajaan Johor bergelar Sultan Mahmud Syah II mangkat dibunuh Magat Sri Rama, istrinya yang bernama Encik Pong pada waktu itu sedang hamil dilarikan ke Singapura, terus ke Jambi. Dalam perjalanan itu lahirlah Raja Kecil dan kemudian dibesarkan di Kerajaan Pagaruyung Minangkabau. Sementara itu pucuk pimpinan Kerajaan Johor diduduki oleh Datuk Bendahara tun Habib yang bergelar Sultan Abdul Jalil Riayat Syah.

Setelah Raja Kecil dewasa, pada tahun 1717 Raja Kecil berhasil merebut tahta Johor. Tetapi tahun 1722 Kerajaan Johor tersebut direbut kembali oleh Tengku Sulaiman ipar Raja Kecil yang merupakan putera Sultan Abdul Jalil Riayat Syah. Dalam merebut Kerajaan Johor ini, Tengku Sulaiman dibantu oleh beberapa bangsawan Bugis. Terjadilah perang saudara yang mengakibatkan

kerugian yang cukup besar pada kedua belah pihak, maka akhirnya masing-masing pihak mengundurkan diri. Pihak Johor mengundurkan diri ke Pahang, dan Raja Kecil mengundurkan diri ke Bintan dan seterusnya mendirikan negeri baru di pinggir Sungai Buntan (anak Sungai Siak). Demikianlah awal berdirinya kerajaan Siak di Buntan. Namun, pusat Kerajaan Siak tidak menetap di Buntan.

Pusat kerajaan kemudian selalu berpindah-pindah dari kota Buntan pindah ke Mempura, pindah kemudian ke Senapelan Pekanbaru dan kembali lagi ke Mempura. Semasa pemerintahan Sultan Ismail dengan Sultan Assyaidis Syarif Ismail Jalil Jalaluddin (1827-1864) pusat Kerajaan Siak dipindahkan ke kota Siak Sri Indrapura dan akhirnya menetap disana sampai akhirnya masa pemerintahan Sultan Siak terakhir.

Pada masa Sultan ke-11 yaitu Sultan Assayaidis Syarif Hasyim Abdul Jalil Syaifuddin yang memerintah pada tahun 1889-1908, dibangunlah istana yang megah terletak di kota Siak dan istana ini diberi nama Istana Asseraiyah Hasyimiah yang dibangun pada tahun 1889. Pada masa pemerintahan Sultan Syarif Hasyim ini Siak mengalami kemajuan terutama dibidang ekonomi. Dan masa itu pula beliau berkesempatan melawat ke Eropa yaitu Jerman dan Belanda.

Setelah wafat, beliau digantikan oleh putranya yang masih kecil dan sedang bersekolah di Batavia yaitu Tengku Sulung Syarif Kasim dan baru pada tahun 1915 beliau ditabalkan sebagai Sultan Siak ke-12 dengan gelar Assayaidis Syarif Kasim Abdul Jalil Syaifuddin dan terakhir terkenal dengan nama Sultan Syarif Kasim Tsani (Sultan Syarif Kasim II). Bersamaan dengan diproklamirkannya Kemerdekaan Republik Indonesia, beliau pun mengibarkan bendera merah putih

di Istana Siak dan tak lama kemudian beliau berangkat ke Jawa menemui Bung Karno dan menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia sambil menyerahkan Mahkota Kerajaan serta uang sebesar Sepuluh Ribu Gulden. Dan sejak itu beliau meninggalkan Siak dan bermukim di Jakarta. Baru pada tahun 1960 kembali ke Siak dan mangkat di Rumbai pada tahun 1968.

Beliau tidak meninggalkan keturunan baik dari Permaisuri Pertama Tengku Agung maupun dari Permaisuri Kedua Tengku Maharatu. Pada tahun 1997 Sultan Syarif Kasim II mendapat gelar Kehormatan Kepahlawanan sebagai seorang Pahlawan Nasional Republik Indonesia. Makam Sultan Syarif Kasim II terletak di tengah Kota Siak Sri Indrapura tepatnya di samping Masjid Sultan yaitu Masjid Syahabuddin.

Diawal Pemerintahan Republik Indonesia, Kabupaten Siak ini merupakan Wilayah Kewedanan Siak di bawah Kabupaten Bengkalis yang kemudian berubah status menjadi Kecamatan Siak. Barulah pada tahun 1999 berubah menjadi Kabupaten Siak dengan ibukotanya Siak Sri Indrapura berdasarkan UU No. 53 Tahun 1999.

B. Letak Geografis dan Demografi Kabupaten Siak Sri Indrapura

1. Letak Geografis

Secara geografis Kabupaten Siak terletak pada Koordinat 10°16'30LU sampai dengan 0°20'49'LU dan 100°54'21"BT sampai dengan 102°20'59"BT.

Kabupaten Siak mempunyai luas 8.556,09 km² dengan batas wilayah yaitu :

- a. Sebelah Utara dengan Kabupaten Bengkalis
- b. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Kampar dan Pelalawan

- c. Sebelah Timur dengan Kabupaten Bengkalis dan Pelalawan
- d. Sebelah Barat dengan Kabupaten Bengkalis dan Kota Pekanbaru

Berikut ini rincian kecamatan yang ada di Kabupaten Siak diantaranya :

- a. Kecamatan Siak terdiri dari kelurahan, yaitu : Langkai, Kampung Dalam, Kampung Rempak, Tumang, Merempan Hulu, Buantan Besar, Siak Lanjut, Rawang Air Putih.
- b. Kecamatan Mempura terdiri dari 7 Kelurahan, yaitu : Benteng Hulu, Benteng Hilir, Paluh, Koto Ringin, Kampung Tengah, Sungai Mempura, Merempan Hilir.
- c. Kecamatan Dayun terdiri dari 11 Kelurahan, yaitu : Suka Mulia, Buana Makmur, Pangkalan Makmur, Teluk Merbau, Merangkai, Banjar Seminai, Sawit Permai, Sialang Sakti, Berumbung Baru, Lubuk Tilan, Dayun.
- d. Kecamatan Bunga Raya terdiri dari 7 kelurahan, yaitu : Jayapura, Buantan Lestari, Tuah Indrapura, Bunga Raya, Kemuning Muda, Jati Baru, Langsung Permai.
- e. Kecamatan Sungai Mandau terdiri dari 8 kelurahan, yaitu : Lubuk Ubut, Sungai Selodang, Teluk Lancang, Olak, Muara Kelantan, Lubuk Jering, Becah Umbai, Tasik Betung.
- f. Kecamatan Sungai Apit terdiri dari 13 Kelurahan, yaitu : Teluk Mesjid, Harapan, Parit I/II, Sungai Apit, Tanjung Kuras, Teluki Batil, Sungai Kayu Ara, Lalang, Bunsur, Mengkapan, Sungai Rawa, Penyengat, Teluk Lanus.

- g. Kecamatan Sabak Auh terdiri dari 8 Kelurahan, yaitu : Bandar Sungai, Rempak, Belading, Laksamana, Sungai Tengah, Sebak Permai, Bandar Permai, Selat Guntung.
- h. Kecamatan Minas terdiri dari 5 kelurahan, yaitu : Mandi Angin, Minas Barat, Rantau Bertuah, Minas Timur, Minas Jaya.
- i. Kecamatan Kandis terdiri dari 6 kelurahan, yaitu : Sam-Sam, Kandis Belutu, Kandis Kota, Telaga Sam-Sam, Simpang Belutu.
- j. Kecamatan Tualang terdiri dari 8 kelurahan, yaitu : Meredan Barat, Meredan Timur, Perawang Barat, Perawang Tualang, Pinang Sebatang, Pinang Sebatang Barat, Pinang Sebatang Timur.
- k. Kecamatan Koto Gasib terdiri dari 9 Kelurahan, yaitu : Kuala Gasib, Teluk Rimba, Pangkalan Pisang, Keranji Guguh, Empang Pandan, Sengkemang, Rantau Panjang, Buantan I, Buantan II.
- l. Kecamatan Kerinci Kanan terdiri dari 12 Kelurahan, yaitu : Kerinci Kiri, Bukit Agung, Kumbara Utara, Bukit Harapan, Buana Bhakti, Kerinci Kanan, Simpang Perak Jaya, Gabung Makmur, Jati Mulia, Buatan Baru, Seminai, Delima Jaya.
- m. Kecamatan Lubuk Dalam terdiri dari 6 Kelurahan, yaitu : Empang Baru, Sialang Palas, Sialang Baru, Lubuk Dalam, Rawang Kao, Sri Gading.
- n. Kecamatan Pusako terdiri dari 7 Kelurahan, yaitu : Benayah, Dosan, Dusun Pusako, Pebadaran, Perincit, Sungai Berbari, Sungai Limau.

Wilayah Administratif Kabupaten Siak terdiri dari 14 Kecamatan, 131 desa/kelurahan, dengan rincian luas sebagai berikut :

Tabel IV.1 : Wilayah Administrasi dan Luas Kabupaten Siak Tahun 2017

No	Kecamatan	Ibukota	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase Luas
1	2	3	4	5
1	Minas	Minas	346,35	4,05
2	Kandis	Kandis	1493,65	17,45
3	Siak	Siak Si Indrapura	894,17	10,45
4	Sungai Apit	Sungai Apit	1346,33	15,74
5	Sungai Mandau	Muara Kelantan	1705	19,93
6	Kerinci Kanan	Kerinci Kanan	128,66	1,50
7	Lubuk Dalam	Lubuk Dalam	155,09	1,81
8	Tualang	Perawang	343,60	4,02
9	Koto Gasib	Pangkal Pisang	704,70	8,24
10	Dayun	Dayun	232,24	2,71
11	Bungaraya	Bungaraya	151	1,76
12	Mempura	Benteng Hilir	437,45	5,11
13	Sabak Auh	Bandar Sungai	73,38	0,36
14	Pusako	Dusun Pusaka	544,57	6,36
Jumlah			8556	100

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Siak, 2017

2. Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Siak Sri Indrapura pada tahun 2017 adalah sebanyak 465.514 jiwa, terdiri dari 238.837 laki-laki dan 226.577 perempuan. Kecamatan yang memiliki penduduk terbanyak adalah Kecamatan Tualang yaitu sebanyak 128.202 jiwa, sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Pusako, yaitu sebanyak 6.026 jiwa. Tingginya laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Siak Sri Indrapura ini disebabkan tingginya angka migrasi penduduk dari luar daerah ke Kabupaten Siak Sri Indrapura.

Tabel IV.2 : Jumlah Penduduk Kabupaten Siak Sri Indrapura Tahun 2017

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Laki-Laki	Jumlah Penduduk Perempuan
1	Minas	16.428	15.670
2	Sungai Mandau	4.709	4.434
3	Kandis	37.293	35.353

4	Siak	13.975	13.486
5	Kerinci Kanan	14.470	13.512
6	Tualang	66.228	61.974
7	Dayun	16.860	15.576
8	Lubuk Dalam	10.644	10.363
9	Koto Gasib	11.508	11.102
10	Mempura	8.920	8.544
11	Sungai Apit	15.223	14.973
12	Bungaraya	13.376	12.772
13	Sabak Auh	6.052	5.943
14	Pusako	3.151	2.875
	Jumlah	238.837	226.577

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Siak, 2017

Luas keseluruhan wilayah Kabupaten Siak adalah 8556,09 Km² serta jumlah penduduk sebanyak 465.514 jiwa, maka diperlukan lembaga pemerintah yang dapat menangani permasalahan dalam bidang sosial dan kemasyarakatan, yaitu Dinas Sosial.

C. Visi dan Misi Kabupaten Siak Sri Indrapura

1. Visi Kabupaten Siak Sri Indrapura

Visi pembangunan Kabupaten Siak sebagai rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun 2016-2021 dan merupakan bagian dari visi RPJPD Kabupaten Siak Tahun 2005-2025 dirumuskan sebagai berikut: “Terwujudnya Kabupaten Siak yang Maju dan Sejahtera Dalam Lingkungan Masyarakat yang Agamis dan Berbudaya Melayu Serta Menjadikan Kabupaten Siak Sebagai Tujuan Pariwisata di Sumatera.”

2. Misi Kabupaten Siak Sri Indrapura

Misi pembangunan sebagai penjabaran dari upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Siak dirumuskan sebagai berikut:

- a. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, berakhlak, beriman dan bertaqwa.
- b. Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata, terutama kampung-kampung serta penerapan pembangunan yang berwawasan lingkungan.
- c. Mewujudkan perekonomian daerah yang mandiri dan berdaya saing melalui pembangunan dan pengembangan sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan serta sektor-sektor produktif lainnya.
- d. Mewujudkan destinasi wisata yang berdaya saing.
- e. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik yang prima

D. Gambaran Umum Dinas Sosial Kabupaten Siak Sri Indrapura

Dinas Sosial Kabupaten Siak sebagai lembaga Teknis Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Siak Kabupaten Siak serta berdasarkan Peraturan Bupati Siak Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Siak. Dinas Sosial Kabupaten Siak dipimpin oleh Kepala Dinas dan dibantu oleh 1 (satu) Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian dan 3 (tiga) Bidang terdiri dari 7 (tujuh) Seksi termasuk didalamnya Jabatan Fungsional. Selain itu untuk

menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dibantu oleh Tenaga Pekerja Sosial antara lain : TKSK, Pendamping PKH, Satuan Bakti Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat, Tagana, dll.

Guna menjalankan tugas dan fungsi di Bidang Sosial, Dinas Sosial Kabupaten Siak melayani seluruh permasalahan sosial guna membantu Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah. Selain sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat, Kabupaten Siak juga merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah Provinsi Riau. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kegiatan yang didanai oleh Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Pusat melalui DIPA yang ada di Pemerintah Provinsi Riau.

E. Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Siak Sri Indrapura

1. Visi

Adalah cara pandang jauh ke depan kemana sebuah instansi harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Visi juga adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi tersebut. Sedangkan visi dalam kebijakan pembangunan merupakan suatu kondisi yang dicita-citakan sekaligus sebagai arahan untuk mencapai sesuatu yang di cita-citakan. Visi pembangunan Sosial di Kabupaten Siak pada hakekatnya merupakan turunan dari Visi Besar (Grand Vision) pembangunan Kabupaten Siak. Oleh karena itu, dalam penyusunan Visi Dinas Sosial Kabupaten Siak tetap mengacu pada Visi Pembangunan Daerah Siak yaitu :

“TERWUJUDNYA KABUPATEN SIAK YANG MAJU DAN SEJAHTERA
DALAM LINGKUNGAN MASYARAKAT YANG AGAMIS DAN

BERBUDAYA MELAYU SERTA MENJADI TUJUANPARIWISATA DI SUMATERA.”

2. Misi

Pembangunan sebagai penjabaran dari upaya yang harus dilakukan untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Siak dirumuskan sebagai berikut:

- a. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Berakhlak, Beriman dan Bertaqwa serta Berbudaya Melayu.
- b. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Merata dan Berwawasan Lingkungan.
- c. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Mandiri dan Berdaya Saing.
- d. Mewujudkan Destinasi Pariwisata yang Berdaya Saing.

Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Serta Pelayanan Publik Yang Prima Sebagai SKPD yang mengurus bidang sosial, Dinas Sosial Kabupaten Siak dalam 5 tahun kedepan (2016-2021) akan mendukung misi Pemerintah Kabupaten Siak, yaitu misi ketiga “Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Mandiri dan Berdaya Saing.”

F. Sarana dan Prasarana Dinas Sosial Kabupaten Siak Sri Indrapura

Sarana dan Prasarana yang memadai dan mencukupi kebutuhan akan memperlancar pelaksanaan tugas dan sebaliknya apabila sarana dan prasarana yang dimiliki organisasi tidak memadai dan tidak memiliki kualitas yang baik tentunya akan menghambat pelaksanaan tugas yang dilakukan pegawai.

Untuk melihat sarana dan prasarana yang tersedia pada Kantor Dinas Sosial Kabupaten Siak Sri Indrapura, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV.3 : Sarana dan Prasarana di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Siak Sri Indrapura

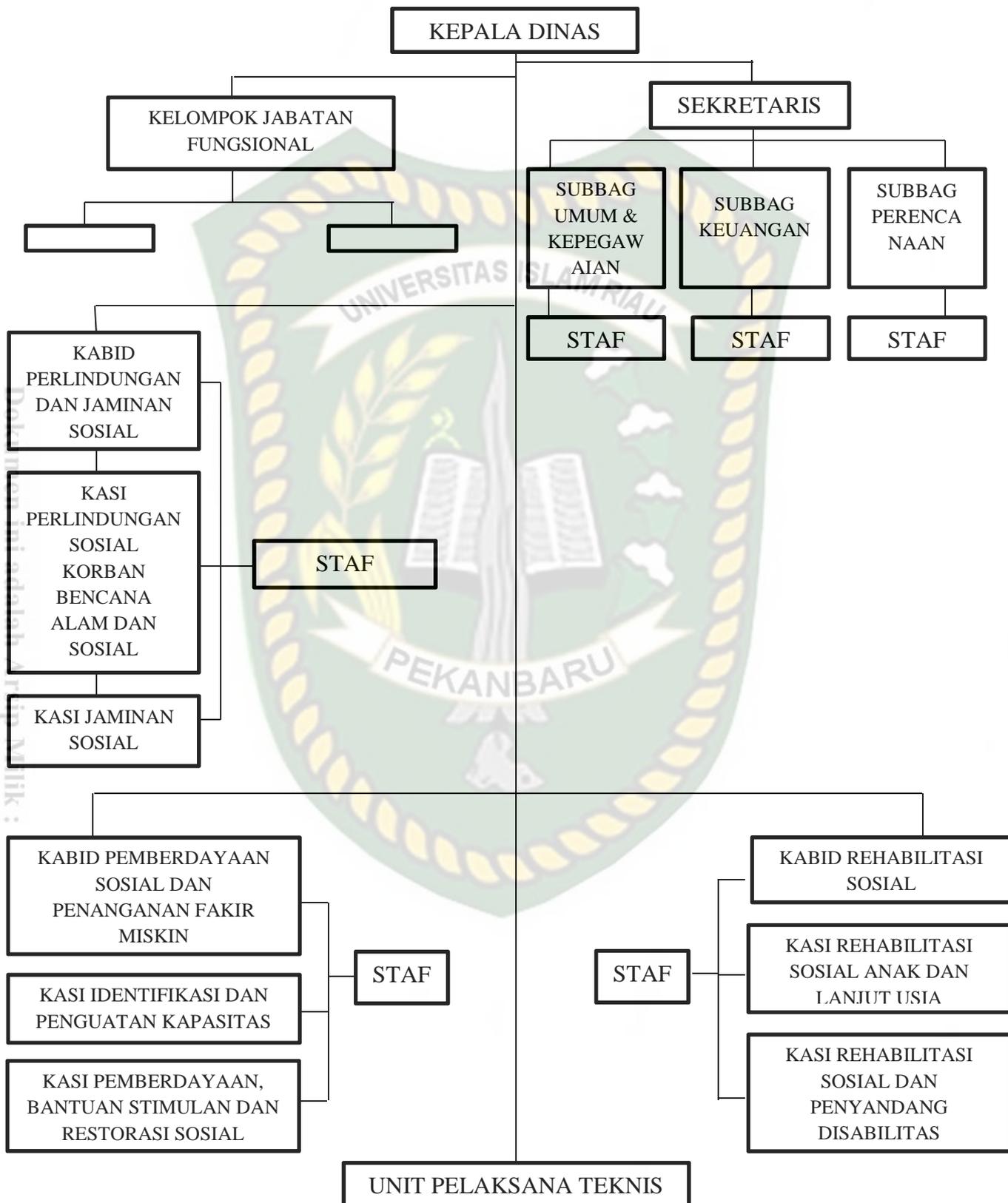
No	Nama Barang	Jumlah	Keadaan Barang	Keterangan
1	Kursi Tamu	15 Buah	Baik	-
2	Lemari Kaca	7 Buah	Baik	-
3	AC	9 Unit	Baik	-
4	Komputer	15 Unit	Baik	-
5	Meja Kerja Pejabat Eselon	4 Buah	Baik	-
6	Laptop	17 Unit	Baik	-
7	Meja Komputer	15 Buah	Baik	-
8	Televisi	3 Unit	Baik	-
9	Printer	20 Unit	Baik	-
10	Filling Kabinet	22 Buah	Baik	-
11	Kursi Rapat	10 Buah	Baik	-
12	Proyektor	3 Unit	Baik	-
13	Mesin Ketik	3 Unit	Baik	-
14	Sofa Tamu	3 Set	Baik	-
15	Kursi Kerja	26 Buah	Baik	-
16	Papan Pengumuman	4 Buah	Baik	-
17	Sound System	2 Unit	Baik	-
18	Meja Rapat	10 Buah	Baik	-
19	Papan Nama Instansi	9 Buah	Baik	-
20	Meja Kerja	26 Unit	Baik	-

Sumber : Pengurus Barang Dinas Sosial Kabupaten Siak Sri Indrapura, 2018.

G. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Siak Sri Indrapura

Adapun Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Siak Sri Indrapura dapat dilihat pada gambar bagan berikut ini

Gambar IV.1: Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Siak Sri Indrapura



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan disajikan analisis dan pembahasan terhadap hasil-hasil penelitian tentang Efektifitas Pelaksanaan Program Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) di Kabupaten Siak Sri Indrapura. Analisis ini dimaksudkan untuk mengetahui kinerja Tim Pelaksana Program SLRT di Kecamatan hingga ke Dinas Sosial dalam melaksanakan tugasnya untuk mendata rumah Tangga Sasaran yang berhak mendapatkan bantuan Layanan Kesehatan dari Program SLRT. Data-data yang di analisis diperoleh melalui kuisioner, wawancara, dan dokumentasi yang ditujukan kepada Tim Pelaksana Program SLRT dan Rumah Tangga Sasaran yang sesuai dengan Kriteria di Kabupaten Siak Sri Indrapura.

Sebelum melakukan analisis terhadap Tim Pelaksana Program SLRT di Kabupaten Siak Sri Indrapura, maka terlebih dahulu akan dilakukan analisis hal-hal yang bersangkutan dengan identitas responden yang menjadi sampel pada penelitian ini. Hal-hal tersebut antara lain mencakup mengenai tingkat umur, tingkat Pendidikan, jenis kelamin, dan masa kerja dari responden dalam penelitian ini. Sehingga dengan penjabaran identitas responden dapat mempermudah proses penelitian.

A. Identitas Responden

Sebelum pembahasan mengenai Efektifitas Pelaksanaan Program Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) di Kabupaten Siak Sri Indrapura berlanjut, dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah 3 Orang Pegawai Front Office Dinas Sosial Kabupaten Siak, 3 Orang Pegawai Back Office Dinas Sosial Siak, 14

Orang Fasilitator Kecamatan, dan 50 Orang Masyarakat Rumah Tangga Sasaran. Artinya keseluruhan sampel pada penelitian ini adalah berjumlah 70 Orang. Berikut ini uraian tentang identitas responden yaitu Tim Pelaksana Program SLRT dan Masyarakat Rumah Tangga Sasaran.

1. Tingkat Umur

Umur merupakan Faktor yang sangat berpengaruh pada produktivitas kerja serta berpengaruh pada kematangan pola pikir seseorang. Biasanya produktivitas kerja seseorang maksimal mencapai usia 55 Tahun, seseorang yang berusia diatas 55 Tahun maka semakin menurun produktivitas kerja, penurunan ketelitian bekerja, menurunnya konsentrasi dan daya tahan fisik dalam bekerja serta penurunan pola pikir. Adapun tingkat umur Tim Pelaksana Program SLRT dan Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat Program SLRT yang menjadi Responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel V.1 adalah sebagai berikut :

Tabel V.1: Tingkat Umur Responden Tim Pelaksana Program SLRT dan Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat Program SLRT di Kabupaten Siak Sri Indrapura

No	Tingkat Umur	Responden				Jumlah	
		TPP SLRT		RTS-PM		Jlh	%
		Jlh	%	Jlh	%		
1	<20	-	-	-	-	-	-
2	20-29	7	35%	9	18%	16	23%
3	30-39	10	50%	18	36%	28	40%
4	40-49	3	15%	20	40%	23	33%
5	50>	-	-	3	6%	3	4%
Jumlah		20	100%	50	100%	70	100%

Sumber : Data Olahan 2019.

Dari tabel V.1 diatas dapat dipahami bahwa tingkat umur dari jumlah keseluruhan responden yang merupakan personel Tim Pelaksana SLRT dan

Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat Program SLRT yang berumur 20-29 Tahun sebanyak 16 Orang atau sebesar 23%. Responden yang merupakan Tim Pelaksana SLRT dan Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat Program SLRT yang berumur 30-39 Tahun sebanyak 28 Orang atau sebesar 40%, kemudian Responden yang merupakan Tim Pelaksana SLRT dan Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat Program SLRT yang berumur 40-49 Tahun sebanyak 23 Orang atau sebesar 33%, dan responden yang berumur 50 Tahun Keatas mencapai sebanyak 3 Orang atau sebanyak 4%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa responden yang terbanyak adalah responden yang berumur 30-39 tahun yaitu sebanyak 28 Orang atau 40%.

2. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan formal seseorang dapat mempengaruhi cara dalam menyelesaikan pekerjaan, karena pendidikan seharusnya dapat mempengaruhi pola pikir dan tingkat analisa terhadap suatu permasalahan serta tingkat kreatifitas dalam menyelesaikan pekerjaan yang berpengaruh kepada prestasi kerja pegawai dan dapat menjadikan organisasi lebih efektif dan efisien. Berikut distribusi responden berdasarkan tingkat pendidikan :

Tabel V.2: Tingkat Pendidikan Responden Tim Pelaksana Program SLRT dan Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat Program SLRT di Kabupaten Siak Sri Indrapura

No	Tingkat Pendidikan	Responden				Jumlah	
		TPP SLRT		RTS-PM		Jlh	%
		Jlh	%	Jlh	%		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tidak Sekolah	-	-	8	16%	8	11%
2	SD Sederajat	-	-	13	26%	13	19%
3	SMP Sederajat	1	5%	17	34%	18	26%

4	SMA Sederajat	12	60%	11	22%	23	33%
5	S1	7	35%	1	2%	8	11%
6	S2	-	-	-	-	-	-
Jumlah		20	100%	50	100%	70	100%

Sumber : Data Olahan 2019.

Dari tabel V.2 dapat dilihat bahwa responden yang merupakan personil Tim Pelaksana SLRT memiliki 1 Orang atau sebesar 5%, 12 Orang atau sebesar 60% yang berpendidikan SMA sederajat, kemudian 7 Orang atau sebesar 35% yang berpendidikan S1. Pada umumnya Responden Tim Pelaksana Program SLRT memiliki tingkat pendidikan SMA/Sederajat yaitu 12 Orang atau 60%.

Sedangkan Rumah Tangga Sasaran memiliki tingkatan pendidikan yang tidak sekolah adalah sebanyak 8 Orang atau sebesar 16%, tingkat pendidikan Sekolah Dasar sebanyak 13 Orang atau sebesar 26%, Tingkat SMP/Sederajat sebanyak 17 Orang atau sebesar 34%, SMA/Sederajat sebanyak 11 Orang atau sebesar 22%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada umumnya Responden Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat memiliki tingkat pendidikan SMA/Sederajat dan Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat umumnya memiliki tingkat pendidikan SMP/Sederajat yaitu 17 Orang atau 34%..

3. Jenis Kelamin

Jenis kelamin dapat mempengaruhi sikap dan tingkah laku dari Responden dalam menghadapi suatu pekerjaan, dimana seorang pria biasanya lebih cepat daripada wanita, begitu juga wanita biasanya bekerja lebih rapi daripada pria dalam menentukan hasil kerja. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan, oleh karena itu diharapkan agar keduanya dapat saling mengisi dan melengkapi kekurangan sehingga terbentuk tim kerja yang solid.

Jenis kelamin juga dapat mempengaruhi emosional responden yang bersangkutan, dimana pria biasanya lebih cepat emosional daripada wanita. Perbedaan emosional dapat mempengaruhi hasil daripada sebuah pekerjaan. Untuk lebih jelasnya mengenai jenis kelamin responden pada penelitian Efektifitas Pelaksanaan Program Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) di Kabupaten Siak Sri Indrapura.

Tabel V.3 : Jenis Kelamin Responden Tim Pelaksana Program SLRT dan Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat Program SLRT di Kabupaten Siak Sri Indrapura

No	Klasifikasi Jenis Kelamin	Frekuensi (Orang)				Jumlah	
		TPP SLRT		RTS-PM		Jlh	%
		Jlh	%	Jlh	%		
1	Laki-laki	12	60%	37	74%	49	70%
2	Perempuan	8	40%	13	26%	21	30%
	Jumlah	20	100%	50	100%	70	100%

Sumber : Data Olahan 2019.

Dari tabel V.3 diatas menjelaskan bahwa Responden dari Tim Pelaksana Program SLRT memiliki 12 Orang Laki-Laki atau sebesar 60%, sedangkan klasifikasi Perempuan memiliki 8 Orang atau sebesar 40%, ini menunjukkan bahwa dalam Pelaksanaan Program SLRT terutama dalam Pengurusan Penerbitan SKTM bukan pekerjaan yang ringan dan sederhana, dibutuhkan tim kerja yang cepat, dan sigap ketika menemui masalah. Kemudian responden dari pihak rumah tangga sasaran memiliki 37 Orang atau sebesar 74% dan klasifikasi Perempuan memiliki 13 Orang atau sebesar 26%.

4. Masa Kerja

Masa kerja merupakan pengalaman yang dimiliki seorang pegawai dalam bekerja, yang mana dapat dikatakan bahwa semakin lama seseorang bekerja maka

semakin banyak pula pengalaman yang dimilikinya. Adapun jumlah responden Tim Pelaksana Program SLRT berdasarkan masa kerja dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel V.4 : Jumlah Responden berdasarkan Masa Kerja Tim Pelaksana Program SLRT di Kabupaten Siak Sri Indrapura

No	Masa Kerja (Tahun)	Frekuensi (Orang)	
		Tim Koordinasi Raskin Kecamatan	
		Jumlah	Persentase (%)
1	<5	3	15%
2	6-10	10	50%
3	11-15	5	25%
4	16-20	2	10%
5	21>	-	-
Jumlah		20	100%

Sumber : Data Olahan 2019.

Dari Tabel V.4 diatas menunjukkan bahwasanya Responden Tim Pelaksana Program SLRT yang paling banyak adalah pada masa kerja 6-10 Tahun yakni sebanyak 10 Orang atau sebesar 55%, dan pada masa Kerja 11-15 Tahun yaitu sebanyak 5 Orang atau sebesar 25%, kemudian pada masa kerja <5 Tahun sebanyak 3 Orang atau sebesar 15% dan 16-20 Tahun yaitu sebanyak 2 Orang atau sebesar 10%. Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa Masa Kerja Tim Pelaksana Program SLRT yang paling banyak yaitu pada Masa Kerja 6-10 Tahun yaitu sebanyak 10 Orang, Artinya Tim Pelaksana Program SLRT di Kabupaten Siak Sri Indrapura sudah mampu menjadikan Proses Pelaksanaan Program SLRT ini sesuai dengan Tujuan dan Maksud dari diadakannya Program SLRT ini sehingga dapat membantu masyarakat ekonomi menengah kebawah dapat mendapat layanan kesehatan dengan baik, karena Tim Pelaksana Program SLRT Kabupaten Siak memiliki masa kerja rata-rata lebih dari lima tahun keatas.

B. Hasil Penelitian Efektifitas Pelaksanaan Program Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) di Kabupaten Siak Sri Indrapura

Efektifitas Pelaksanaan Program Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) di Kabupaten Siak Sri Indrapura pada penelitian ini dapat dilihat dan dinilai dari lima indikator yang meliputi Pemahaman Program, Tepat Sasaran, Tepat Waktu, Tercapainya Tujuan, dan Perubahan Nyata. Untuk mengetahui dan menganalisis penilaian tentang Efektifitas Pelaksanaan Program Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) di Kabupaten Siak Sri Indrapura, maka dapat dilihat dari indikator variabel berikut ini :

1. Pemahaman Program

Pemahaman program artinya Tim Penyelenggara Program Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) telah diberikan pelatihan terlebih dahulu untuk melaksanakan Program SLRT, yang kemudian memberikan Informasi dan Pengenalan Program (sosialisasi) kepada masyarakat. Adapun tiga sub indikator yang dinilai yaitu Pelatihan kepada Tim Penyelenggara Program SLRT di Kabupaten/Kota dari Kementerian Sosial, Proses Pelaksanaan Program SLRT sesuai dengan Tata Laksana yang terdapat dalam Buku Pedoman Umum SLRT, dan Proses Sosialisasi dalam pengenalan program SLRT kepada Masyarakat.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan dari hasil kuisisioner oleh responden Tim Pelaksana Program SLRT yang berjumlah 20 orang yaitu (3 pegawai Front Office, 3 Pegawai Back Office, dan 14 Fasilitator) mengenai indikator Pemahaman Program terhadap Efektifitas Pelaksanaan Program Sistem

Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) di Kabupaten Siak Sri Indrapura, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel V.5 : Distribusi Tanggapan Responden Tim Pelaksana Program SLRT mengenai Indikator Pemahaman Program terhadap Efektifitas Pelaksanaan Program Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) di Kabupaten Siak Sri Indrapura

No	Item Pertanyaan	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Pemberian Informasi dan Pelatihan oleh Kementerian Sosial kepada Tim Pelaksana	12 (60%)	8 (40%)	-	20 (100%)
2	Bentuk Pelatihan yang diberikan oleh Kementerian Sosial	11 (55%)	8 (40%)	1 (5%)	20 (100%)
3	Pelaksanaan tugas sesuai dengan Tata Laksana Program SLRT	9 (45%)	10 (50%)	1 (5%)	20 (100%)
4	Pengurusan SKTM sesuai dengan Tata Laksana yang terdapat dalam buku Pedoman SLRT	10 (50%)	7 (35%)	3 (15%)	20 (100%)
5	Meratanya Sosialisasi yang diberikan kepada Masyarakat	14 (70%)	3 (15%)	3 (15%)	20 (100%)
6	Pemahaman Program dan Manfaat SLRT oleh Masyarakat	11 (55%)	7 (35%)	2 (10%)	20 (100%)
Jumlah		67	43	10	120
Rata-Rata		11	7	2	20
Persentase		55%	35%	10%	100%

Sumber : Data Olahan 2019.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jawaban dari 20 responden Tim Pelaksana Program SLRT terhadap item yang dinilai dalam indikator Pemahaman Program, jumlah nilai keseluruhan dari masing-masing kategori penilaian yang

terdiri dari Terlaksana dengan jumlah persentase 55%, Cukup Terlaksana dengan jumlah persentase 35%, dan Kurang Terlaksana dengan jumlah persentase 10%.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa Efektifitas Pelaksanaan Program SLRT di Kabupaten Siak dalam indikator Pemahaman Program dikategorikan **Cukup Terlaksana** dengan persentase 55%, dengan skala pengukuran 34-66%, ini dibuktikan dengan hasil kuisioner penulis pada tanggapan responden Tim Pelaksana Program SLRT.

Selanjutnya adapun hasil wawancara dengan Bapak Wan Idris, S.Sos., MM selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mengenai indikator Pemahaman Program, beliau menjelaskan bahwa :

“Kemensos sudah memberikan pelatihan kepada tim pelaksana di kabupaten, pelatihan diberikan pada tahun 2017 pada saat di rumuskannya program SLRT. Ini bertujuan agar tim SLRT itu bekerja sesuai SOP. Karena tiap bagian mempunyai fungsi masing-masing. Kemudian Tim Penyelenggara Program SLRT juga sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan buku Pedoman Umum SLRT, karena tiap tim telah memahami tugasnya sehingga sudah berhasil data di verifikasi dari Kemensos. Kemudian Tim Penyelenggara Program SLRT juga telah melakukan sosialisasi mengenai pengenalan Program SLRT kepada masyarakat, yaitu dalam bentuk musyawarah kampung yang dilakukan dari dinas pada kecamatan. Setiap 6 bulan sekali melakukan Muskam, jadi ada warga miskin baru atau sudah kaya dapat didata kembali, supaya kerja dinas sosial tercapai penerimanya tepat sasaran. Dengan adanya SLRT ini warga miskin dapat terbantu untuk mendapat layanan kesehatan, dulunya masyarakat yang tidak mampu sulit mendapat layanan kesehatan, tapi setelah adanya program SLRT ini masyarakat bisa mendapat layanan kesehatan secara gratis”. (Wawancara : Kamis, 10 Oktober 2019).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin diatas, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya program SLRT tersebut, warga miskin dapat terbantu untuk mendapat layanan

kesehatan, dulunya masyarakat yang tidak mampu sulit mendapat layanan kesehatan, tapi setelah adanya program SLRT ini masyarakat bisa mendapat layanan kesehatan secara gratis.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden masyarakat yang melakukan pengurusan program SLRT yang berjumlah 50 orang mengenai indikator Pemahaman Program terhadap Efektifitas Pelaksanaan Program Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) di Kabupaten Siak Sri Indrapura, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel V.6: Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat mengenai Indikator Pemahaman Program terhadap Efektifitas Pelaksanaan Program Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) di Kabupaten Siak Sri Indrapura

No	Item Pertanyaan	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Pemberian Informasi dan Pelatihan oleh Kementerian Sosial kepada Tim Pelaksana	9 (18%)	24 (48%)	17 (34%)	50 (100%)
2	Bentuk Pelatihan yang diberikan oleh Kementerian Sosial	14 (28%)	20 (20%)	16 (32%)	50 (100%)
3	Pelaksanaan tugas sesuai dengan Tata Laksana Program SLRT	12 (24%)	15 (30%)	23 (46%)	50 (100%)
4	Pengurusan SKTM sesuai dengan Tata Laksana yang terdapat dalam buku Pedoman SLRT	7 (14%)	22 (44%)	21 (42%)	50 (100%)
5	Meratanya Sosialisasi yang diberikan kepada Masyarakat	10 (20%)	14 (28%)	26 (52%)	50 (100%)
6	Pemahaman Program dan Manfaat SLRT oleh Masyarakat	11 (22%)	18 (36%)	21 (42%)	50 (100%)
Jumlah		63	113	124	300
Rata-Rata		11	19	20	50

Persentase	21%	38%	41%	100%
-------------------	------------	------------	------------	-------------

Sumber : Data Olahan 2019.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jawaban dari 50 responden masyarakat terhadap item yang dinilai dalam indikator Pemahaman Program, jumlah nilai keseluruhan dari masing-masing kategori penilaian yang terdiri dari: Terlaksana dengan jumlah persentase 21%, Cukup Terlaksana dengan jumlah persentase 38%, dan Kurang Terlaksana dengan jumlah persentase 41%.

Selanjutnya adapun hasil wawancara dengan Bapak Zulhadi (51 Tahun) mengenai indikator Pemahaman Program, beliau menjelaskan bahwa :

“Saya mengetahui Program SLRT ini dari omongan tetangga, awal-awalnya istri saya yang memberi tahu kepada saya sewaktu dia pergi berbelanja kepasar dan di beritahu oleh tetangga sekitar yang melihat spanduk. Dan kebetulan tiga hari setelah itu saya ada yang di urus di kantor desa, disana juga terdapat pemberitahuan mengenai program tersebut. Dan akan di adakannya sosialisasi kepada masyarakat. Tetapi saya kurang paham akan program tersebut hanya mengetahui manfaatnya dari membaca spanduk, dan mendengarkan omongan dari masyarakat sekitar.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa Efektifitas Pelaksanaan Program SLRT di Kabupaten Siak dalam indikator Pemahaman Program dikategorikan **Cukup Terlaksana** dengan persentase 41%, dengan skala pengukuran 34-66%, ini dibuktikan dengan hasil kuisisioner penulis pada tanggapan responden masyarakat yang melakukan pengurusan program SLRT.

Sehingga berdasarkan hasil tanggapan Tim Pelaksana program SLRT dan masyarakat melalui kuisisioner, maka dapat disimpulkan bahwa indikator Pemahaman Program dalam penelitian Efektifitas Pelaksanaan Program Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) di Kabupaten Siak Sri Indrapura berada pada kategori penilaian “Cukup Terlaksana” dengan jumlah rata-rata 20 (41%). Sesuai dengan penjelasan diawal tentang persentase sebesar 34% - 66% masuk dalam kategori Cukup Terlaksana.

Kemudian berdasarkan observasi yang peneliti lakukan mengenai indikator Pemahaman Program, peneliti melihat bahwa efektifitas pelaksanaan program SLRT di Kabupaten Siak Cukup Terlaksana namun, dilihat dari Penyelenggara Program SLRT masih terdapatnya masyarakat yang kurang paham akan Program SLRT dimana masyarakat hanya mengetahui program tersebut tidak berbeda jauh dari program kesehatan sebelumnya yang dimana diwajibkan untuk membayar iuran sedangkan Program SLRT tidak di perlukan iuran dari masyarakat perbulannya. Dari hal tersebut bisa di katakan kurang terlaksananya pemberian informasi mengenai isi dari Program SLRT tersebut, karena pada saat mewawancarai masyarakat rata-rata menyebutkan bahwa mengetahui program dari mulut ke mulut dan Selain itu masyarakat mengetahui dari tetangga atau warga yang datang dan hadir pada acara sosialisasi program SLRT tersebut.

Disamping itu, tidak ada penjelasan yang detail dari fasilitator untuk masyarakat yang tidak mengetahui program SLRT tersebut. Sosialisasi ada dilakukan, tetapi pemberitahuan adanya sosialisasi tidak dilakukan, kemudian jarak dan waktu untuk menghadiri jauh dan tidak tepat, sehingga masyarakat

banyak yang tidak hadir. Kemudian, dalam Buku Pedoman Umum SLRT Tahun 2016 Penulis membaca bahwa Fasilitator bertugas untuk mendatangi Rumah dari Masyarakat yang terolong ke dalam Rumah Tangga Sasaran untuk mendata jika masyarakat tersebut belum mendaftarkan dirinya, namun Peneliti melihat bahwasanya Fasilitator hanya menerima saja masyarakat yang datang untuk melakukan pengurusan namun belum mendatangi Rumah Masyarakat yang belum melakukan pengurusan seperti tugasnya yang terdapat dalam Buku Pedoman SLRT tahun 2016.

Dan berdasarkan data yang dimiliki penulis yaitu data masyarakat pengurus SKTM tahun 2018, bahwa masyarakat yang melakukan pengurusan paling sedikit yaitu masyarakat yang bertempat tinggal di kecamatan Kerinci Kanan yaitu sebanyak 24 Orang dan Sabak auh yaitu sebanyak 37 Orang. Termasuk ke dalam item pertanyaan poin 5 dan 6 pada variable Pemahaman Program, Karena pada saat membagikan kuisioner di kedua kecamatan ini peneliti menemukan hasil wawancara dengan masyarakat yaitu bapak Busriyal 43 tahun menyebutkan bahwa dia mengetahui program ini bukan dari hasil sosialisasi, tetapi hanya mengikuti salah satu tetangganya mengurus, dan bahkan banyak dari warga tempat tinggalnya belum mengurus program SLRT ini karena mereka mengira bahwa program ini sama dengan BPJS yaitu melakukan pembayaran iuran perbulan.

2. Tepat Sasaran

Tepat sasaran artinya pelaksanaan Program Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) ini telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tepat manfaat

kepada Rumah Tangga Sasaran. Adapun tiga sub indikator yang dinilai yaitu Terlaksananya proses pendataan sesuai dengan Kriteria Penerima Manfaat, Proses pendataan oleh Fasilitator sesuai dengan kriteria yang terdapat di dalam buku Pedoman Umum SLRT, dan Penerima Program sesuai dengan kuota pengurusan SKTM pada tiap tahunnya.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden Tim Pelaksana Program SLRT yang berjumlah 20 Orang mengenai indikator Tepat Sasaran terhadap Efektifitas Pelaksanaan Program Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) di Kabupaten Siak Sri Indrapura, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel V.7 : Distribusi Tanggapan Responden Tim Pelaksana Program SLRT mengenai Indikator Tepat Sasaran terhadap Efektifitas Pelaksanaan Program Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) di Kabupaten Siak Sri Indrapura

No	Item Pertanyaan	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Pendataan Rumah Tangga Sasaran oleh Fasilitator pada Kecamatan.	9 (45%)	7 (35%)	4 (20%)	20 (100%)
2	Kriteria Penerima Manfaat Program SLRT sesuai dengan Ketetapan	10 (50%)	9 (45%)	1 (5%)	20 (100%)
3	Penginputan Data berdasarkan BDT oleh Fasilitator	6 (30%)	10 (50%)	4 (20%)	20 (100%)
4	Ketidaksesuaian penerbitan SKTM dengan Kriteria	7 (35%)	11 (55%)	2 (10%)	20 (100%)
5	Pengetahuan Masyarakat mengenai Kuota Penerima SKTM	8 (40%)	7 (35%)	5 (25%)	20 (100%)
6	Tindakan Tim Pelaksana terhadap Kuota Pengurusan jika tidak terpenuhi/melebihi kuota	9 (45%)	8 (40%)	3 (15%)	20 (100%)

Jumlah Rata-Rata Persentase	49	52	19	120
	8	9	3	20
	41%	43%	16%	100%

Sumber : Data Olahan 2019.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jawaban dari 20 responden terhadap item yang dinilai dalam indikator Tepat Sasaran, jumlah nilai keseluruhan dari masing-masing kategori penilaian yang terdiri dari Terlaksana dengan jumlah persentase 41%, Cukup Terlaksana dengan jumlah persentase 43%, dan Kurang Terlaksana dengan jumlah persentase 16%.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa Efektifitas Pelaksanaan Program SLRT di Kabupaten Siak dalam indikator Tepat Sasaran dikategorikan **Cukup Terlaksana** dengan persentase 43%, dengan skala pengukuran 34-66%, ini dibuktikan dengan hasil kuisisioner penulis pada tanggapan responden Tim Pelaksana Program SLRT.

Selanjutnya adapun hasil wawancara dengan Bapak Wan Idris, S.Sos., MM selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mengenai indikator Tepat Sasaran, beliau menjelaskan bahwa :

“Peran kepala bidang SLRT hanya bertugas sebagai pengarah dan penanggung jawab, jadi hanya tim khusus (fasilitator) yang turun ke lapangan. Kemudian proses pendataan yang dilakukan fasilitator sudah sesuai kriteria, karena dalam kriteria saat ini sudah sesuai penerimanya. Adapun proses pengecekan SKTM yaitu kalau di lapangan fasilitator sudah melakukan pengecekan, kalau dia terdaftar di BDT, dia cukup bawa KK dari Dinsos tidak membawa surat keterangan dari desa. Kalau tidak terdaftar di BDT harus membawa fotocopy KK, SKTM asli dari desa, blangko verifikasi (yang diisi fasilitator), rujukan foto copy dari puskesmas. Dari sini dilihat adanya kerjasama dari dinas dan fasilitator kecamatan. Kemudian proses penerbitan SKTM sudah sesuai standar waktu, kendalanya saat ini hanya pada saat mati lampu karena kalau di

buat manual, surat rekom tidak bisa, karena pada pengurusan di desa sudah di cek fasilitator di BDT, dinas tetap harus cek di BDT dan JKM KIS kembali”. (Wawancara : Kamis, 10 Oktober 2019).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang SLRT diatas, dapat disimpulkan bahwa peran Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin hanya bertugas sebagai pengarah dan penanggung jawab, jadi hanya tim khusus (fasilitator) yang turun ke lapangan. Kemudian mengenai proses pendataan yang dilakukan fasilitator juga sudah sesuai kriteria, karena dalam kriteria saat ini sudah sesuai penerimanya.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden masyarakat yang melakukan pengurusan program SLRT yang berjumlah 50 orang mengenai indikator Tepat Sasaran terhadap Efektifitas Pelaksanaan Program Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) di Kabupaten Siak Sri Indrapura, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel V.8 : Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat mengenai Indikator Tepat Sasaran terhadap Efektifitas Pelaksanaan Program Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) di Kabupaten Siak Sri Indrapura

No	Item Pertanyaan	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Pendataan Rumah Tangga Sasaran oleh Fasilitator pada Kecamatan.	7 (14%)	20 (40%)	23 (46%)	50 (100%)
2	Pemahaman masyarakat terhadap Kriteria Penerima Manfaat Program SLRT	16 (32%)	13 (26%)	21 (42%)	50 (100%)
3	Penginputan data di Basis Data Terpadu (BDT) oleh fasilitator	20 (40%)	16 (32%)	14 (28%)	50 (100%)
4	Adanya Ketidaksesuaian penerbitan SKTM dengan Kriteria	11 (22%)	17 (34%)	22 (44%)	50 (100%)

5	Pengetahuan Masyarakat mengenai Kuota Penerima SKTM	19 (38%)	20 (40%)	11 (22%)	50 (100%)
6	Kinerja Tim Pelaksana terhadap Kuota Pengurusan jika tidak terpenuhi/melebihi kuota	14 (28%)	19 (38%)	17 (34%)	50 (100%)
Jumlah		87	105	108	300
Rata-Rata		15	17	18	50
Persentase		29%	35%	36%	100%

Sumber : Data Olahan 2019.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jawaban dari 50 responden masyarakat terhadap item yang dinilai dalam indikator Tepat Sasaran, jumlah nilai keseluruhan dari masing-masing kategori penilaian yang terdiri dari: Terlaksana dengan jumlah persentase 29%, Cukup Terlaksana dengan jumlah persentase 35%, dan Kurang Terlaksana dengan jumlah persentase 36%.

Selanjutnya adapun hasil wawancara dengan ibu Supini (36 Tahun) mengenai indikator Tepat Sasaran, beliau menjelaskan bahwa :

“Ya untuk Program SLRT sangat bagus di karenakan tujuan dari Program tersebut untuk masyarakat yang kurang mampu, tetapi saya lihat ada tetangga saya yang bisa di bilang mampu dan dia mendapatkan program tersebut.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa Efektifitas Pelaksanaan Program SLRT di Kabupaten Siak dalam indikator Tepat Sasaran dikategorikan **Cukup Terlaksana** dengan persentase 36%, dengan skala pengukuran 34-66%, ini dibuktikan dengan hasil kuisisioner penulis pada tanggapan responden masyarakat yang melakukan pengurusan program SLRT.

Sehingga berdasarkan hasil tanggapan responden Tim Pelaksana Program SLRT dan masyarakat melalui kuisisioner, maka dapat disimpulkan bahwa

indikator Tepat Sasaran dalam penelitian Efektifitas Pelaksanaan Program Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) di Kabupaten Siak Sri Indrapura berada pada kategori penilaian “Cukup Terlaksana” dengan jumlah rata-rata 18 (36%). Sesuai dengan penjelasan diawal tentang persentase sebesar 34% - 66% masuk dalam kategori Cukup Terlaksana.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan mengenai indikator Tepat Sasaran, peneliti melihat bahwa efektifitas pelaksanaan program SLRT di Kabupaten Siak Cukup Terlaksana namun kurang Efektif, Hal ini terlihat dari proses pendataan yang dilakukan fasilitator masih terdapat masyarakat yang ekonominya menengah ke atas dapat mendapatkan manfaat dari Program SLRT ini, karena dalam kriteria saat ini yang menerima manfaat adalah masyarakat yang ekonominya menengah kebawah. Kemudian adapun proses pengecekan SKTM yang di lakukan di lapangan belum sesuai karena pada saat penulis melakukan penelitian di Dinas Sosial masih mendapatkan Staff Front Office yang mengulang kembali pendataan karena masyarakat penerima manfaat terdaftar di BPJS regular atau iuran. Kemudian peneliti melihat bahwa masih ada masyarakat ekonomi kebawah yang tidak mendapatkan program SLRT, artinya ini kurang tepat sasaran. Karena apabila memang untuk masyarakat yang kurang mampu, maka masyarakat yang menerima program SLRT benar-benar masyarakat yang kurang mampu dan di data tanpa ada kecurangan sedikitpun. Karena ada masyarakat yang tergolong mampu namun mendapatkan program SLRT, ini artinya tidak tepat sasaran karena program ini diperuntukkan masyarakat ekonomi menengah kebawah. Selain itu masyarakat juga tidak mengetahui berapa kuota yang

mendapatkan program SLRT karena tidak mendapatkan informasi yang jelas baik dari pihak fasilitator, ataupun Dinas Sosial.

Sehingga berdasarkan hasil tanggapan responden Tim Pelaksana Program SLRT dan masyarakat melalui kuisioner, hasil wawancara dengan Kepala Bidang SLRT, serta hasil observasi peneliti dilapangan, maka dapat disimpulkan bahwa indikator Tepat Sasaran dalam penelitian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Program Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) di Kabupaten Siak Sri Indrapura berada pada kategori penilaian **“Cukup Terlaksana”** dengan persentase 36%. Sesuai dengan penjelasan diawal tentang persentase sebesar 34% - 66% masuk dalam kategori Cukup Terlaksana.

3. Tepat Waktu

Tepat waktu artinya pelaksanaan Proses Pengurusan dan Penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dalam Program Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) sesuai dengan Standar Waktu. Adapun sub indikator yang dinilai yaitu Pelaksanaan Penerbitan SKTM pada Program SLRT sesuai dengan Standar Waktu.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden Tim Pelaksana Program SLRT yang berjumlah 20 orang mengenai indikator Tepat Waktu terhadap Efektifitas Pelaksanaan Program Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) di Kabupaten Siak Sri Indrapura, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel V.9 : Distribusi Tanggapan Responden Tim Pelaksana Program SLRT mengenai Indikator Tepat Waktu terhadap Efektifitas Pelaksanaan Program Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) di Kabupaten Siak Sri Indrapura

No	Item Pertanyaan	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Pelaksanaan Pengurusan sesuai Standar Waktu	9 (45%)	7 (35%)	4 (20%)	20 (100%)
2	Pemberian informasi terhadap waktu perbaikan kesalahan pada engurusan SKTM	7 (35%)	10 (50%)	3 (15%)	20 (100%)
Jumlah		16	17	7	40
Rata-Rata		8	9	3	20
Persentase		40%	43%	17%	100%

Sumber : Data Olahan 2019.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jawaban dari 20 responden terhadap item yang dinilai dalam indikator Tepat Waktu, jumlah nilai keseluruhan dari masing-masing kategori penilaian yang terdiri dari Terlaksana dengan jumlah persentase 40%, Cukup Terlaksana dengan jumlah persentase 43%, dan Kurang Terlaksana dengan jumlah persentase 17%.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Program SLRT di Kabupaten Siak dalam indikator Tepat Waktu dikategorikan **Cukup Terlaksana** dengan persentase 43%, dengan skala pengukuran 34-66%, ini dibuktikan dengan hasil kuisisioner penulis pada tanggapan responden Tim Pelaksana Program SLRT.

Selanjutnya adapun hasil wawancara dengan Bapak Wan Idris, S.Sos., MM selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mengenai indikator Tepat Waktu, beliau menjelaskan bahwa :

“Dengan adanya program SLRT ini masyarakat menjadi sangat terbantu dan mengurangi beban mereka, masyarakat jadi bisa mendapat layanan kesehatan dengan baik. Kalau misalnya sakit jantung, kan berobat mahal,

jadi masyarakat bisa mendapat layanan kesehatan tanpa mengeluarkan biaya dan iuran perbulan. Kemudian pengambilan SKTM sudah sesuai dengan prosedur, karena dinas telah menekankan kepada bagian front office dan back office agar tidak menerima pungutan biaya atau dalam bentuk makanan, jadi harus adil. Jika terdapat penyimpangan, Dinsos menghubungi pihak desa untuk mengkonfirmasi langsung ke kecamatan terutama fasilitator, fasilitator bertanggung jawab terhadap pengurusan, seandainya belum terbit maka surat tidak dikeluarkan. Kemudian emangat kerjasama semua tim sangat baik, semua selalu berkoordinasi dari desa hingga dinas karena setiap permasalahan bisa diselesaikan secara bersama, karena kami mempunyai grup untuk sharing, semua petugas SLRT ada di dalam grup tersebut”. (Wawancara : Kamis, 10 Oktober 2019).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang SLRT diatas, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya program SLRT ini masyarakat miskin menjadi sangat terbantu dan mengurangi beban mereka, masyarakat jadi bisa mendapat layanan kesehatan dengan baik. Seperti misalnya sakit jantung, seperti kita ketahui bahwa berobat itu mahal, jadi masyarakat bisa mendapat layanan kesehatan tanpa mengeluarkan biaya dan iuran perbulan setelah mendapat program SLRT.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden masyarakat yang melakukan pengurusan program SLRT yang berjumlah 50 orang mengenai indikator Tepat Waktu terhadap Efektifitas Pelaksanaan Program Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) di Kabupaten Siak Sri Indrapura, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel V.10: Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat mengenai Indikator Tepat Waktu terhadap Efektifitas Pelaksanaan Program Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) di Kabupaten Siak Sri Indrapura

No	Item Pertanyaan	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Pelaksanaan Pengurusan sesuai Standar Waktu	20 (40%)	17 (34%)	13 (26%)	50 (100%)
2	Pemberian informasi terhadap waktu perbaikan kesalahan pada pengurusan SKTM	19 (38%)	15 (30%)	16 (32%)	50 (100%)
Jumlah		39	32	29	100
Rata-Rata		19	16	15	50
Persentase		39%	32%	29%	100%

Sumber : Data Olahan 2019.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jawaban dari 50 responden masyarakat terhadap item yang dinilai dalam indikator Tepat Waktu, jumlah nilai keseluruhan dari masing-masing kategori penilaian yang terdiri dari: Terlaksana dengan jumlah persentase 39%, Cukup Terlaksana dengan jumlah persentase 32%, dan Kurang Terlaksana dengan jumlah persentase 29%.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa Efektifitas Pelaksanaan Program SLRT di Kabupaten Siak dalam indikator Tepat Waktu dikategorikan **Cukup Terlaksana** dengan persentase 39%, dengan skala pengukuran 34-66%, ini dibuktikan dengan hasil kuisisioner penulis pada tanggapan responden masyarakat yang melakukan pengurusan program SLRT.

Selanjutnya adapun hasil wawancara dengan Bapak Dodi (51 Tahun) mengenai indikator Tepat Waktu, beliau menjelaskan bahwa :

“Untuk proses pengurusan nya waktu itu tidak begitu lama ya sekitaran satu minggu saja, dan yang saya rasakan waktu pengurusan sangat di permudah oleh orang dinas sosial. Namun pada saat memberikan

persyaratan kepada fasilitator saya agak sedikit kebingungan karena fasilitator tidak memberitahu informasi jelas apa yang harus saya lengkapi dan tidak diberitahu berapa jumlah yang harus saya fotocopy.”

Sehingga berdasarkan hasil tanggapan responden Tim Pelaksana Program SLRT dan masyarakat melalui kuisioner, maka dapat disimpulkan bahwa indikator Tepat Waktu dalam penelitian Efektifitas Pelaksanaan Program Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) di Kabupaten Siak Sri Indrapura berada pada kategori penilaian “Cukup Terlaksana” dengan jumlah rata-rata 19 (39%). Sesuai dengan penjelasan diawal tentang persentase sebesar 34% - 66% masuk dalam kategori Cukup Terlaksana.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan mengenai indikator Tepat Waktu, peneliti melihat bahwa efektifitas pelaksanaan program SLRT di Kabupaten Siak cukup terlaksana dengan baik, Karena pada saat Proses Pengurusan dan Penerbitan SKTM masyarakat tidak dipersulit, dan untuk mendapatkan persyaratan pengurusan tidak memakan waktu yang lama sehingga masyarakat yang sedang mengalami sakit dapat cepat mengobati karena telah mendapat layanan kesehatan dari salah satu manfaat diadakannya Program SLRT ini, dan kemudian pada saat meneliti peneliti menemukan masyarakat yang penyakitnya harus segera ditangani (operasi) namun yang melakukan pengurusan adalah pihak keluarga sendiri, dan menjelang SKTM terbit Dinas Sosial membuat surat keterangan agar penyakit tersebut bias diobati tanpa menunggu penerbitan SKTM. Namun terdapat juga kecurangan pada saat pengambilan SKTM, terutama masyarakat yang Tempat Tinggalnya jauh dari Kantor Dinas Sosial terutama

Masyarakat Kandis, Minas dan Perawang melakukan pengurusan penerbitan SKTM menggunakan jasa “calo”, hal ini dapat membuat terjadi kesalahan pengurusan karena pihak Dinas saat melakukan penerbitan tidak mengetahui keluhan apa yang diderita masyarakat tersebut, dan prosedur saat melakukan pengurusan itu seharusnya diurus oleh masyarakat itu sendiri ataupun diwakilkan kepala keluarga (untuk masyarakat yang harus segera ditangani dan tidak dapat mengurus sendiri ke kantor Dinas).

Sehingga berdasarkan hasil tanggapan responden Tim Pelaksana Program SLRT dan masyarakat melalui kuisioner, hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, serta hasil observasi peneliti dilapangan, maka dapat disimpulkan bahwa indikator Tepat Waktu dalam penelitian Efektifitas Pelaksanaan Program Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) di Kabupaten Siak Sri Indrapura berada pada kategori penilaian “Cukup Terlaksana” dengan persentase 39%. Sesuai dengan penjelasan diawal tentang persentase sebesar 34% - 66% masuk dalam kategori Cukup Terlaksana.

4. Tercapainya Tujuan

Tercapainya tujuan artinya pelaksanaan Program SLRT ini telah dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan buku pedoman umum SLRT. Adapun tiga sub indikator yang dinilai yaitu Pelaksanaan Program SLRT dapat membantu mengurangi beban masyarakat yang memiliki ekonomi menengah kebawah, Kesesuaian terhadap Prosedur Pengambilan Penerbitan SKTM, dan Terdapat Koordinasi antara Fasilitator dan Perangkat Desa dalam Pengurusan SKTM.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden Tim Pelaksana Program SLRT yang berjumlah 20 orang mengenai indikator Tercapainya Tujuan terhadap Efektifitas Pelaksanaan Program Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) di Kabupaten Siak Sri Indrapura, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.11: Distribusi Tanggapan Responden Tim Pelaksana Program SLRT mengenai Indikator Tercapainya Tujuan terhadap Efektifitas Pelaksanaan Program Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) di Kabupaten Siak Sri Indrapura

No	Item Pertanyaan	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Dampak Positif Pelaksanaan Program SLRT terhadap Masyarakat Penerima Manfaat	7 (35%)	8 (40%)	5 (25%)	20 (100%)
2	Kendala yang dirasakan oleh penerima manfaat setelah terdaftar sebagai Penerima Manfaat	5 (25%)	10 (50%)	5 (25%)	20 (100%)
3	Pengambilan Penerbitan SKTM sesuai dengan Prosedur	5 (25%)	9 (45%)	6 (30%)	20 (100%)
4	Tindakan jika terdapat penyimpangan pada pengurusan SKTM	4 (20%)	10 (50%)	6 (30%)	20 (100%)
5	Koordinasi antara Fasilitator dan Perangkat Desa	11 (55%)	9 (45%)	-	20 (100%)
6	Dampak Positif dari adanya kerjasama dengan Perangkat Desa	9 (45%)	9 (45%)	2 (10%)	20 (100%)
Jumlah		41	55	24	120
Rata-Rata		7	9	4	20
Persentase		34%	46%	20%	100%

Sumber : Data Olahan 2019.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jawaban dari 20 responden terhadap item yang dinilai dalam indikator Tercapainya Tujuan, jumlah nilai keseluruhan

dari masing-masing kategori penilaian yang terdiri dari Terlaksana dengan jumlah persentase 34%, Cukup Terlaksana dengan jumlah persentase 46%, dan Kurang Terlaksana dengan jumlah persentase 20%.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa Efektifitas Pelaksanaan Program SLRT di Kabupaten Siak dalam indikator Tercapainya Tujuan dikategorikan **Cukup Terlaksana** dengan persentase 46%, dengan skala pengukuran 34-66%, ini dibuktikan dengan hasil kuisioner penulis pada tanggapan responden Tim Pelaksana Program SLRT.

Selanjutnya adapun hasil wawancara dengan Bapak Wan Idris, S.Sos., MM selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mengenai indikator Tercapainya Tujuan, beliau menjelaskan bahwa :

“Jika terjadi penyimpangan kerja oleh tim koordinasi program SLRT, maka langsung saya ganti orangnya dan akan menunjuk petugas baru. Kemudian koordinasi SLRT kecamatan dan kelompok kerja telah memahami betul bidang dan perannya, karena setiap pengurusan dilalui dari proses desa sampai dinas. Jadi kerjasama untuk proses penginputan data masyarakat yang mengurus. Dengan adanya keikutsertaan perangkat desa seperti kepala dusun dan RT, ini sangat membantu, karena yang paling tahu betul miskin atau tidak masyarakat yang mengurus SLRT itu RT, bukan fasilitator. Jadi peran mereka sangat membantu. Perangkat desa juga sudah diberikan pelatihan, karena dengan adanya puskesmas pada tiap perangkat desa jadi membantu dan mereka sudah ikut bimtek, karena fasilitator kebanyakan dari perangkat desa”. (Wawancara : Kamis, 10 Oktober 2019).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin diatas, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya keikutsertaan perangkat desa seperti kepala dusun dan RT, hal ini sangat membantu tim pelaksana program SLRT, karena yang paling tahu mengenai

miskin atau tidak masyarakat yang mengurus SLRT itu adalah RT, bukan fasilitator. Jadi peran mereka perangkat desa sangat membantu dalam proses pelaksanaan program SLRT.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden masyarakat yang melakukan pengurusan program SLRT yang berjumlah 50 orang mengenai indikator Tercapainya Tujuan terhadap Efektifitas Pelaksanaan Program Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) di Kabupaten Siak Sri Indrapura, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel V.12: Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat mengenai Indikator Tercapainya Tujuan terhadap Efektifitas Pelaksanaan Program Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) di Kabupaten Siak Sri Indrapura

No	Item Pertanyaan	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Dampak Positif Pelaksanaan Program SLRT yang dirasa Masyarakat Penerima Manfaat	8 (16%)	29 (58%)	13 (26%)	50 (100%)
2	Kendala yang dirasakan oleh penerima manfaat setelah terdaftar sebagai Penerima Manfaat	11 (22%)	23 (46%)	16 (32%)	50 (100%)
3	Pengambilan Penerbitan SKTM sesuai dengan Prosedur	10 (20%)	13 (26%)	27 (54%)	50 (100%)
4	Tindakan jika terdapat penyimpangan pada pengurusan SKTM	12 (24%)	16 (32%)	22 (44%)	50 (100%)
5	Koordinasi antara Fasilitator dan Perangkat Desa	12 (24%)	25 (50%)	13 (26%)	50 (100%)
6	Dampak Positif dari adanya kerjasama dengan Perangkat Desa	17 (34%)	22 (44%)	11 (22%)	50 (100%)
Jumlah		70	128	102	300

Rata-Rata Persentase	12	21	17	50
	23%	43%	34%	100%

Sumber : Data Olahan 2019.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jawaban dari 50 responden masyarakat terhadap item yang dinilai dalam indikator Tercapainya Tujuan, jumlah nilai keseluruhan dari masing-masing kategori penilaian yang terdiri dari: Terlaksana dengan jumlah persentase 23%, Cukup Terlaksana dengan jumlah persentase 43%, dan Kurang Terlaksana dengan jumlah persentase 34%.

Selanjutnya adapun hasil wawancara dengan Bapak Surati (55 Tahun) mengenai indikator Tercapainya Tujuan, beliau menjelaskan bahwa :

“Saya merasakan pelayanan yang mudah setelah mendaftarkan diri di program SLRT tersebut. Dan waktu saya mengambil Surat SKTM saya minta tolong tetangga yang juga ingin mengambilnya di Dinas Sosial, di karenakan saat itu saya kerja. Kalau untuk peran perangkat desa hanya beberapa pegawainya saja yang menjelaskan mengenai syarat dan ketentuan pengurusan SKTM.”

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Program SLRT di Kabupaten Siak dalam indikator Tercapainya Tujuan dikategorikan Cukup Terlaksana dengan persentase 43%, dengan skala pengukuran 34-66%, ini dibuktikan dengan hasil kuisisioner penulis pada tanggapan responden masyarakat yang melakukan pengurusan program SLRT.

Sehingga berdasarkan hasil tanggapan responden Tim Pelaksana Program SLRT dan masyarakat melalui kuisisioner, maka dapat disimpulkan bahwa indikator Tercapainya Tujuan dalam penelitian Efektifitas Pelaksanaan Program

Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) di Kabupaten Siak Sri Indrapura berada pada kategori penilaian “**Cukup Terlaksana**” dengan jumlah rata-rata 21 (43%). Sesuai dengan penjelasan diawal tentang persentase sebesar 34% - 66% masuk dalam kategori Cukup Terlaksana.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan mengenai indikator Tercapainya Tujuan, peneliti melihat bahwa efektifitas pelaksanaan program SLRT di Kabupaten Siak cukup terlaksana dengan baik. Karena perangkat desa seperti kepala dusun dan RT di ikutsertakan dalam pelaksanaan program SLRT dan ini sangat membantu Dinas Sosial, karena yang paling tahu betul miskin atau tidak masyarakat yang mengurus SLRT itu RT, bukan fasilitator. Jadi peran perangkat desa sangat membantu. Akan tetapi terdapat penyimpangan yang terjadi seperti Pengambilan yang di wakil kan oleh pihak kedua dalam hal ini bisa dikatakan “*calo*” dan masih terjadi sampai penelitian ini saya lakukan. Seharusnya ada tindakan yang di lakukan atas penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada Program SLRT guna tercapainya tujuan dari Program SLRT tersebut.

Disamping itu, masih banyak masyarakat yang tergolong mampu atau ekonomi menengah keatas dan bahkan berprofesi sebagai ASN mendapatkan program program SLRT tersebut. Padahal sudah jelas bahwa program SLRT ini ditujukan untuk masyarakat yang kurang mampu. Ini artinya program SLRT tidak terlaksana sesuai yang telah direncanakan atau melenceng dari prosedur.

Pelayanan yang didapat oleh masyarakat menjadi lebih mudah dan tidak perlu membayar uang iuran perbulan seperti uang BPJS. Akan tetapi, mirisnya yang dialami oleh masyarakat yang berobat menggunakan SKTM, masyarakat

kurang dilayani di rumah sakit atau dipersulit dan pelayanannya sangat lambat. Meskipun demikian masyarakat tetap bersabar, karena yang terpenting bagi mereka adalah dapat berobat tanpa biaya atau gratis.

Sehingga berdasarkan hasil tanggapan responden Tim Pelaksana Program SLRT dan masyarakat melalui kuisisioner, hasil wawancara dengan Kepala Bidang SLRT, serta hasil observasi peneliti dilapangan, maka dapat disimpulkan bahwa indikator Tercapainya Tujuan dalam penelitian Efektifitas Pelaksanaan Program Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) di Kabupaten Siak Sri Indrapura berada pada kategori penilaian “Cukup Terlaksana” dengan persentase 43%. Sesuai dengan penjelasan diawal tentang persentase sebesar 34% - 66% masuk dalam kategori Cukup Terlaksana.

Sesuai dengan Fenomena yang penulis lampirkan yaitu masih terdapat masyarakat yang menggunakan jasa calo pada saat pengurusan penerbitan SKTM, dapat dibuktikan dengan hasil kuisisioner yaitu pada variable Tercapainya Tujuan, pada item pertanyaan ke 3 dan 4, bahwa masih banyak masyarakat yang menyebutkan melakukan pengurusan dengan menggunakan jasa calo, dengan alasan jarak tempuh yang jauh dan juga kebanyakan masyarakat lebih menentingkan pekerjaannya yang sulit untuk ditinggalkan. Berdasarkan hasil biodata pada kuisisioner masyarakat, penulis menemukan bahwa masyarakat yang kebanyakan menggunakan jasa calo yaitu masyarakat yang bertempat Tinggal di Kecamatan Kandis dan Sungai Apit. Kandis memiliki jarak tempuh ke Kabupaten Siak yaitu 78,6Km dan jarak Sungai Apit ke Siak yaitu 67,2 Km. Jadi alasan

masyarakat yang menggunakan calo adalah faktor jarak dan tidak dapat meninggalkan pekerjaan mereka.

5. Perubahan Nyata

Perubahan nyata artinya dengan dilaksanakannya program SLRT ini dapat membuat masyarakat mendapatkan Layanan Kesehatan dan membantu meminimalisir angka kemiskinan. Adapun sub indikator yang dinilai yaitu Masyarakat dapat memperoleh Layanan Kesehatan dan Mengurangi angka kemiskinan di masyarakat.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden Tim Pelaksana Program SLRT yang berjumlah 20 orang mengenai indikator Perubahan Nyata terhadap Efektifitas Pelaksanaan Program Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) di Kabupaten Siak Sri Indrapura, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel V.13: Distribusi Tanggapan Responden Tim Pelaksana Program SLRT mengenai Indikator Perubahan Nyata terhadap Efektifitas Pelaksanaan Program Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) di Kabupaten Siak Sri Indrapura

No	Item Pertanyaan	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Perubahan Nyata yang dirasakan masyarakat melalui pelaksanaan Program SLRT	11 (55%)	8 (40%)	1 (5%)	20 (100%)
2	Perubahan Rasio Angka Kemiskinan melalui Program SLRT	9 (45%)	8 (40%)	3 (15%)	20 (100%)
Jumlah		20	16	4	40
Rata-Rata		10	8	2	20
Persentase		50%	40%	10%	100%

Sumber : Data Olahan 2019.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jawaban dari 20 responden terhadap item yang dinilai dalam indikator Perubahan Nyata, jumlah nilai keseluruhan dari masing-masing kategori penilaian yang terdiri dari Terlaksana dengan jumlah persentase 50%, Cukup Terlaksana dengan jumlah persentase 40%, dan Kurang Terlaksana dengan jumlah persentase 10%.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa Efektifitas Pelaksanaan Program SLRT di Kabupaten Siak dalam indikator Perubahan Nyata dikategorikan **Cukup Terlaksana** dengan persentase 50%, dengan skala pengukuran 34-66%, ini dibuktikan dengan hasil kuisioner penulis pada tanggapan responden Tim Pelaksana Program SLRT.

Selanjutnya adapun hasil wawancara dengan Bapak Wan Idris, S.Sos., MM selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mengenai indikator Perubahan Nyata, beliau menjelaskan bahwa :

“Program SLRT sudah terlaksana dengan efektif dan efisien. Namun jika ada kesalahan dalam pelaksanaan, akan segera di perbaiki, alasannya yaitu kekurangan faktor SDM di lapangan, jika banyak urusan di lapangan berbelit itu akan segera saya benahi. Saya tidak pernah turun langsung ke lapangan, karena yang berinteraksi langsung sudah ada tim yang dibentuk yaitu fasilitator, karena waktu tidak memadai untuk berinteraksi langsung kepada masyarakat. Jika ada keluhan dan kritik dari masyarakat, nanti bagian front office menghubungi petugas di lapangan, apa penyebab terjadinya masyarakat mengeluh atau mengkritik, seandainya masyarakat tidak mengerti akan dibantu dan akan ada koordinasi dari dinas kepada tim lapangan, atau diintegrasikan ulangnya. Adapun langkah agar pelaksanaan SLRT bisa lebih efektif dan efisien, jadi jamkesda ditiadakan untuk masyarakat namun diganti dengan KIS APBD, jadi Pemda Siak bekerjasama dengan BPJS, Pemda Siak membayarkan iuran BPJS untuk masyarakat kelas III, kuota terbaru untuk masyarakat penerima sebanyak 54.000 jiwa yang baru diusulkan, tiap bulan biaya BPJS ditanggung Pemda Siak untuk seumur hidup. Hal ini

untuk mengurangi penunggakan di BPJS, makanya dibuat kerjasama Pemda Siak dgn BPJS, ini insya Allah dimulai tahun 2020". (Wawancara : Kamis, 10 Oktober 2019).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin diatas, dapat disimpulkan bahwa program SLRT sudah terlaksana dengan efektif dan efisien. Namun jika ada kesalahan dalam pelaksanaan, maka akan segera di perbaiki, alasannya yaitu kekurangan faktor SDM di lapangan, jika banyak urusan di lapangan berbelit itu akan segera di benahi langsung oleh atasan. Jika ada keluhan dan kritik dari masyarakat, nanti bagian front office menghubungi petugas di lapangan, apa penyebab terjadinya masyarakat mengeluh atau mengkritik, seandainya masyarakat tidak mengerti akan dibantu dan akan ada koordinasi dari dinas kepada tim lapangan, atau diintegrasikan ulangnya.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden masyarakat yang melakukan pengurusan program SLRT yang berjumlah 50 orang mengenai indikator Perubahan Nyata terhadap Efektifitas Pelaksanaan Program Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) di Kabupaten Siak Sri Indrapura, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel V.14: Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat mengenai Indikator Perubahan Nyata terhadap Efektifitas Pelaksanaan Program Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) di Kabupaten Siak Sri Indrapura

No	Item Pertanyaan	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Perubahan Nyata yang dirasakan masyarakat melalui pelaksanaan Program SLRT	13 (26%)	25 (50%)	12 (24%)	50 (100%)

2	Perubahan Rasio Angka Kemiskinan melalui Program SLRT	14 (28%)	28 (56%)	8 (16%)	50 (100%)
Jumlah		27	53	20	100
Rata-Rata		13	27	10	50
Persentase		27%	53%	20%	100%

Sumber : Data Olahan 2019.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jawaban dari 50 responden masyarakat terhadap item yang dinilai dalam indikator Perubahan Nyata, jumlah nilai keseluruhan dari masing-masing kategori penilaian yang terdiri dari: Terlaksana dengan jumlah persentase 27%, Cukup Terlaksana dengan jumlah persentase 53%, dan Kurang Terlaksana dengan jumlah persentase 20%.

Selanjutnya adapun hasil wawancara dengan Ibu Santi (29 Tahun) mengenai indikator Perubahan Nyata, beliau menjelaskan bahwa :

“Untuk sakit dan pengobatan sedikit membantu, tanpa harus membayar iuran perbulan, dan membantu untuk kami masyarakat miskin untuk mengecek penyakit apa yang sedang kami rasakan tanpa harus membayar biaya pengobatan lagi.”

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa Efektifitas Pelaksanaan Program SLRT di Kabupaten Siak dalam indikator Perubahan Nyata dikategorikan **Cukup Terlaksana** dengan persentase 53% dengan skala pengukuran 34-66%, ini dibuktikan dengan hasil kuisisioner penulis pada tanggapan responden masyarakat yang melakukan pengurusan program SLRT.

Sehingga berdasarkan hasil tanggapan responden Tim Pelaksana Program SLRT dan masyarakat melalui kuisisioner, maka dapat disimpulkan bahwa indikator Perubahan Nyata dalam penelitian Efektifitas Pelaksanaan Program

Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) di Kabupaten Siak Sri Indrapura berada pada kategori penilaian “Cukup Terlaksana” dengan jumlah rata-rata 27 (53%). Sesuai dengan penjelasan diawal tentang persentase sebesar 34% - 66% masuk dalam kategori Cukup Terlaksana.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan mengenai indikator Perubahan Nyata, peneliti melihat bahwa efektifitas pelaksanaan program SLRT di Kabupaten Siak cukup Terlaksana dengan baik. Dimana untuk pengukuran rasio angka kemiskinan berdasarkan tingkat ekonomi masyarakat di daerah tersebut, masalah peningkatan ekonomi masyarakat bisa dimulai dari tingkat kesehatan masyarakat daerah tersebut. Dengan kesehatan yang mereka miliki dapat membuat aktivitas berkerja untuk meningkatkan perekonomian mereka bisa berjalan dengan baik dan aktivitas mereka tidak terhambat dalam berkerja demi meningkat kan perekonomian. Berbanding terbalik jika kesehatan atau pelayanan kesehatan yang mereka dapatkan tidak layak, bagaimana mereka bisa beraktivitas secara efektif dengan kondisi yang tidak sehat di tambah dengan pelayanan yang susah di dapatkan.

Sehingga berdasarkan hasil tanggapan responden Tim Pelaksana Program SLRT dan masyarakat melalui kuisisioner, hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, serta hasil observasi peneliti dilapangan, maka dapat disimpulkan bahwa indikator Perubahan Nyata dalam penelitian Efektifitas Pelaksanaan Program Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) di Kabupaten Siak Sri Indrapura berada pada kategori penilaian “Cukup

Terlaksana” dengan persentase 53%. Sesuai dengan penjelasan diawal tentang persentase sebesar 34% - 66% masuk dalam kategori Cukup Terlaksana.

Selanjutnya untuk mengetahui hasil rekapitulasi tanggapan responden Tim Pelaksana Program SLRT yang berjumlah 16 orang terhadap Efektifitas Pelaksanaan Program Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) di Kabupaten Siak Sri Indrapura dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.15 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Tim Pelaksana Program SLRT terhadap Efektifitas Pelaksanaan Program Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) di Kabupaten Siak Sri Indrapura

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Pemahaman Program	11 (55%)	7 (35%)	2 (10%)	20 (100%)
2	Tepat Sasaran	8 (41%)	9 (43%)	3 (16%)	20 (100%)
3	Tepat Waktu	8 (40%)	9 (43%)	3 (17%)	20 (100%)
4	Tercapainya Tujuan	7 (34%)	9 (46%)	4 (20%)	20 (100%)
5	Perubahan Nyata	10 (50%)	8 (40%)	2 (10%)	20 (100%)
Jumlah		44	42	14	100
Rata-rata		9	8	3	20
Persentase		44%	42%	14%	100%
Skala Pengukuran		34-66%			
Kategori		Cukup Terlaksana			

Sumber : Data Olahan 2019.

Dari tabel diatas mengenai rekapitulasi tanggapan responden Tim Pelaksana Program SLRT yang berjumlah 20 orang, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Efektifitas Pelaksanaan Program Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) di Kabupaten Siak Sri Indrapura dikategorikan Cukup Terlaksana dengan total

persentase sebesar 44%. Sesuai dengan penjelasan diawal pada bab dua tentang persentase sebesar 34%-66% masuk dalam kategori Cukup Terlaksana.

Berdasarkan hasil tanggapan responden Tim Pelaksana Program SLRT diatas, dijelaskan bahwa pelaksanaan program SLRT sudah cukup terlaksana dengan baik dan cukup efektif. Karena penyelenggara Program SLRT juga sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan buku Pedoman Umum SLRT, karena tiap tim telah memahami tugasnya sehingga sudah berhasil data di verifikasi dari Kemensos. Kemudian Tim Penyelenggara Program SLRT juga telah melakukan sosialisasi mengenai pengenalan Program SLRT kepada masyarakat, yaitu dalam bentuk musyawarah kampung yang dilakukan dari dinas pada kecamatan. Setiap 6 bulan sekali melakukan Muskam, jadi ada warga miskin baru atau sudah kaya dapat didata kembali, supaya kerja dinas sosial tercapai penerimanya tepat sasaran.

Dengan adanya program SLRT ini warga miskin dapat terbantu untuk mendapat layanan kesehatan, dulunya masyarakat yang tidak mampu sulit mendapat layanan kesehatan, tapi setelah adanya program SLRT ini masyarakat bisa mendapat layanan kesehatan secara gratis. Kemudian proses pendataan yang dilakukan fasilitator juga sudah sesuai kriteria, karena dalam kriteria saat ini sudah sesuai penerimanya. Kemudian proses pendataan yang dilakukan fasilitator sudah sesuai kriteria, karena dalam kriteria saat ini sudah sesuai penerimanya.

Kemudian dengan adanya program SLRT ini masyarakat menjadi sangat terbantu dan mengurangi beban mereka, masyarakat jadi bisa mendapat layanan kesehatan dengan baik. Mengingat biaya berobat sangat mahal, apalagi seperti

sakit jantung, jadi masyarakat bisa mendapat layanan kesehatan tanpa mengeluarkan biaya dan iuran perbulan. Kemudian saat pengambilan SKTM sudah sesuai dengan prosedur, karena dinas telah menekankan kepada bagian front office dan back office agar tidak menerima pungutan biaya atau dalam bentuk makanan, jadi harus melayani dengan sangat adil.

Selain itu, perangkat desa seperti kepala dusun dan RT juga di ikutsertakan dalam pelaksanaan program SLRT dan ini sangat membantu Dinas Sosial, karena yang benar-benar mengetahui mengenai status miskin atau tidak masyarakat yang mengurus SLRT itu RT, bukan fasilitator. Sehingga peran perangkat desa sangat membantu dalam program SLRT ini. Perangkat desa juga sudah diberikan pelatihan, karena dengan adanya puskesmas pada tiap perangkat desa jadi membantu dan mereka sudah ikut bimtek, karena fasilitator kebanyakan dari perangkat desa.

Kemudian program SLRT juga sudah terlaksana dengan efektif dan efisien. Jika ada kesalahan dalam proses pelaksanaan, maka akan segera di perbaiki oleh atasan. Apabila banyak urusan di lapangan yang berbelit atau bermasalah maka Kepala Dinas segera membenahinya. Kepala Dinas tidak pernah turun langsung ke lapangan, karena yang berinteraksi langsung sudah ada tim yang dibentuk yaitu fasilitator. Kemudian jika ada keluhan dan kritik dari masyarakat saat pengurusan SKTM, maka bagian front office menghubungi petugas di lapangan, kemudian mencari penyebab terjadinya masyarakat mengeluh atau mengkritik, seandainya masyarakat tidak mengerti akan dibantu dan akan ada koordinasi dari dinas kepada tim lapangan, atau di integrasi ulang datanya.

Selanjutnya untuk mengetahui hasil rekapitulasi tanggapan responden masyarakat yang mengurus program SLRT sebanyak 50 orang terhadap penelitian Efektifitas Pelaksanaan Program Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) di Kabupaten Siak Sri Indrapura dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.16 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Masyarakat terhadap Efektifitas Pelaksanaan Program Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) di Kabupaten Siak Sri Indrapura

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Pemahaman Program	11 (21%)	19 (38%)	20 (41%)	50 (100%)
2	Tepat Sasaran	15 (29%)	17 (35%)	18 (36%)	50 (100%)
3	Tepat Waktu	19 (39%)	16 (32%)	15 (29%)	50 (100%)
4	Tercapainya Tujuan	12 (23%)	21 (43%)	17 (34%)	50 (100%)
5	Perubahan Nyata	13 (27%)	27 (53%)	10 (20%)	50 (100%)
Jumlah		70	100	80	250
Rata-rata		14	20	16	50
Persentase		28%	40%	32%	100%
Skala Pengukuran		34-66%			
Kategori		Cukup Terlaksana			

Sumber : Data Olahan 2019.

Dari tabel diatas mengenai rekapitulasi tanggapan responden masyarakat sebanyak 50 orang, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Efektifitas Pelaksanaan Program Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) di Kabupaten Siak Sri Indrapura dikategorikan Cukup Terlaksana dengan total persentase sebesar 40%. Sesuai dengan penjelasan diawal pada bab dua tentang persentase sebesar 34% - 66% masuk dalam kategori Cukup Terlaksana.

Berdasarkan hasil tanggapan responden masyarakat yang mengurus program SLRT diatas, dijelaskan bahwa pelaksanaan kebijakan program SLRT sudah

cukup terlaksana, namun sedikit kurang efektif. Karena masyarakat mengetahui informasi tentang adanya program SLRT hanya dari papan informasi yang ada di Kantor Kepala Desa. Disamping itu, tidak ada penjelasan yang detail dari fasilitator untuk masyarakat yang tidak mengetahui program SLRT tersebut. Sosialisasi ada, tetapi jarak dan waktu untuk menghadiri jauh dan tidak tepat, sehingga masyarakat banyak yang tidak hadir. Selain itu masyarakat hanya mengetahui dari tetangga atau warga yang datang dan hadir pada acara sosialisasi program SLRT tersebut.

Selain itu masih ada masyarakat ekonomi kebawah yang tidak mendapatkan program SLRT, artinya ini kurang tepat sasaran. Karena apabila memang untuk masyarakat yang kurang mampu, maka masyarakat yang menerima program SLRT benar-benar masyarakat yang kurang mampu dan di data tanpa ada kecurangan sedikitpun. Karena ada masyarakat yang tergolong mampu namun mendapatkan program SLRT, ini artinya tidak tepat sasaran karena program ini diperuntukkan masyarakat ekonomi menengah kebawah. Selain itu masyarakat juga tidak mengetahui berapa kuota yang mendapatkan program SLRT karena tidak mendapatkan informasi yang jelas.

Kemudian beberapa masyarakat yang tempat tinggalnya didaerah pelosok sehingga jarak tempuhnya jauh menuju ke kantor dinas sosial dan tidak mempunyai banyak waktu karena mereka sibuk dengan pekerjaannya, jadi jika ada kesalahan atau pengambilan minta tolong ke warga yang ingin mengambil ke kantor dinas sosial atau ada urusan ke Siak. Kemudian terkadang ada terjadi

kesalahan data dan harus kembali mengurus ke perangkat desa dan kecamatan, hal itu yang membuat masyarakat menjadi malas untuk mengurus program SLRT.

Akan tetapi, mirisnya yang dialami oleh masyarakat yang berobat menggunakan SKTM, masyarakat kurang dilayani di rumah sakit atau dipersulit dan pelayanannya sangat lambat. Meskipun demikian masyarakat tetap bersabar, karena yang terpenting bagi mereka adalah dapat berobat tanpa biaya atau gratis. Disamping itu juga masih banyak masyarakat yang tergolong mampu atau ekonomi menengah keatas dan bahkan berprofesi sebagai ASN mendapatkan program program SLRT tersebut. Padahal sudah jelas bahwa program SLRT ini ditujukan untuk masyarakat yang kurang mampu.

Sehingga peneliti menyimpulkan bahwa program SLRT sudah cukup terlaksana dengan baik, namun kurang efektif. Dalam artian, program SLRT belum terlaksana sesuai dengan yang telah ditetapkan atau melenceng dari prosedur, karena masih banyak masyarakat kurang mampu yang tidak mendapatkan program SLRT, dan justru malah masyarakat yang tergolong mampu seperti yang berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) juga mendapatkan program Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT). Hal ini berarti terdapat kesalahan teknis dalam proses pelaksanaan program SLRT, baik itu secara sengaja maupun tidak sengaja.

C. Faktor Penghambat Efektifitas Pelaksanaan Program Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) di Kabupaten Siak Sri Indrapura

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat diketahui beberapa hal yang menjadi faktor penghambat Efektifitas Pelaksanaan Program

Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) di Kabupaten Siak Sri Indrapura, yaitu sebagai berikut :

1. Masih banyak masyarakat menengah kebawah yang tidak mendapatkan program SLRT, tapi justru malah masyarakat yang tergolong mampu seperti yang berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) juga ikut mendapatkan program Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT). Ini berarti program SLRT kurang tepat sasaran.
2. Masyarakat yang berobat menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) kurang dilayani di rumah sakit, masyarakat seakan dipersulit dalam berobat dan proses penanganannya juga sangat lambat. Ini berarti program SLRT tidak berjalan efektif bagi masyarakat yang tidak mampu.
3. Faktor wilayah Administrasi pada saat melakukan pengurusan SKTM, karena kebanyakan masyarakat memiliki tempat tinggal yang jaraknya cukup jauh dari Kantor Dinas Sosial, kemudian masyarakat yang susah untuk meninggalkan pekerjaannya, maka dari itu masyarakat cukup tertarik untuk menggunakan jasa calo pada saat melakukan pengurusan SKTM untuk mendapatkan layanan kesehatan secara gratis.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan mengenai Efektifitas Pelaksanaan Program Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) di Kabupaten Siak Sri Indrapura, banyak yang telah peneliti temui berdasarkan observasi langsung ke lapangan, wawancara dan kuisioner yang telah peneliti berikan kepada seluruh responden yang diperlukan dengan lima indikator yaitu Pemahaman Program, Tepat Sasaran, Tepat Waktu, Tercapainya Tujuan, dan Perubahan Nyata, dengan itu peneliti telah menarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Dari seluruh jawaban responden pada indikator variabel Pemahaman Program dikategorikan Cukup Terlaksana, karena fasilitator tidak menjelaskan dengan detail kepada masyarakat mengenai program SLRT, masyarakat hanya mengetahui dari papan informasi yang ada di Kantor Kepala Desa papan informasi yang ada di Kantor Kepala Desa setempat.
2. Dari seluruh jawaban responden pada indikator variabel Tepat Sasaran dikategorikan Cukup Terlaksana, karena kepala dusun dan RT diikutsertakan dalam pelaksanaan program SLRT, karena yang benar-benar mengetahui tentang status miskin atau tidaknya masyarakat yang mengurus SLRT itu adalah RT dan kepala dusun.
3. Dari seluruh jawaban responden pada indikator variabel Tepat Waktu dikategorikan Cukup Terlaksana, karena beberapa masyarakat sibuk dengan

pekerjaan mereka masing-masing, sehingga tidak sempat untuk mengikuti sosialisasi tentang program SLRT, selain itu juga disebabkan karena jarak tempat tinggal mereka yang jauh dari Kantor Dinas Sosial.

4. Dari seluruh jawaban responden pada indikator variabel Tercapainya Tujuan dikategorikan Cukup Terlaksana, karena masih banyak masyarakat menengah kebawah yang tidak mendapatkan program SLRT, tapi justru malah masyarakat yang tergolong mampu seperti yang berprofesi sebagai ASN juga ikut mendapatkan program SLRT.
5. Dari seluruh jawaban responden pada indikator variabel Perubahan Nyata dikategorikan Cukup Terlaksana, karena masyarakat yang berobat menggunakan SKTM kurang dilayani di rumah sakit, masyarakat seakan dipersulit dalam berobat dan proses penanganannya juga sangat lambat.
6. Dari hasil penelitian yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa Efektifitas Pelaksanaan Program Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) di Kabupaten Siak Sri Indrapura berada pada kategori Cukup Terlaksana.
7. Faktor penghambat Efektifitas Pelaksanaan Program Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) di Kabupaten Siak Sri Indrapura yaitu:
 - a. Masih banyak masyarakat menengah kebawah yang tidak mendapatkan program SLRT, tapi justru malah masyarakat yang tergolong mampu seperti yang berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) juga ikut mendapatkan program Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT). Ini berarti program SLRT kurang tepat sasaran.

- b. Masyarakat yang berobat menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) kurang dilayani di rumah sakit, masyarakat seakan dipersulit dalam berobat dan proses penanganannya juga sangat lambat. Ini berarti program SLRT tidak berjalan efektif bagi masyarakat yang tidak mampu.
- c. Faktor wilayah Administrasi pada saat melakukan pengurusan SKTM, karena kebanyakan masyarakat memiliki tempat tinggal yang jaraknya cukup jauh dari Kantor Dinas Sosial, kemudian masyarakat yang susah untuk meninggalkan pekerjaannya, maka dari itu masyarakat cukup tertarik untuk menggunakan jasa calo pada saat melakukan pengurusan SKTM untuk mendapatkan layanan kesehatan secara gratis.

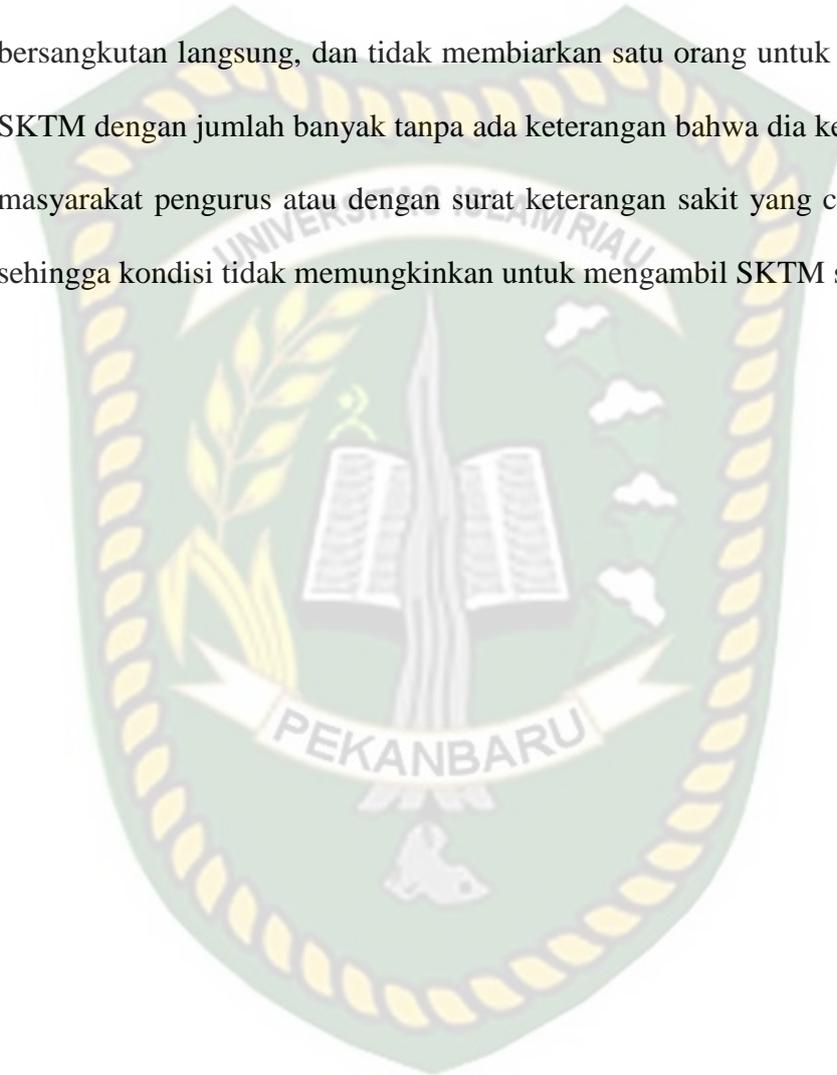
B. Saran

Adapun saran yang dapat dikemukakan sehubungan dengan hasil penelitian ini yaitu :

1. Disarankan kepada Dinas Sosial Kabupaten Siak agar dapat melaksanakan program SLRT secara professional, adil dan merata, yaitu dengan mendata masyarakat miskin secara teliti, sehingga program SLRT dapat tepat sasaran kepada masyarakat benar-benar membutuhkan, yakni masyarakat menengah kebawah, bukan masyarakat menengah keatas.
2. Disarankan kepada pihak rumah sakit agar dapat bersikap professional dalam melayani masyarakat yang berobat menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), tidak mempersulit masyarakat dalam berobat dan menangani pasien dengan cepat. Masyarakat miskin juga berhak

mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak, karena mereka juga sudah terdaftar dalam program SLRT.

3. Disarankan kepada Dinas Sosial agar memberikan SKTM kepada yang bersangkutan langsung, dan tidak membiarkan satu orang untuk mengambil SKTM dengan jumlah banyak tanpa ada keterangan bahwa dia keluarga dari masyarakat pengurus atau dengan surat keterangan sakit yang cukup parah sehingga kondisi tidak memungkinkan untuk mengambil SKTM sendiri.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdi dan Usman. 2006. *Metodologi Penelitian sosial dan Ekonomi Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta.
- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Handayani, S. 2001. *Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Gunung Agung.
- Hasibuan, Malayu. 2014. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- _____. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Islamy, Irfan, 2009. *Kebijakan Publik*. Jakarta : Universitas Terbuka.
- Keban. T. Yeremias. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*. Yogyakarta, Gava Media.
- Kusdi, 2009. *Teori Organisasi dan Administrasi*. Jakarta : Salemba Humanika.
- Manullang, M. 2001. *Pengantar Manajemen*. Pekanbaru: Arjuna Riau Grafindo.
- Nawawi, Hadari. 2003. *Kepemimpinan Mengefektifkan Organisasi*. Jakarta : Gajah Mada Press.
- Nogi S. Tangkilisan, Hessel. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta : PT. Grasindo.
- Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta.
- _____. 2014. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Siagian, P. Sondang. 2003. *Filsafat Administrasi*. Jakarta : Bumi Aksara.
- _____. 2008. *Filsafat Administrasi*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Siswanto, 2005. *Pengantar Manajemen*. Bandung: Bumi Aksara.
- Sosial, Kementrian RI. 2016. *Pedoman Umum Pelaksanaan SLRT*. Jakarta: Kementrian Sosial Republik Indonesia.
- Streers, M. Richard. 1985. *Efektifitas Organisasi*. Jakarta : Erlangga.
- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian dilengkapi dengan metode R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suharto, Edy. 2005. *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.

Sutrisno, Edy. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Prenada Media Group.

_____. 2007. *Budaya Organisasi*. Jakarta : Kencana.

Syafiie, Inu Kencana. 2010. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta : Rineka Cipta.

Syafri, Wirman. 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jakarta: Erlangga.

Tachjan, 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Alfi Bandung.

Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2002. *Kebijakan dan Manajemen Daerah*. Yogyakarta: Lukman Offset.

Usman, Husaini. 2013. *Manajemen Teori, Praktek dan Riset Pendidikan*. Jakarta : Bumi Aksara.

Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik Teori & Proses*. Yogyakarta : Media Pressindo.

Yani, M. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Mitra Wacana.

Zulkifli, Awang, Azam. dkk. 2013. *Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian Skripsi dan Kertas Kerja Mahasiswa*. Pekanbaru: Fisipol UIR.

_____. 2005. *Pengantar Studi Administrasi dan Manajemen*. Pekanbaru : UIR Press.

Zulkifli dan Moris A.Yogia. 2009. *Fungsi-Fungsi Manajemen*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing.

Zulkifli dan Nurmasari. 2015. *Pengantar Manajemen*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing.

Dokumentasi :

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019

Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Nomor 577 / DYS. 3 / KPTS / 10 / 2016

Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu

Peraturan Bupati Siak Nomor 92 Tahun 2016 Pasal 32 Ayat 8

Keputusan Bupati Siak Nomor 7/HK/KPTS/2017 tentang Unsur Penyelenggaraan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu “Peduli Sesamo”.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau